

**Proceedings  
Seminar Nasional  
Membangun Tingkat Kompetensi  
Tridarma Perguruan Tinggi untuk  
Pengembangan Kota Jakarta**

Editor:

**Prof. Dr. Armai Arief, MA**

**Prof. Dr. Suyatno, M.Pd**

**Prof. Dr. Sardjana Atmadja, Dr.SpOG(K), SH**

**Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.Si**

**Prof. Dr. Mts. Arief, MBA.,CPM**

**Dr. Titik Haryati, M.Si**

**Dr. Drs Muhadam Labolo, AMP.,M.Si**

**Aula Zamhir Islamie IPDN Jakarta, 10 Februari 2017**

**ASOSIASI DOSEN INDONESIA**

**First published 2017**

**JUDUL:**

**Proceedings Seminar Nasional  
Membangun Tingkat Kompetensi Tridarma Perguruan Tinggi untuk  
Pengembangan Kota Jakarta**

**Aula Zamhir Islamie IPDN Jakarta, 10 Februari 2017**

**ISBN 978-602-73963-3-8**



Editor:

**Prof. Dr. Armai Arief, MA  
Prof. Dr. Suyatno, M.Pd  
Prof. Dr. Sardjana Atmadja, Dr.SpOG(K), SH  
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.Si  
Prof. Dr. Mts. Arief, MBA.,CPM  
Dr. Titik Haryati, M.Si  
Dr. Drs Muhadam Labolo, AMP.,M.Si**

Published by:

**ASOSIASI DOSEN INDONESIA**

Layout and cover designed by:

**Dwi Andayani**

**Asosiasi Dosen Indonesia**

Gedung Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonseia  
Jl. Ir. H. Juanda No. 88 Ciputat Tangerang Selatan 15412  
Telp/Fax: 021-7492192  
Email. redaksiadi@yahoo.co.id

Edisi 1

v + 189 hlm; 21 x 29 cm

**@Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Memfoto copy atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum**

## **Kata Pengantar**

Alhamdulillah Asosiasi Dosen Indonesia sudah melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Membangun Tingkat Kompetensi Tridarma Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Kota Jakarta, pada tanggal 10 Februari 2017 bertempat di Aula Zamhir Islamie IPDN Jakarta dengan dihadiri oleh 300 peserta dan dikiti oleh 12 peserta proceeding. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pandangan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat umum tentang kebijakan dan peran strategis Tridarma Perguruan Tinggi dalam kemajuan bangsa ini khususnya di DKI Jakarta. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Pengurus Pusat Asosiasi Dosen Indonesia (MPP-ADI) dan Fakultas Politik Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan menghadirkan pembicara sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Armai Arief, MA (Ketua Umum MPP ADI)
2. Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH.,MH.,M.Si (Rektor IPDN)
3. Prof. Dr. Suyatno, M.Pd (Ketua Forum Rektor Indonesia)
4. Prof. Dr. Andi Faisal Bakhti (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia/ICMI)

Dalam acara ini yg berhalangan hadir Prof. Dr. Illah Sailah (Kopertis 3) dan panitia juga mengundang cagub dan cawagub diantaranya

1. Prof. Dr. Sylviana Murni (Cawagub 1)
2. Ir. Basuki Tjahya Purnama (Cagub 2)
3. Dr, Anies Baswedan (Cagub 3)

Pada kandidat ini diundang sebagai PEMBICARA SEMINAR untuk mengutarakan gagasan apa yang akan diwujudkan dalam memecahkan masalah pendidikan di jakarta dari perspektif kebijakan sebagai pemerintah daerah jika terpilih. Dosen khususnya di DKI jakarta perlu untuk mengkaji dan memberikan masukan kepada cagub dan cawagub agar pendidikan ditinggkat perguruan tinggi khususnya di DKI Jakarta mampu menjadi kota pendidikan masa depan. Namun ketiga kandidat itu berhalangan hadir

Ada beberapa hal yang diharapkan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan peran starategis ADI sebagai media antara dosen, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya baik nasional maupun regional dan internasional
2. Memberikan pemahaman dan pandangan kepada dosen, mahasiswa dan masyarakat umum tentang peran strategis Tridarma Perguruan Tinggi dalam kemajuan bangsa ini khususnya di DKI Jakarta
3. Meningkatkan Kompetensi Tridarma Perguruan Tinggi Khususnya di DKI Jakarta

4. Memberi pemahaman kepada masyarakat umum khususnya dosen tentang program kinerja para calon Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta khususnya di bidang pendidikan dan Tridarma Perguruan Tinggi
5. Seminar Nasional ini akan menghasilkan suatu rekomendasi untuk kebijakan dan peran strategis Tridarma Perguruan Tinggi dalam kemajuan bangsa ini khususnya di DKI Jakarta
6. Adanya masukan program-program untuk Pemerintah Daerah DKI Jakarta, diantaranya
  - a. Adanya anggaran untuk dana penelitian dosen untuk mengkaji/meneliti masalah atau inovasi di DKI Jakarta
  - b. Perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi dan Pemprov DKI Jakarta dalam kegiatan KKN, PK, PKL di wilayah-wilayah DKI Jakarta yang masih membutuhkan pembangunan misalnya kepulauan seribu dll
  - c. Pemprov DKI perlu mewadahi perguruan tinggi/dosen melalui transfer knowledge dalam bentuk seminar, workshop diskusi publik guna menyaring masukan sebagai input pengembangan pembangunan di Jakarta
  - d. Dosen dan perguruan tinggi merupakan kesatuan yang memiliki peran strategis dalam pembangunan manusia dan pembangunan secara keseluruhan, hasil penelitian dapat di jadikan acuan dalam membuat inovasi dan kebijakan Pemprov DKI Jakarta
  - e. Pemprov DKI diharapkan mampu mendorong dan menjadikan Jakarta menjadi kota pendidikan dunia, dimana adanya standar internasional dalam pengembangan Tridarma di Perguruan Tinggi

Demikianlah, semoga kegiatan dan proceedings ini bermanfaat untuk Membangun Tingkat Kompetensi Tridarma Perguruan Tinggi untuk Pengembangan Kota Jakarta,

Jakarta, 5 Maret 2017

Dr. Drs Muhadam Labolo, AMP.,M.Si  
Ketua Pelaksana

## DAFTAR ISI

1. DOSEN DAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUBAHAN SOSIAL <i>Andi Faisal Bakti</i> .....	7
2. MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA JAKARTA <i>Resista Vikaliana</i> .....	9
3. MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP SECARA KOLEKTIF DALAM MENDUKUNG KOMPETENSI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI <i>Regantini</i> .....	22
4. PERENCANAAN APLIKASI REMINDER DOSEN BERBASIS WEB Studi Kasus: Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana <i>Ali Khumaidi</i> .....	41
5. MEMBANGUN KEBIJAKAN KOMPETENSI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI KOTA JAKARTA” <i>Florentina, S.Pd., M.Pd.</i> .....	57
6. STRATEGI MAHASISWA BELA NEGARA dan SISTEM NILAI DALAM MEMANTAPKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI <i>Jarkawi</i> .....	79
7. PENGARUH KEDISIPLINAN MAHASISWA DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA TERHADAP TRIDARMA PERGURUAN TINGGGI SEKOLAH TINGGI XXX DI JAKARTA PUSAT <i>Khasanah</i> .....	97
8. PENDIDIKAN POLA ASRAMA SEBAGAI ALTERNATIF PENGEMBANGAN KOMPETENSI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA Sebuah Studi Kasus di Propinsi Papua Sebagai Daerah Khusus <i>Margaretha Rumbekwan</i> .....	105

9. ANALISIS PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM KKN  
TUJUH KOMPONEN TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN  
FAKULTAS TEKNIK UNKRIS JAKARTA  
*Jenniria Rajagukguk*.....130
10. KAJIAN IMPLEMENTASI TUGAS TRI DHAMA  
DOSEN MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN  
*Edi Wahyu Wibowo* ..... 142
11. OPTIMALISASI PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA  
PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA  
*Ida Ri'aeni*.....155
12. PERAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN  
PENDIDIKAN KELUARGA GUNA PENCEGAHAN TERJADINYA  
BULLYING PADA ANAK  
*Tri Sayekti*..... 177

## **DOSEN DAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PERUBAHAN SOSIAL**

**Andi Faisal Bakti, Guru Besar Fidik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;  
Dekan Fikom Universitas Pancasila**

### A. Prolog

Permasalahan yang cukup penting dikemukakan ketika membicarakan Tri Darma Perguruan Tinggi bukanlah mengenai apa yang dimaksud Tri Darma Perguruan Tinggi itu? Tapi tentang bagaimana kesadaran yang tinggi dari sebuah Perguruan Tinggi terutama para dosen akan pentingnya tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat? Dan bagaimana implementasinya dalam perubahan sosial yang demikian cepat?

Pertanyaan seperti demikian penting dimunculkan. Paling tidak, itu menjadi penting dalam upaya re-evaluasi terhadap sejauhmana selama ini para dosen telah menunaikan amanah akademiknya. Terlebih dalam upaya menepis anggapan sebagian orang yang menyebut bahwa "dosen hanya berkulat pada aspek teoritis," dan tidak memahami seluk-beluk fakta real yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, dosen sebagai elemen penting dari perguruan tinggi sering dilihat sebagai "kaum intelektual" *tok*, yang tidak punya kecakapan untuk terjun ke ranah sosial-praktis.

Ini tentu sebuah tantangan. M. McIntosh, K. Cacciola, S. Clermont, dan J. Keniry, misalnya dalam *State of the Campus Environment: A National Report Card on Environmental Performance and Sustainability in Higher Education*,<sup>1</sup> tampak meragukan kemampuan orang atau kelompok yang bergelut dengan pendidikan formal dalam mempertahankan dan menjamin stabilitas kehidupan. Bahkan, beberapa

---

<sup>1</sup>M. McIntosh, K. Cacciola, S. Clermont, dan J. Keniry, *State of the Campus Environment: A National Report Card on Environmental Performance and Sustainability in Higher Education*. Reston, Va.: National Wildlife Federation, 2001  
([www.nwf.org/campusecology/stateofthecampusenvironment](http://www.nwf.org/campusecology/stateofthecampusenvironment)). Lihat juga Anthony D. Cortese, "The Critical Role of Higher Education in Creating a Sustainable Future," *Planning of Higher Education*, (March–May 2003)15-22.

di antara mereka yang terdidik, seperti tegas J. Glyphis, malah membawa kita ke hidup di bawah kesenjangan sosial, tidak sehat, dan ketidakadilan.<sup>2</sup> Kritik semacam ini harus menjadi perhatian dan evaluasi diri bagi suatu perguruan tinggi, agar tidak terjebak pada narasi teoritis semata. Tapi juga mampu tampil sebagai *problem solvers* secara praktis bagi masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang terjadi di masyarakat.<sup>3</sup>

Makalah ini bertujuan memberikan penegasan akan arti penting amanah Tri Darma Perguruan Tinggi bagi para dosen sebagai *agent of social changes*. Dosen memiliki peranan penting dalam menggerakkan tiga darma tersebut secara real. Bagaimana para dosen menyinergikan tiga aspek tersebut dalam kegiatan akademiknya, sehingga kegiatan akademik bisa berorientasi sosial-empiris? Pertanyaan inipenting untuk didiskusikan di sini.

#### B. Memaknai Peran Dosen dalam Implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi

Keberadaan perguruan tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam perkembangan suatu masyarakat. Perguruan tinggi tidak bisa dipungkiri harus memiliki atau berdiri di atas misi publik (*public mission*).<sup>4</sup> Proses perubahan sosial (*social change*) di masyarakat yang begitu cepat, menuntut agar kedudukan dan fungsi perguruan tinggi benar-benar terwujud dalam peran yang nyata. Menurut Jennie C. Stephens, Maria E. Hernandez, Mikael Román, Amanda C. Graham, dan Roland W. Scholz,<sup>5</sup> keberadaan pendidikan tinggi bisa menjadi *agent of changes*,

---

<sup>2</sup>J. Glyphis (ed.,) How Can the Architect Contribute to a Sustainable World? Proceedings of the Wingspread Conference, 24–26 August 2011, Racine, Wis ([www.secondnature.org/pdf/snwritings/proceedings/wingspread.pdf](http://www.secondnature.org/pdf/snwritings/proceedings/wingspread.pdf)).

<sup>3</sup>Ini erat kaitannya dengan globalisasi. Menurut Antoni Giddens, globalisasi telah membuat kontak keterhubungan satu sama lain dalam berbagai kehidupan, berdimensi politik, teknologi, sosial budaya, dan ekonomi. Lihat A. Giddens, *Runaway World* (London: Profile Books Ltd, 2001), 5.

<sup>4</sup>Ben Jongbloed, Jurgen Enders, and Carlo Salerno, "Higher Education and Its Communities: Interconnections, Interdependencies and A Research Agenda," *Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)*, School of Management and Governance, University of Twente, (2008) 56:303-324.

<sup>5</sup>**JENNIE C. STEPHENS, MARIA E. HERNANDEZ, MIKAEL ROMÁN, AMANDA C. GRAHAM, ROLAND W. SCHOLZ, "HIGHER EDUCATION AS A CHANGE AGENT FOR SUSTAINABILITY IN DIFFERENT CULTURES AND CONTEXTS," INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION, VOL. 9 ISS: 3, (2008) PP.317-338.**



yang sangat potensial dalam mengupayakan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam menghadapi setiap tantangan sosial.

Peran perguruan tinggi tersebut tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: Darma Pendidikan, Darma Penelitian, dan Darma Pengabdian Masyarakat. Untuk menggerakkan tiga darma ini, keberadaan dosen menempati posisi yang cukup menentukan. Sebagai tugas dosen, hal ini diatur dalam UU RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat 2, yang menyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dosen sebagai aktor perubahan melalui pendidikan menurut R.I. Miller berpusat pada dirinya sebagai manusia (aktor) yang berdiri di balik sebuah sistem. Ia adalah penggerak yang merupakan faktor kunci yang menentukan kekuatan pendidikan.<sup>7</sup> Bahkan, dalam konteks pendidikan sebagai industri jasa, dosen merupakan elemen penting yang berada pada posisi yang sangat menentukan bagi kualitas pelayanan pendidikan.<sup>8</sup>

Dalam aktualisasinya, Tri Darma Perguruan Tinggi tidak hanya diarahkan untuk menciptakan pendidikan yang bersifat normatif, yang hanya berperan sebagai pusat pengajaran semata. Proses belajar mengajar di kelas harus didukung dengan serangkaian penelitian (*research*) yang relevan. Itu dilakukan mengingat teori-teori yang diajarkan di bangku kuliah perlu terus ditinjau kembali dan dikembangkan, sehingga pendidikan mampu menjelaskan setiap fakta yang terus bermunculan dalam kehidupan sosial. Ilmu yang diperoleh melalui penelitian setidaknya dapat menerangkan (*to explain*), meramalkan (*to predict*) atau menciptakan (*to create*) peristiwa (*event*) di dalam kehidupan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Apa yang disebutkan ini, bahwa para dosen dituntut tidak hanya

---

<sup>6</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 2005. Bandung: Citra Umbara.

<sup>7</sup>R.I. Miller, "Appraising Institutional Performance." *Improving Academic Management*. USA: John Wiley and Sons, 1980), 76.

<sup>8</sup>E. Sallis, *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited, 2002) 35.

menyediakan pendidikan dan riset semata, tampaknya selaras dengan pernyataan Guston dan Keniston, bahwa:

*"...higher education is not only expected to deliver excellent education and research, it also has to deliver those outputs in ways, volumes and forms that are relevant to the productive process and to shaping the knowledge society. This has been characterized by some as a fundamental change in the social contract between science and higher education institutions, on the one hand, and the state on the other...."*<sup>9</sup>

Di situ jelas bahwa sejatinya antara kehidupan sosial dan lembaga pendidikan terjalin sebuah kontrak sosial. Kontrak itu adalah keharusan kesejajaran aktivitas akademik dengan konteks sosial. Suatu pendidikan harus mampu menjawab kompleksitas persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Karena itulah, di samping pengajaran di kelas dan aktivitas penelitian, perguruan tinggi yang diwakili oleh dosen sebagai masyarakat ilmiah dituntut untuk berperan secara aktif dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masyarakat. G. Neave menegaskan: *"...higher education institutions have a distinctly 'public' character or responsibility to society* (lembaga pendidikan tinggi memiliki tanggung jawab kepada publik (masyarakat)).<sup>10</sup> Pada point ini suatu perguruan tinggi harus menunjukkan pengabdian pada masyarakat. Peran pengabdian kepada masyarakat menjadi penentu berfungsi tidaknya sebuah perguruan tinggi.

Mengapa seorang dosen harus menjalankan TriDarma perguruan tinggi? Ini tentu berhubungan dengan peran seseorang ketika menempatkan dirinya sebagai insan akademik. Sudah menjadi konsekuensi yang harus diterima ketika seseorang menjadi dosen. Sebab jika menggunakan teori peran, maka seperti tegas G. Ritzer dan D.J. Goodman, sebuah peran bisa dilihat sebagai interaksi sosial yang dalam prosesnya berjalan di atas budaya atau nilai yang ada.<sup>11</sup> Suatu peran berdiri di atas budaya dan kesepakatan bersama. Dalam kaitan itu, seorang dosen baru dikatakan

---

<sup>9</sup> D. H. Guston & K. Keniston, (Eds.), *The Fragile Contract* (Cambridge, MA: MIT Press, 1994). Lihat juga G. Neave, *Redefining the Social Contract.* *Higher Education Policy*, (2006) 19, 269-286.

<sup>10</sup> G. Neave, *The universities' Responsibilities to Society* (Oxford: Pergamon, 2000),

<sup>11</sup> G. Ritzer & D. J Goodman Ritzer, *Modern Sociological Theory* (Alih bahasan Alimandan). Jakarta: Prenada Media Group. (2003), 117.

berperan apabila ia telah melaksanakan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Namun untuk melihat peran dosen tidak melulu harus berpusat pada diri seorang dosen secara personal semata. Menurut W.B. Castteter, terdapat banyak faktor yang dianggap dapat memengaruhi peran seseorang. Faktor itu bisa berasal dari: (a) internal diri sendiri (personal), seperti kelemahan intelektual, demotivasi, kelemahan fisiologis, personalitas, keusangan, preparasi posisi, dan orientasi nilai; (b) organisasi, yang meliputi: sistem organisasi, peranan organisasi, perilaku yang berhubungan dengan pengawasan, iklim organisasi, dan budaya organisasi; dan (c) lingkungan eksternal, seperti: keluarga, kondisi ekonomi, politik, hukum, nilai-nilai sosial, pasaran kerja, perubahan teknologi, dan perkumpulan-perkumpulan.<sup>12</sup>

Beberapa faktor di atas penting diketahui oleh para dosen dalam melaksanakan tiga darma yang menjadi kewajiban mereka. Seorang dosen harus memahami keterhubungan dari masing-masing faktor di atas. Karena masing-masing dari faktor personal, organisasional, dan lingkungan eksternal adalah tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena faktor yang memengaruhi peran seseorang tidak hanya berasal dari diri individual-personal, maka seorang dosen harus membekali dirinya dengan segala kemungkinan faktor yang memengaruhi atau menghambat perannya.

Selain mengetahui faktor-faktor di atas, hal yang paling penting dilakukan oleh dosen adalah menempatkan tiga darma itu dalam konteks kehidupan sosial secara nyata. Atau dengan kata lain memaknainya dengan sudut pandang fungsi dan peran sosial. Untuk itu dibutuhkan seperangkat upaya yang intensive dalam segala hal. Di antara hal yang penting ditekankan oleh para dosen dalam kaitan dengan penerapan penguatan Tri Darma perguruan itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup>Castetter, W.B. *The Human Resource Function in Educational Administration*, New York: Prentice Hall Inc. Englewood Cliff, 1996), 271. Bandingkan dengan R.L. Mathis and J.H. Jackson, *Human Resource Management*. (Terjemahan oleh Diana Angelica), Jakarta: Salemba Empat, 2006), 113.

- a. Komitmen dalam menciptakan lingkungan dan budaya akademik yang baik dan kondusif. Ini dilakukan mengingat lingkungan yang akademis akan menentukan sebuah peran akademis yang dijalankan.
- b. Inovatif-kreatif dalam mengembangkan teori-teori lama dan menemukan teori-teori baru, sehingga gagasan akademik yang dikembangkan benar-benar mencerminkan realitas yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Responsif terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi, serta mengendepankan sikap kritis dan analitik dalam proses pengkajian(*study*)nya.
- d. Serta akomodatif terhadap perkembangan teknologi yang bisa mendukung program Tri Darma perguruan tinggi. Para dosen dituntut untuk terbuka dalam menginternalisasikan gagasan-gagasannya melalui perangkat teknologi informasi.<sup>13</sup>

Dengan optimalisasi peran dosen dalam mengimplementasikan Tri Darma perguruan tinggi ini diharapkan mampu melahirkan sebuah pendidikan tinggi yang bermutu. Beberapa kriteria pendidikan tinggi bermutu adalah apabila: (a) perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif); (b) perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stake-holders* (aspek induktif), berupa: kebutuhan kema-syarakatan (*societal needs*); kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); kebutuhan profesional (*professional needs*).<sup>14</sup> Untuk itu perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikannya suatu proses yang menjamin pencapaian mutu itu.

### C. Penutup dan Refleksi: Perguruan Tinggi (Dosen) sebagai *Agent of Change*

Dosen menjadi penting bagi upaya implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi. Itu dilihat dari keberadaannya yang *concern* dengan urusan akademik dan

---

<sup>13</sup>N. Sedziuviene and J. Vveinhardt menyatakan bahwa teknologi komunikasi dan informasi telah memengaruhi dan mengubah proses diseminasi informasi dan pengetahuan di seluruh dunia. N. Sedziuviene and J. Vveinhardt "The Paradigm of Knowledge Management in Higher Educational Institutions," *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, Vol. 5, , 2009), 79-90. Lihat juga F. Lindner and A. Wald, "Success Factors of Knowledge Management in Temporary Organizations," *International Journal of Project Management*, vol. 29, (2011), 877-888.

<sup>14</sup>Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2003.

mahasiswa. Dosen merupakan tenaga profesional yang menetapkan apa yang terbaik untuk mahasiswanya berdasarkan pertimbangan profesional. Tidak bisa disangkal bahwa mutu pendidikan bisa sangat bergantung pada mutu dosen. Oleh karena itu, sebagai aktor penggerak perubahan, para dosen dituntut untuk menyadari perannya dalam menunaikan amanah perguruan tinggi: amanah pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Kesadaran akan peran tersebut tidak bisa diartikan secara sederhana. Di situ ada komitmen intelektual dan sosial yang harus dipegang dan dijalankan oleh seorang dosen. Karenanya, segala hal yang menunjang keberadaannya sebagai dosen dengan amanah perguruan tinggi dipundaknya, menjadi penting untuk dimiliki. Artinya, dalam proses implementasi Tri Darma perguruan tinggi, mereka harus pula bersikap responsif dan kritis terhadap gejala-gejala sosial, kreatif-inovatif dalam mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan baru, serta akomodatif terhadap segala kemungkinan yang bisa mendongkrak kinerjanya, seperti penguasaan teknologi informasi, yang bisa memberikan kemudahan dalam proses transformasi gagasan pendidikan.

## KEPUSTAKAAN

Castetter, W.B. *The Human Resource Function in Educational Administration*, New York: Prentice Hall Inc. Englewood Cliff. 1996.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2003.

D. H. Guston & K. Keniston, (Eds.), *The Fragile Contract*. Cambridge, MA: MIT Press. 1994.

Glyphis, J. (ed.,) *How Can the Architect Contribute to a Sustainable World?*  
Proceedings of the Wingspread Conference, 24-26 August 2011, Racine, Wis.  
Retrieved November 30, 2002  
([www.secondnature.org/pdf/snwritings/proceedings/wingspread.pdf](http://www.secondnature.org/pdf/snwritings/proceedings/wingspread.pdf)).

Giddens, A. *Runaway World*. London: Profile Books Ltd. 2001.

- Jongbloed, Ben., Jurgen Enders, and Carlo Salerno. "Higher Education and Its Communities: Interconnections, Interdependencies and A Research Agenda." *Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS)*. School of Management and Governance, University of Twente (2008) 56:303-324.
- Lindner, F. and A. Wald. "Success Factors of Knowledge Management in Temporary Organizations." *International Journal of Project Management*, Vol. 29 (2011), 877-888.
- Mathis, R.L. and J.H. Jackson. *Human Resource Management* (Terjemahan oleh Diana Angelica) Jakarta: Salemba Empat. 2006.
- McIntosh, M.,K. Cacciola, S. Clermont, dan J. Keniry, *State of the Campus Environment: A National Report Card on Environmental Performance and Sustainability in Higher Education*. Reston, Va.: National Wildlife Federation, 2001 ([www.nwf.org/campusecology/stateofthecampusenvironment](http://www.nwf.org/campusecology/stateofthecampusenvironment)).
- Miller, R.I. "Appraising Institutional Performance." *Improving Academic Management*. USA: John Wiley and Sons. 1980.
- Neave, G. *The universities' Responsibilities to Society*. Oxford: Pergamon. 2000.
- "Redefining the Social Contract." *Higher Education Policy* (2006) 19, 269-286.
- Stephens, Jennie C.,Maria E. Hernandez, Mikael Román, Amanda C. Graham, and Roland W. Scholz. "Higher Education as A Change Agent for Sustainability in Different Cultures and Contexts." *International Journal of Sustainability in Higher Education*, Vol. 9 Iss: 3 (2008) pp.317-338.
- Ritzer, G. and D. J. Goodman Ritzer. *Modern Sociological Theory* (Alih bahasa Alimandan). Jakarta: Prenada Media Group. 2003. *6th Edition*.
- Sedziuviene, N. and J. Vveinhardt. "The Paradigm of Knowledge Management in Higher Educational Institutions." *Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics*, Vol. 5, (2009), 79-90.
- Sallis, E. *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page Limited. 2002.

*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*  
2005. Bandung: Citra Umbara.

## **MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA JAKARTA**

Resista Vikaliana

### *Abstrak*

*Perguruan tinggi adalah salah satu dari subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat penting melalui adanya penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyebutkan bahwasanya perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 20 Ayat 2. Vikaliana (2016) mengkaji kemitraan lokal antara pemerintahan daerah, perguruan tinggi dan industri di Kota Bekasi. Implementasi Model Triple Helix di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan tahapan berikut:*

- 1. Penyediaan tenaga kerja terdidik yang sesuai dengan harapan dunia kerja dan industri*
- 2. Kerjasama riset kasus riil di industri untuk diteliti oleh dosen maupun mahasiswa perguruan tinggi.*
- 3. Optimalisasi pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pendidikan dan penelitian.*
- 4. Membangun Forum Iptek. Berdasarkan model dari Marilee S. Grindle tersebut, sivitas akademika/ akademisi dituntut untuk peka terhadap sekitar (fenomena sosial). Kepekaan sosial ini bisa didukung dengan kerjasama para pemangku kepentingan, misal komunitas binaan. Kepekaan sosial tersebut dikaitkan langsung sesuai keilmuan akademisi. Selain itu, untuk mendukung implementasi kebijakan tri dharma perguruan tinggi, dengan membuat nota kesepahaman antara pemerintah dengan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam:*

- 1. Optimalisasi pemanfaatan dana corporate social responsibility (CSR) untuk pendidikan dan penelitian, membentuk sistem pengaturan kemitraan sinergis agar penelitian perguruan tinggi bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dan memanfaatkan potensi masyarakat, dunia usaha, dan industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.*
- 2. Membangun Forum Iptek yang bertujuan untuk memberikan wadah interaksi antara lembaga riset dan perguruan tinggi se-Kota Jakarta dengan pihak industri dan pengambil kebijakan. Kerjasama pengembangan Forum Iptek tersebut menjadi salah satu cara yang efektif dalam membangun kerjasama di antara para pemangku kepentingan Iptek.*

*Kata-kata kunci: Model Implementasi Kebijakan Marilee S. Grindle , Jakarta*

## **Pendahuluan**

Perguruan tinggi adalah salah satu dari subsistem pendidikan nasional. Keberadaannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berperan sangat penting melalui adanya penerapan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menyebutkan bahwasanya perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 20 Ayat 2. Perguruan Tinggi sebagai lokomotif penghasil cendekia sudah seharusnya mengimplementasikan pendidikan dan penelitian dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat atau dalam bentuk komersialisasi. Upaya ini bisa dilakukan pula dengan menggandeng pihak lain, misal pemerintah sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan, serta industri/ swasta sebagai pengguna output perguruan tinggi.

Vikaliana (2016) mengkaji kemitraan lokal antara pemerintahan daerah, perguruan tinggi dan industri di Kota Bekasi. Implementasi Model Triple Helix di Kota Bekasi dapat dilakukan dengan tahapan berikut: 1. Penyediaan tenaga kerja terdidik yang sesuai dengan harapan dunia kerja dan industri 2. Kerjasama riset kasus riil di industri untuk diteliti oleh dosen maupun mahasiswa perguruan tinggi. 3. Optimalisasi pemanfaatan *dan corporate social responsibility* (CSR) untuk pendidikan dan penelitian. 4. Membangun Forum Iptek.

Kajian ini merupakan penelitian kepustakaan. Model yang digunakan untuk mengkaji implementasi kebijakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Jakarta adalah model implementasi kebijakan Marilee S. Grindle.

## **Teori**

### Tri Dharma Perguruan Tinggi

#### 1. Pendidikan

Umumnya dengan ilmu yang telah dipelajari selama proses pendidikan dan pengajaran di kampus masing-masing yang sesuai pada bidang keilmuan tertentu. Semua harus didasari dengan adanya pertimbangan yang rasional, bukan menggunakan adu otot tetapi dengan menggunakan akal atau berpikir ilmiah.



## 2. Penelitian dan Pengembangan

Ilmu yang sudah dikuasai setelah melalui proses pendidikan yang panjang di perguruan tinggi haruslah diimplementasikan serta diterapkan. Salah satunya yaitu dengan langkah yang ilmiah, seperti halnya melalui penelitian.

Penelitian bukan hanya akan mengembangkan diri dari sivitas akademika, tetapi juga akan memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan bangsa. Akademisi harus selalu mengembangkan kemampuannya dalam hal cara berpikir yang kritis terhadap segala fenomenayang ada serta mampu mengkajinya secara keilmuan.

## 3. Pengabdian pada Masyarakat

Dalam relasi kemasyarakatan, sivitas akademika/ akademisi menempati lapisan yang kedua, yaitu mempunyai peran menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Kewajiban lain sebagai akademisi adalah menjadi *front line* di dalam masyarakat yang bertugas untuk mengkritisi kebijakan yang kurang tepat yang dibuat oleh pemerintah terhadap masyarakat. Akademisi mempunyai ilmu mengenai permasalahan yang ada, melakukan kajian atau penelitian, sebagai bentuk pengabdian akademis terhadap masyarakat.

### **Keterkaitan Ketiga Poin Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Ketiga faktor memiliki hubungan yang erat, karena penelitian harus dilakukan dengan menjunjung tinggi kedua dharma yang lain. Sehingga penelitian diperlukan di dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta penerapan teknologi. Untuk bisa melakukan penelitian diperlukan adanya tenaga ahli yang dihasilkan setelah melalui proses pendidikan. Ilmu pengetahuan yang telah dikembangkan sebagai salah satu hasil pendidikan dan penelitian hendaknya digunakan melalui pengabdian pada masyarakat. Sehingga masyarakat mampu memanfaatkan dan juga menikmati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Strategi Implementasi di Perguruan Tinggi**

Eksistensi dari perguruan tinggi mempunyai peran yang sangat penting untuk memengaruhi perubahan-perubahan terhadap masyarakat.

Peran dan fungsi dari perguruan tinggi merupakan implementasi dari tri darma yang telah dijadikan sebagai kewajibannya, mampu untuk diwujudkan dalam bentuk untuk membangun gerakan pembelajaran terhadap masyarakat guna mendorong terciptanya hubungan sosial serta terjaganya nilai-nilai kebudayaan bangsa.

Perguruan tinggi bisa mengembangkan sebuah model dari pembangunan yang berbasis pada keilmuan serta sumberdaya lokal di dalam kerangka yang bersistem pada nilai budaya bangsa.

Membangun sistem pengembangan keilmuan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di dalam merespon perubahan global yang dinamis ini, mengembangkan pusat-pusat untuk pengembangan masyarakat dengan melakukan pemanfaatan sumber daya serta nilai-nilai lokal yang ada. Kemudian ikut membantu pengembangan kebijakan yang strategis terhadap legislatif dan eksekutif dan ikut juga untuk mengontrol implementasi kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Perguruan tinggi mampu berperan dalam hal pengembangan strategi kebudayaan, hal tersebut diperlukan guna membangun peradaban bangsa yang lebih baik lagi.

Terutama untuk membangun kembali nilai-nilai yang sejalan dengan keberagaman yang diterima sebagai kekayaan dan tidak lagi dipertentangkan. Untuk itu, pembangunan peradaban memerlukan peran yang berbasis pada nilai etika serta nilai budaya yang sudah lama melekat dalam jati diri bangsa ini.

Dalam konteks menyeluruh, termasuk pada ranah organisasi dan pelaksanaan program kerja yang mengutamakan sebuah dampak meluas dan berjangka panjang, bukan besaran nominal yang di keluarkan dari sebuah program kerja. Pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah program kerja dapat berdampak secara maksimal dan berjangka panjang lebih dirasakan oleh masyarakat.

Sebagai contoh implementasi kegiatan yang bermuara dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah, dengan mengadakan penelitian kepada UKM. Pertama, kita lakukan analisis permasalahan yang sudah lama menjadi masalah klasik. Kitaumpamakan mereka terkendala pada permodalan. Kedua, dicarikan sebuah solusi antara lain bisa meminjam kepada pihak bank atau opsi kedua dengan membentuk koperasi dengan menghimpun UKM yang lainnya. Ketiga adalah, mahasiswa turun langsung ke lapangan dengan membawa hasil dari penelitian dan pengkajian yang telah di hasilkan, misalkan opsi pembentukan koperasi menjadi opsi terbaik, maka kita

bentuk bentuk bersama dan kita awasi proses berjalanya koperasi sampai benar-benar bekerja optimal untuk menjawab masalah permodalan bagi UKM setempat. Pembinaan tersebut bersifat kontinu pada jangka waktu tertentu menyesuaikan tujuan yang telah ditargetkan.

### **Teori Marilee S. Grindle (1980)**

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

1) Variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu; (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan (6) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

2) Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut; (1) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### **Hasil dan diskusi**

Berdasarkan model dari Marilee S. Grindle tersebut, sivitas akademika/ akademisi dituntut untuk peka terhadap sekitar (fenomena sosial). Kepekaan sosial ini bisa didukung dengan kerjasama para pemangku kepentingan, misal komunitas binaan.

Kepekaan sosial tersebut dikaitkan langsung sesuai keilmuan akademisi. Misal:

- Permasalahan tata kota bidang ilmu ketatakotaan
  - Permasalahan socialcriminal dan kemiskinan bidang ilmu kriminologi dan sosial
  - Permasalahan ekonomi mikro bidang ilmu ekonomi
- dan masih banyak bidang ilmu lainnya.

Selain itu, untuk mendukung implementasi kebijakan tri dharma perguruan tinggi, dengan membuat nota kesepahaman antara pemerintah dengan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam:

1. Optimalisasi pemanfaatan *dan corporate social responsibility* (CSR) untuk pendidikan dan penelitian, membentuk sistem pengaturan kemitraan sinergis agar penelitian perguruan tinggi bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, dan memanfaatkan potensi masyarakat, dunia usaha, dan industri untuk peningkatan kualitas pendidikan.
2. Membangun Forum Iptek.

Forum Iptek ini bertujuan untuk memberikan wadah interaksi antara lembaga riset dan perguruan tinggi se-Kota Jakarta dengan pihak industri dan pengambil kebijakan. Kerjasama pengembangan Forum Iptek tersebut menjadi salah satu cara yang efektif dalam membangun kerjasama di antara para pemangku kepentingan Iptek.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan model dari Marilee S. Grindle tersebut, sivitas akademika/ akademisi dituntut untuk peka terhadap sekitar (fenomena sosial). Kepekaan sosial ini bisa didukung dengan kerjasama para pemangku kepentingan, misal komunitas binaan. Kepekaan sosial tersebut dikaitkan langsung sesuai keilmuan akademisi.

Selain itu, untuk mendukung implementasi kebijakan tri dharma perguruan tinggi, dengan membuat nota kesepahaman antara pemerintah dengan pihak swasta dan perguruan tinggi dalam:

1. Optimalisasi pemanfaatan dana *corporate social responsibility* (CSR)
2. Membangun Forum Iptek.

## **Referensi**

- [1] Vikaliana, Resista (2016), "Pendekatan Kemitraan Model Triple Helix untuk Mengurangi Pengangguran di Kota Bekasi", Prosiding Seminar Nasional Kemitraan Perguruan Tinggi, Industri dan Pemerintah dalam Meningkatkan Investasi dan Mengurangi Pengangguran di Kota Bekasi, Oktober, Bekasi

- [2] Nawawi, Ismail (2009), *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Penerbit PMN. Surabaya.
- [3] Subarsono, AG (2010), *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Cetakan V Desember 2010. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- [4] Siregar, Arpan (2013), *Model dan Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*. <https://arpansiregar.wordpress.com/2013/01/17/model-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-implementasi-kebijakan/> diunduh 31 Januari 2017

## **MANAJEMEN PENGELOLAAN ARSIP SECARA KOLEKTIF DALAM MENDUKUNG KOMPETENSI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Regantini

asa010609@yahoo.com

### ***Abstract***

Three responsibilities of Higher Education is one of the basic responsibilities of higher education institutions to students and communities should be developed simultaneously and together. A college established archival institutions in the hope that he will be able to manage the archives of the institution and contribute to students and the community. Archive management in higher education is needed because it can keep the collective memory of the institution and ensure the preservation of resources and the fields of research and study results. Has become a necessity to save the archive in college by regulating the collective management of archive so that any existing activities in universities can be accounted for.

Along with the time, the longer growing archive. The growing archive does not always have to be saved, but at a certain period should be depreciated. While others depreciated, some other parts of the archive will be maintained. Archives preserved in the form of recordings, notes, photos and everything in physical form (hardfile) will slowly age and the longer becomes dull and worn. To avoid these things, need to be done over the media archives into electronic records by means of digitalization into shape softfile. It has become one of the answers of the importance of higher education institutions perform archive management to archive valuable, good academic records, research, and other archives.

*Keywords:* archive, archive management.

Kata kunci: arsip, manajemen arsip

## **Pendahuluan**

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.<sup>15</sup> Dalam hal ini, Perguruan tinggi merupakan bentuk dari lembaga pendidikan tinggi. Penyelenggara dari pendidikan tinggi bisa dilakukan oleh instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Lembaga Perguruan Tinggi berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau yang lazim disebut sebagai Tridharma Perguruan Tinggi.

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu dasar tanggung jawab institusi pendidikan tinggi kepada mahasiswa dan masyarakat yang harus dikembangkan secara simultan dan bersama-sama. Dengan penerapan Tridharma Perguruan Tinggi secara nyata dan bertanggung jawab, maka Perguruan Tinggi akan dapat meningkatkan kompetensinya dalam dunia pendidikan. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Artinya dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Tridharma Perguruan Tinggi, sebuah institusi pendidikan harus dapat mencetak lulusan yang memiliki kompetensi keahlian yang mumpuni di bidangnya.

Saat ini kurikulum Perguruan Tinggi dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi.<sup>16</sup> Perguruan Tinggi sebagai salah satu sektor pendidikan yang mengedepankan kompetensi dan mengemban amanah Tridharma Perguruan Tinggi, membutuhkan sumber informasi yang lengkap, tepat dan akurat dalam kegiatannya. Oleh karena itu informasi menjadi bagian yang sangat penting dalam kegiatan civitas

---

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, pasal 1 (2) tentang Pendidikan Tinggi

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010, pasal 97 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

akademika, karena dalam pengambilan keputusan haruslah menggunakan data-data yang valid. Sebagaimana yang dijelaskan oleh George R. Terry dalam teori manajemen bahwa pengambilan keputusan harus berdasarkan informasi data dan fakta empiris agar dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Pengambilan keputusan juga harus berdasarkan rasio sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan dan konsisten.

Berkaitan dengan hal itu, setiap Perguruan Tinggi tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan informasi dan dokumen atau kata lainnya biasa disebut dengan pengelolaan arsip. Adanya bukti otentik dari sebuah lembaran atau berkas arsip bagi suatu kegiatan di Perguruan Tinggi akan semakin menunjukkan bahwa kegiatan itu valid dan benar adanya telah dilaksanakan. Adanya arsip tersebut juga akan semakin meningkatkan kompetensi dari Perguruan Tinggi itu sendiri. Baik itu arsip yang bersifat dinamis (aktif dan inaktif) maupun arsip yang bersifat statis atau permanen. Meski pada dasarnya arsip disimpan oleh organisasi yang menciptakannya ketika masih menjadi arsip dinamis, tetapi mungkin juga ada banyak arsip yang lebih bernilai untuk kegiatan penelitian, sehingga di kemudian hari setelah menjadi arsip statis, arsip tersebut akan menjadi bagian dari warisan budaya yang menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang.

Berbicara mengenai arsip yang tercipta di lingkungan institusi Perguruan Tinggi, perlu adanya suatu lembaga khusus di Perguruan Tinggi yang menangani arsip dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Lembaga khusus itu adalah Unit Kearsipan Perguruan Tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Kearsipan No. 43 Tahun 2009 pasal 27, bahwa arsip perguruan tinggi adalah lembaga kearsipan perguruan tinggi. Arsip perguruan tinggi wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi.

Oleh sebab itu keberadaan unit kearsipan Perguruan Tinggi sebagai pengelola arsip sangat diperlukan. Meskipun secara administrasi hukum telah dinaungi oleh peraturan, namun saat ini masih sedikit perguruan tinggi yang membentuk unit kearsipan perguruan tinggi.<sup>17</sup> Selanjutnya, kehadiran Undang-Undang No. 14 Tahun

---

<sup>17</sup> Lolytasari, *Memahami Manajemen Arsip Perguruan Tinggi*, *Jurnal Palimpsest Universitas Airlangga*, Vol.5/No.1/ Published: 2014-08, TOC: 1 and page: 1-13, <http://www.journal.unair.ac.id/>, diakses 27 Januari 2017, pukul 09:23 WIB



2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dalam pasal 52 telah mengatur sanksi untuk badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan atau mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan. Merujuk kutipan tersebut, tampak bahwa arsip berperan penting bagi keterbukaan informasi publik yang juga sudah diatur dalam Undang-Undang Kearsipan.

Suatu lembaga kearsipan perguruan tinggi dibentuk dengan harapan bahwa ia akan dapat mengelola arsip institusi tersebut dan memberi kontribusi kepada mahasiswa dan masyarakat. Sedangkan bagi pemerintah peranan lembaga kearsipan dapat menunjang pengambilan keputusan dalam melakukan tugasnya serta sejauh mana keberadaan lembaga kearsipan perguruan tinggi itu dapat memberikan sumbangan di bidang Ilmu Pengetahuan.<sup>18</sup> Setidaknya beberapa sumbangan yang dapat diberikan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi kepada masyarakat antara lain melestarikan warisan budaya masyarakat, memberi inspirasi dan rasa hormat terhadap kelampauan, memberi kemungkinan kepada pengambil keputusan dan rakyatnya untuk belajar tentang masa lampainya, mengizinkan masyarakat untuk mengetahui secara jelas tentang hak-hak hukum mereka dan mengizinkan setiap individu untuk melihat secara jelas tentang episode kejadian tertentu atau tokoh-tokoh tertentu yang menonjol dalam kebudayaannya. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa arsip yang dipelihara dan disimpan pada lembaga kearsipan perguruan tinggi bukan hanya melestarikan budaya bangsa tetapi sekaligus juga sebagai sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Salah satu dari pemanfaatan itu adalah sebagai bahan penelitian.<sup>19</sup> Karena penelitian merupakan salah satu komponen dalam Tridharma Perguruan Tinggi, maka hasil-hasil penelitian yang dikelola sebagai arsip perguruan tinggi merupakan instrumen bagi terselamatkannya memori kolektif bangsa di lingkungan civitas akademika.

---

<sup>18</sup> Tim Penulis Modul Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil ANRI, *Modul Manajemen Layanan Informasi*, Bogor, 2012, hlm.6

<sup>19</sup> *ibid*

Beberapa permasalahan mendasar yang masih sering muncul dalam suatu lembaga yang mengatur kearsipan adalah manajemen pengelolaannya yang terkait dengan kebijakan, kelembagaan, pembenahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan arsip statis perguruan tinggi itu sendiri serta anggaran yang masih minim. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga kearsipan perguruan tinggi untuk melakukan pengelolaan arsip secara kolektif dalam mendukung kompetensi Tridharma Perguruan Tinggi.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Arsip**

Arsip menurut pasal 1 Undang-Undang Kearsipan No.43 Tahun 2009 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan arsip perguruan tinggi, masih menurut Undang-Undang yang sama, adalah lembaga kearsipan berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi.

Tugas arsip Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Kearsipan diantaranya adalah: (1) wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari satuan kerja di lingkungan perguruan tinggi dan civitas (2) melaksanakan pengelolaan arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun yang berasal dari satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, dan (3) melakukan pembinaan kearsipan di lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Maksud pembentukan arsip universitas/perguruan tinggi adalah untuk membantu institusi perguruan tinggi dalam mempertahankan dan menumbuhkembangkan misi edukasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang dilandasi oleh Tridharma Perguruan Tinggi.<sup>20</sup> Sedangkan tujuan pembentukan arsip perguruan tinggi bertujuan untuk:

---

<sup>20</sup> Machmoed Effendhie. *Program University Archives UGM: Desain, Implementasi, Tantangan Sekarang &*

(1) mendukung dan memfasilitasi administrasi perguruan tinggi dan pengembangannya, (2) menentukan dan menjamin bahwa institusi menciptakan bukti kegiatan dan transaksi, (3) menyediakan akses terhadap bukti tersebut bagi pengguna (internal dan eksternal), (4) memelihara bukti kegiatan dan transaksi institusi, (5) mendukung pendidikan dan mempertinggi mutu pengajaran, (6) mendukung penelitian fakultas, lembaga penelitian, pusat studi, civitas akademika, alumni, publik melalui akses informasi kearsipan dan (7) memperkenalkan penemuan dan diseminasi pengetahuan melalui public servicing.<sup>21</sup> Arsip universitas berfungsi mengelola dan menyelamatkan arsip yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

Jenis-jenis arsip berdasarkan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kearsipan No. 43 tahun 2009 dibedakan menjadi: (1) arsip dinamis aktif yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Biasanya arsip dinamis disebut juga dengan rekod. (2) arsip dinamis inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun dan hanya dipergunakan sebagai referensi bagi perguruan tinggi yang bersangkutan. Pada tahap ini arsip tidak lagi berada pada kesatuan kerja pengolah, tetapi penyimpanannya berada pada pusat penyimpanan arsip atau berkas perguruan tinggi. (3) arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya dan berketerangan dipermanenkan dan telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Arsip yang dikelola oleh unit kearsipan perguruan tinggi pada dasarnya adalah arsip statis. Khasanah arsip perguruan tinggi merupakan seluruh arsip yang berasal dari lingkungan perguruan tinggi, yakni yang sudah tidak digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi perguruan tinggi dan mempunyai nilai guna skunder, permanen, berkelanjutan, nilai kesejarahan dan kearsipan.<sup>22</sup> Yang termasuk dalam arsip statis perguruan tinggi adalah laporan kegiatan

---

*Mendatang*, [https://www.academia.edu/30977977/Program\\_University\\_Archives\\_UGM\\_Desain\\_Implementasi\\_Tantangan\\_Sekarang\\_dan\\_Mendatang](https://www.academia.edu/30977977/Program_University_Archives_UGM_Desain_Implementasi_Tantangan_Sekarang_dan_Mendatang), diakses tanggal 31 Januari 2017, pukul 10:55 WIB

<sup>21</sup> *ibid*

<sup>22</sup> Susiasih Damalita, *Pentingnya Manajemen Arsip di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMAS) FE Unimas Mojokerto, Vol.3 No. 1 Desember 2009 hlm.2

universitas/fakultas, laporan universitas/fakultas, notulen rapat kerja universitas, berkas pengajar termasuk juga berkas staf administrasi akademik dan mahasiswa, hasil karya ilmiah; skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian dan kajian serta hasil ujian mahasiswa.<sup>23</sup> Pengelompokan arsip atau dokumen di perguruan tinggi secara jelas terdapat dalam anggaran rumah tangga perguruan tinggi yang bersangkutan. Namun secara umum, dokumen perguruan tinggi dapat dikelompokkan menjadi 4 dokumen,<sup>24</sup> yakni:

1. Dokumen akademik; yakni dokumen tentang catatan dan kemajuan akademik mahasiswa, antara lain buku induk mahasiswa, bukti kelulusan, buku nilai ujian, dll.
2. Dokumen administrasi; yakni dokumen yang berisikan tentang sumber daya universitas, diantaranya dokumen kepegawaian, keuangan, dokumen perlengkapan dan dokumen administrasi umum (ketatausahaan).
3. Dokumen kemahasiswaan dan alumni; yakni tentang kemahasiswaan yang bersifat ekstra kurikuler serta data alumni, misalnya buku alumni.
4. Dokumen lainnya yang penting bagi perkembangan universitas, berupa dokumen karya-karya ilmiah yang merupakan kekayaan intelektual dari pakar-pakar dan para ahli peneliti universitas.

### **Pengelolaan Arsip**

Pengelolaan arsip adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. (Himpunan Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2003: 534) Pengelolaan sendiri berarti upaya untuk mengatur aktivitas berdasarkan konsep dan prinsip yang lebih efektif, efisien dan produktif dengan diawali penentuan strategi dan perencanaan. Pengelolaan arsip memegang peranan penting bagi jalannya suatu organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan organisasi, yang dapat bermanfaat untuk bahan penelitian, pengambilan keputusan, atau penyusunan program pengembangan dari organisasi yang bersangkutan.

---

<sup>23</sup> Ana pujiastuti, *Lembaga Kearsipan: Upaya Pengelolaan Arsip Secara Kolektif di Perguruan Tinggi*, [https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#q=lembaga+kearsipan:+upaya+pengelolaan+arsip+secara+kolektif](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#q=lembaga+kearsipan:+upaya+pengelolaan+arsip+secara+kolektif) f hlm.3, diakses 28 Januari 2017 pukul 15:30

<sup>24</sup> *ibid*, hlm.4

Arsip pada dasarnya dapat berupa catatan tertulis, gambar, atau rekaman yang memuat sesuatu hal atau yang digunakan orang sebagai pengingat. Menurut Ensiklopedia Administrasi (2012: 65) arsip mempunyai 4 kegunaan yaitu:

1) Guna Informasi

Kegunaan informasi, berarti arsip yang disimpan merupakan bank data yang dapat dijadikan rujukan pencarian informasi atau sumber ingatan apabila diperlukan. Bentuk-bentuk arsip yang mempunyai kegunaan informasi dapat ditemui pada pengumuman, pemberitahuan, undangan dan sebagainya.

2) Guna Yuridis

Kegunaan yuridis, berarti arsip yang dimiliki oleh suatu kantor atau organisasi memiliki fungsi sebagai legalitas atau bukti-bukti tertentu apabila diperlukan. Contoh dari arsip yang mempunyai kegunaan yuridis dapat ditemui pada berkas tentang ketentuan organisasi, Surat Keputusan, Standar Operasional Prosedur, uraian tugas karyawan, akta pendirian perusahaan, akta perjanjian, surat kuasa, putusan peradilan, dll.

3) Guna Sejarah

Kegunaan sejarah, berarti arsip akan dapat merekam informasi masa lalu dan menyediakan informasi untuk masa yang akan datang. Bentuk-bentuk arsip yang bernilai sejarah dapat ditemui dalam berkas laporan tahunan, notulen rapat, gambar, foto atau peristiwa dan berkas dokumen sejarah pendirian dan perkembangan institusi.

4) Guna Ilmiah

Kegunaan ilmiah, artinya arsip juga sebagai penyedia informasi untuk orang lain yang membutuhkan sebagai bahan pengetahuan. Contoh dari arsip yang mempunyai kegunaan ilmiah dapat ditemui pada berkas hasil penelitian tertentu dan kajian ilmiah ilmu pengetahuan dari tiap-tiap fakultas, selain itu bukti lainnya dapat ditemui pada hasil karya akhir seperti skripsi, tesis serta disertasi dari mahasiswa.

Selanjutnya, jika berbicara masalah manajemen mengelola arsip, kita tidak bisa terlepas dari asas-asas mendasar dari ilmu manajemen itu sendiri. Pada dasarnya asas dari ilmu manajemen terdiri dari 4 hal,<sup>25</sup> yakni: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Penggerakkan) dan *Controlling* (Pengawasan).

---

<sup>25</sup> George R.Terry, *Asas-Asas Manajemen, Terjemahan Winardi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1979

## **Perencanaan Kearsipan**

Dalam ilmu manajemen, perencanaan adalah fungsi pertama yang harus dilakukan sebelum memulai kegiatan secara keseluruhan. Jika dikaitkan dengan kearsipan, fungsi ini merumuskan tujuan yang ingin dicapai, kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, termasuk prosedur dan metode kerjanya, personil pengelola beserta persyaratan dan kualifikasi serta barang-barang baik bahan maupun peralatan termasuk dana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan kearsipan.<sup>26</sup>

George R. Terry (Winardi, 1979 : 175) mengklasifikasikan perencanaan terdiri dari perencanaan strategik, perencanaan taktis, dan perencanaan khusus/operasional. Perencanaan strategik menjadi tanggungjawab manajer puncak/atas. Oleh karena itu di perguruan tinggi, rektor universitas atau institut, ketua sekolah tinggi, dan direktur politeknik ataupun akademi harus menentukan rencana strategik kearsipan yang berlaku bagi perguruan tingginya. Pada tingkat menengah, ketua lembaga kearsipan dibantu oleh para arsiparis dan para kepala unit kearsipan merumuskan kebijakan sistem pengelolaan arsip statis dan inaktif, serta pembinaan bagi unit kearsipan di setiap unit kerja perguruan tinggi termasuk pembinaan bagi sumberdaya manusia yang bekerja di bidang kearsipan. Di tingkat bawah, kepala unit kearsipan di setiap unit kerja langsung melakukan perencanaan kerja operasional atau kerja teknis berkenaan dengan penciptaan, pendistribusian, penggunaan, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip.<sup>27</sup>

Dalam perencanaan ini dilakukan penyusunan pedoman penciptaan arsip, prosedur pendistribusian, prosedur pengaksesan, pedoman pemeliharaan, prosedur dan metode penyimpanan, dan prosedur penyusutan arsip. Di samping itu disusun daftar klasifikasi arsip, dan jadwal retensi arsip. Untuk penyusunan jadwal retensi arsip, perguruan tinggi dapat menggunakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 145/U/2004 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan dan Kepegawaian; atau

---

<sup>26</sup> Yohanes Suraja, *Pengembangan Manajemen Kearsipan Perguruan Tinggi*, Dalam <http://yohannes-suraja.blogspot.co.id/2012/09/kearsipan-perguruan-tinggi.html>, diakses 30 Januari 2017, pukul 10:29

WIB

<sup>27</sup> *ibid*, hlm.2

menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta. Jadwal retensi tersebut berguna untuk menentukan pelaksanaan pemindahan arsip dari tempat penyimpanan arsip aktif ke tempat penyimpanan inaktif, dan menentukan nilai guna arsip untuk memutuskan apakah arsip harus disimpan selamanya sebagai arsip abadi atau arsip statis, atau dimusnahkan. Kedua peraturan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar klasifikasi arsip, karena di dalamnya telah termuat uraian tentang jenis arsip yang rinci.

Jenis arsip keuangan misalnya terdiri dari rencana anggaran pendapatan dan belanja, penyusunan anggaran, belanja, bantuan/pinjaman luar negeri, pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja/dana pinjaman/hibah luar negeri, implementasi sistem akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan, beserta rinciannya masing-masing. Jenis arsip kepegawaian meliputi formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan pegawai, pembinaan karir pegawai, penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai, mutasi pegawai, administrasi pegawai, kesejahteraan pegawai, proses pemberhentian pegawai/pensiun, keputusan pemberhentian pegawai/pensiun, perselisihan/sengketa kepegawaian, pemberian tanda jasa/penghargaan, data kepegawaian, dokumentasi kepegawaian, dan berkas perorangan pegawai.

Jenis arsip substantif perguruan tinggi yaitu tentang perkuliahan/penyelenggaraan pendidikan, kemahasiswaan, sarana dan prasarana pendidikan, ijazah dan transkrip, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, alumni, tenaga pengajar, data dan statistik, program studi. Hal tersebut tentu saja dilengkapi dengan rinciannya masing-masing (submasalah dan sub-submasalah). Sedangkan jenis arsip fasilitatif terdiri dari bidang hukum, kerjasama, hubungan masyarakat, perencanaan, perlengkapan, ketatausahaan, informatika, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pengawasan yang masing-masing beserta rinciannya juga (submasalah dan sub-submasalah).

Daftar klasifikasi arsip juga perlu dibuat karena selalu digunakan dalam manajemen kearsipan atau dalam pelaksanaan penciptaan, pendistribusian, penggunaan atau akses, pemeliharaan, penyimpanan, dan penyusutan arsip. Misalnya ketika menciptakan dokumen, pengelola arsip/arsiparis akan menentukan nama/sebutan

perihalnya (permasalahan pokok, permasalahan, submasalah), ketika mencatat pendistribusian baik pengiriman maupun penerimaan dokumen arsiparis juga harus menentukan perihal dokumen, kode dan hal lain yang perlu dicatat.

### **Pengorganisasian Arsip**

Didalam pengorganisasian arsip harus diperhatikan pengaturan arsip dan penanggung jawabannya dengan jelas, agar pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan penyimpanan arsip dapat dilakukan dengan tertib. Menurut Basir Barthos (2003: 25) ada beberapa metode pengorganisasian arsip dalam kantor yang biasa dipakai, yaitu:

#### **1. Sentralisasi**

Sentralisasi adalah sistem pengelolaan arsip yang dilakukan secara terpusat dalam suatu organisasi, dengan kata lain penyimpanan arsip dipusatkan di suatu unit kerja khusus yang lazim disebut sentral arsip. Dengan sentralisasi arsip maka semua surat-surat kantor yang sudah selesai diproses akan disimpan di sentral arsip. Sistem ini lebih menguntungkan bila diterapkan pada organisasi yang relatif kecil.

Keuntungan dari sentralisasi arsip ini adalah:

- a. Ruang atau tempat penyimpanan, tenaga dan peralatan arsip dapat dihemat.
- b. Tidak ada duplikasi arsip, karena kantor hanya menyimpan satu arsip
- c. Sistem penyimpanan dari berbagai arsip dapat diseragamkan.

Kerugian dari sentralisasi Arsip adalah:

- a. Tidak semua jenis arsip dapat disimpan dengan satu sistem penyimpanan yang sama.
- b. Unit kerja yang memerlukan arsip akan memakan waktu lebih lama untuk memperoleh arsip yang diperlukan.

#### **2. Desentralisasi**

Desentralisasi adalah pengelolaan dan penyimpanan arsip yang dilakukan pada setiap unit kerja dalam suatu unit organisasi, dengan kata lain semua unit kerja mengelola dan menyimpan arsipnya masing-masing.

Keuntungan dari desentralisasi arsip ini adalah:

- a. Keperluan akan arsip mudah terpenuhi, karena berada dalam unit kerja sendiri.
- b. Penanganan arsip lebih mudah dilakukan, karena arsipnya sudah dikenal baik.

Kerugian dari desentralisasi adalah:



- a. Penyimpanan arsip tersebar diberbagai lokasi dan dapat menimbulkan duplikasi arsip yang disimpan.
  - b. Kantor harus menyediakan peralatan dan perlengkapan arsip di setiap unit kerja, sehingga penghematan pemakaian peralatan dan perlengkapan sukar dijalankan.
3. Kombinasi sentralisasi dan desentralisasi

Untuk mengatasi kelemahan dari sentralisasi dan desentralisasi maka digunakan kombinasai dari dua cara tersebut, didalam penanganan arsip secara kombinasi, arsip yang masih aktif dipergunakan atau disebut arsip aktif dikelola di unit kerja masing-masing pengolah dan arsip yang kurang digunakan atau arsip in-aktif dikelola disentral arsip. Dengan demikian, penyimpanan arsip aktif dikelola secara desentralisasi dan arsip in-aktif dilakukan secara sentralisasi.

Terkait dengan ketentuan pengelolaan arsip khususnya yang berkenaan dengan pengorganisasian dan pembagian kerja di institusi perguruan tinggi, dalam Undang-Undang Kearsipan tercantum pada pasal 9. Pengelolaan arsip dilakukan terhadap arsip dinamis dan arsip statis (ayat 1). Pengelolaan arsip dinamis terdiri arsip vital, arsip aktif; dan arsip inaktif (ayat 2). Pengelolaan arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip (ayat 3). Dan pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab lembaga kearsipan (ayat 4).

Pencipta arsip/unit kearsipan di setiap unit kerja perguruan tinggi seperti di fakultas, lembaga penelitian, dan lembaga pengabdian masyarakat melakukan pengelolaan arsip dinamis. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan terhadap arsip vital, arsip aktif, dan arsip inaktif. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantung apabila rusak atau hilang. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengelolaan arsip dinamis dilakukan melalui kegiatan-kegiatan: penciptaan, penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan arsip (pasal 40 ayat 2). Lembaga arsip perguruan tinggi mempunyai fungsi utama mengelola arsip statis yang tercipta atau diterima oleh perguruan tinggi. Pada pasal 59 dinyatakan bahwa pengelolaan arsip statis dilaksanakan untuk menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (ayat 1). Pengelolaan arsip statis meliputi: akuisisi arsip statis; pengolahan

arsip statis; preservasi arsip statis; dan akses arsip statis (ayat 2). Fungsi inilah yang menjadi tanggungjawab lembaga arsip perguruan tinggi.

### **Penggerakan Pelaksanaan Pekerjaan**

Pengembangan manajemen arsip perguruan tinggi tidak cukup dilakukan dengan perencanaan dan pengorganisasian saja. Memang diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, tetapi tidak akan ada output konkrit yang dihasilkan tanpa implementasi aktivitas-aktivitas yang diusahakan. Untuk maksud itu diperlukan tindakan penggerakan (actuating) atau usaha untuk menimbulkan tindakan (action).<sup>28</sup> Penggerakan adalah usaha untuk menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran (tujuan) oleh karena para anggota itu ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.<sup>29</sup>

Dalam melakukan penggerakan ini, berbagai kemungkinan fungsi dilakukan oleh kepala lembaga arsip/kepala unit kearsipan kepada para pegawainya, yaitu fungsi pengarahan, kepemimpinan, komunikasi, dan pemberian motivasi. Dengan pengarahan, kepada para pegawai diterangkan dan ditunjukkan berbagai pekerjaan kearsipan dan arah tujuan yang hendak diwujudkan melalui pekerjaan dan tugas-tugas. Pada fungsi kepemimpinan, para pegawai dipengaruhi, didekati, dibimbing, dibantu, dan dibina sehingga terdorong/tergugah untuk bekerja melakukan berbagai tugas kearsipan. Dengan berkomunikasi, pegawai menerima ide-ide, menerima saran-saran, dan informasi sehingga terjadi persepsi dan pemahaman yang sama antara pimpinan dan pegawai. Pada fungsi memotivasi, para anggota dipenuhi kebutuhannya, dihargai prestasi kerjanya, atau mungkin pula diberi sanksi bila melakukan pelanggaran disiplin kerja.

Apabila menggunakan istilah yang digunakan di dalam UU Nomor 43 Tahun 2009, penggerakan itu dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan, pengembangan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Pembinaan dilaksanakan oleh lembaga kearsipan perguruan tinggi terhadap satuan kerja dan civitas akademika di lingkungan perguruan tinggi (Pasal 8 ayat 4). Pengembangan sumber daya manusia terdiri atas

---

<sup>28</sup> Yohanes Suraja, *Op.cit.*, hlm 3

<sup>29</sup> George R.Terry, *Op cit.*hlm.297

arsiparis dan sumber daya manusia yang lain sehingga memiliki kompetensi dan profesionalitas di bidang kearsipan. Pengembangan sarana prasarana kearsipan dilakukan dengan mengatur standar kualitas dan spesifikasi (Pasal 31). Pencipta arsip dan lembaga kearsipan menyediakan sarana prasarana kearsipan sesuai dengan standar kearsipan untuk pengelolaan arsip, dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Pasal 32).

Dalam bagian penggerakkan, mulai diperkenalkan proses pengaturan dan metode penyimpanan arsip secara sistematis. Prosedur penyimpanan arsip atau yang biasa disebut dengan sistem *filling* adalah proses pengaturan dan penyimpanan berkas-berkas secara sistematis, sehingga berkas arsip tersebut dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali setiap kali diperlukan. Menurut Sedarmayanti (2008:94) ada 5 (lima) dasar sistem bagi penyelenggaraan *filling* yang dapat dipergunakan, yaitu:

#### 1) Sistem Abjad

Yaitu menyusun subyek arsip dari urutan A sampai Z. Untuk dapat menyusunnya itu maka nama-nama atau kata-kata dibagi menjadi 4 golongan yaitu nama perorangan, nama perusahaan, nama instansi pemerintah dan nama organisasi sosial atau perhimpunan-perhimpunan.

#### 2) Sistem Subyek

Jika hendak melaksanakan sistem subyek ini, maka seorang pengelola arsip harus menentukan lebih dahulu masalah-masalah apa yang pada umumnya dipermasalahkan dalam surat-surat setiap harinya, umpamanya masalah-masalah dibawah "kepegawaian", masalah-masalah yang berkenaan dengan keuangan dikelompokkan menjadi satu masalah pokok (subyek) dibawah "keuangan", dan seterusnya.

#### 3) Sistem Geografis

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi dimana sistem geografis dapat dipergunakan, biasanya adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi daerah-daerah wilayah lebih dari satu tempat.

#### 4) Sistem Nomor

Sistem nomor ini biasa dipergunakan oleh organisasi-organisasi yang bergerak dibidang profesional tertentu, misalnya kantor Akuntan, Kantor pengacara, Kantor Kontraktor, dan sebagainya.

## 5) Sistem Kronologis

Sistem ini dipergunakan untuk *filling* berkas-berkas yang disusun menurut urutan tanggal dari datangnya surat atau berkas-berkas itu.

## Pengawasan Kearsipan

Pengawasan (*controlling*) adalah memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan dan prestasi kerja dan apabila diperlukan dapat menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana. Pengawasan yang efektif membantu usaha-usaha untuk mengatur pekerjaan yang direncanakan guna memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut berlangsung sesuai dengan rencana.<sup>30</sup> Untuk pengembangan manajemen kearsipan perguruan tinggi, fungsi pengawasan itu juga perlu dilakukan. Fungsi ini dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni:

1. Setiap pegawai mengendalikan, melihat dan menilai pelaksanaan kerjanya sendiri. Pimpinan perlu memberikan dorongan kepada anak buahnya untuk bersikap seperti itu.
2. Pengawasan dapat dilakukan pimpinan atau kepala lembaga/unit kearsipan kepada para pegawainya dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini pimpinan mengawasi pelaksanaan dan prestasi kerja anak buahnya.
3. Pengawasan atau monitoring dan evaluasi (*monev*) dilakukan oleh tim tenaga pengawas yang dikoordinir oleh kepala pusat jaminan mutu masing-masing perguruan tinggi. Tim *monev* ini melakukan pengawasan fungsional karena secara khusus ditugaskan untuk itu.

Pengawasan dapat dilakukan sebelum, pada saat bersamaan, dan/atau sesudah pelaksanaan pekerjaan.<sup>31</sup> Tipe pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pekerjaan dan pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan merupakan jenis pengawasan yang sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan manajemen kearsipan, karena kedua tipe pengawasan ini memungkinkan manajemen membuat tindakan koreksi dan tetap dapat mencapai tujuan

---

<sup>30</sup> George R. Terry, *Op cit.* hlm. 379-380

<sup>31</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE, 2012, hlm. 361

pengelolaan arsip baik pengelolaan arsip dinamis maupun pengelolaan arsip statis perguruan tinggi.

Demikianlah fungsi-fungsi manajemen yang dapat diterapkan untuk mengembangkan manajemen kearsipan perguruan tinggi. Berdasarkan pengalaman kemajuan dan perkembangan yang dialami oleh berbagai organisasi yang disebabkan kompetensi manajemen dari jajaran pimpinannya, maka perguruan tinggi juga bisa berharap bahwa pembangunan, kemajuan, dan pengembangan kinerja lembaga dan unit kearsipannya akan dapat dicapai akibat dari penerapan fungsi-fungsi manajemen secara profesional/kompeten di perguruan tinggi termasuk di lembaga dan unit kearsipan oleh para pimpinannya.

### **Penyusutan dan Pemusnahan Arsip**

Selama institusi perguruan tinggi menjalankan aktifitasnya, banyak arsip yang tercipta. Beberapa bagian arsip harus ada yang dimusnahkan. Berbagai macam kegunaan arsip sangat berkaitan dengan seberapa lama arsip tersebut disimpan. Arsip tidak selamanya harus disimpan, tetapi pada suatu periode tertentu arsip perlu disusutkan. Arsip perlu disimpan dan sebagian besar perlu dihapus dari tempat penyimpanannya.<sup>32</sup> Jenis Arsip yang timbul karena kegiatan suatu organisasi perguruan tinggi, berdasarkan golongannya, perlu disimpan dalam waktu tertentu sesuai dengan pedoman Jadwal Retensi Arsip.<sup>33</sup>

Menurut Sedarmayanti (2008:128) tujuan penyusutan arsip adalah untuk:

- a. Mendayagunakan arsip dinamis sebagai berkas kerja maupun sebagai referensi
- b. Menghemat ruangan, peralatan dan perlengkapan
- c. Mempercepat penemuan kembali arsip
- d. Menyelamatkan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah.

Arsip yang telah dipindahkan, tidak semua akan disimpan selamanya. Ada beberapa jenis arsip yang dapat dimusnakan setelah jangka waktu tertentu, misalnya sebagai berikut:

---

<sup>32</sup> Sedarmayanti, *Tugas dan Pengembangan Sekretaris*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm 32

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

- a) Arsip-arsip yang tidak penting, misalnya: surat pengumuman/pemberitahuan, undangan rapat rutin, memo intern dan sebagainya.
- b) Arsip-arsip yang membantu, seperti, surat pemberitahuan bank, korespondensi rutin dengan pemasok, bukti pembayaran tertentu, dan sebagainya.

### **Arsip Elektronik**

Seiring perkembangan waktu, arsip yang semula berupa rekaman, catatan, foto dan segala sesuatu yang berbentuk fisik (*hardfile*) lambat laun akan termakan usia dan semakin lama menjadi kusam dan usang. Untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dilakukan alih media arsip menjadi arsip elektronik dengan cara digitalisasi arsip menjadi bentuk *softfile*. Informasi yang direkam, diproses dan disimpan secara elektronik itulah yang dinamakan sebagai arsip elektronik.<sup>34</sup> Pada saat ini arsip elektronik sudah menjadi salah satu bagian penting dalam lingkungan pekerjaan yang bergantung pada teknologi informasi berbasis komputer.

Evolusi yang cepat dalam teknologi komputer dan juga pada sistem informasi telah melahirkan isu mengenai manajemen arsip elektronik. Beberapa perubahan harus diperhatikan dalam bidang kearsipan mulai dari penciptaan, penggunaan, penilaian dan pemeliharaan. Termasuk, pengkajian kembali peranan arsiparis dan institusi kearsipan yang ikut ambil bagian pada fase evolusi teknologi informasi ini. Ada empat prinsip dalam kerangka pelaksanaan manajemen arsip elektronik,<sup>35</sup> yaitu:

1. Arsip elektronik harus masuk dalam daur hidup sistem elektronik yang menciptakan arsip untuk menjamin penciptaan dan retensi arsip elektronik yang otentik, terpercaya dan terpelihara.
2. Harus ada jaminan bahwa penciptanya menciptakan arsip yang otentik, terpercaya dan terpelihara.
3. Adanya proses penilaian arsip elektronik
4. Kebutuhan akan pemeliharaan dan akses untuk menjamin arsip elektronik dapat tersedia, dapat diakses dan dimengerti.

---

<sup>34</sup> Tim Penulis Modul Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil, *Modul Pengantar Kearsipan*, Bogor, 2012, hlm.35

<sup>35</sup> *ibid*, hlm.36

Berbagai isu legalitas hukum muncul bersamaan dengan meluasnya penggunaan elektronik untuk merekam informasi, seperti misalnya pengakuan keabsahan dalam perspektif hukum pembuktian dan pengaturan untuk mengakses informasi yang berasal dari arsip. Informasi dan transaksi elektronik sebenarnya telah memiliki landasan hukum dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Digital signature* menjadi isu yang terus dikembangkan karena sampai saat ini arsip digital belum sepenuhnya diakui sebagai alat bukti yang sah dalam sebuah proses peradilan di Indonesia. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Hal ini yang menjadi pertentangan walaupun pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Diperlukan sebuah aturan yang jelas dari seluruh pemangku kebijakan pada perguruan tinggi tentang bagaimana sebuah arsip khususnya arsip digital dikategorikan sebagai alat bukti sah.

## **Kesimpulan**

Tridharma Perguruan Tinggi merupakan salah satu dasar tanggung jawab institusi pendidikan tinggi kepada mahasiswa dan masyarakat yang harus dikembangkan secara simultan dan bersama-sama. Suatu lembaga kearsipan perguruan tinggi dibentuk dengan harapan bahwa ia akan dapat mengelola arsip institusi tersebut dan memberi kontribusi kepada mahasiswa dan masyarakat. Pengelolaan arsip pada perguruan tinggi sangat dibutuhkan karena dapat menjaga memori kolektif institusi dan menjamin terjaganya sumber informasi dan bidang ilmu hasil pengkajian dan penelitian. Sudah menjadi kebutuhan untuk menyelamatkan arsip di perguruan tinggi dengan cara mengatur manajemen pengelolaan arsip secara kolektif agar setiap aktivitas yang ada di perguruan tinggi dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan perkembangan waktu, arsip semakin lama semakin bertambah. Arsip yang bertambah itu tidak selamanya harus disimpan, tetapi pada suatu periode tertentu harus disusutkan. Sementara yang lain disusutkan, beberapa bagian yang lain akan menjadi arsip terjaga. Arsip terjaga yang berupa rekaman, catatan, foto dan segala

sesuatu yang berbentuk fisik (*hardfile*) lambat laun akan termakan usia dan semakin lama menjadi kusam dan usang. Untuk menghindari hal-hal tersebut, perlu dilakukan alih media arsip menjadi arsip elektronik dengan cara digitalisasi arsip menjadi bentuk *softfile*. Hal ini menjadi salah satu jawaban akan pentingnya lembaga arsip perguruan tinggi melakukan manajemen pengelolaan arsip yang bernilai guna, baik arsip akademik, penelitian, maupun arsip lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsip Nasional Republik Indonesia-Tim Penulis Modul Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil. 2012. *Modul Manajemen Layanan Informasi*
- Arsip Nasional Republik Indonesia-Tim Penulis Modul Diklat Pengangkatan Arsiparis Tingkat Terampil. 2012. *Modul Pengantar Kearsipan*
- Barthos, Basir. 2005. *Manajemen Kearsipan: Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Damalita, Susiasih. *Pentingnya Manajemen Arsip di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (EMAS) FE Unimas Mojokerto. 2009. Vol.3 No. 1 Desember 2009
- Effendhie, Machmoed. *Program University Archives UGM: Desain, Implementasi, Tantangan Sekarang & Mendatang*. Diakses tanggal 31 Januari 2017, [https://www.academia.edu/30977977/Program\\_University\\_Archives\\_UGM\\_Desain\\_Implementasi\\_Tantangan\\_Sekarang\\_dan\\_Mendatang](https://www.academia.edu/30977977/Program_University_Archives_UGM_Desain_Implementasi_Tantangan_Sekarang_dan_Mendatang).
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta: BPFE
- Lolytasari, *Memahami Manajemen Arsip Perguruan Tinggi*, Jurnal Palimpsest Universitas Airlangga.2014.Vol.5/No.1/ Published: 2014-08, TOC: 1 and page: 1-13, Diakses 27 Januari 2017, <http://www.journal.unair.ac.id/>
- Pujiastuti, Ana. *Lembaga Kearsipan: Upaya Pengelolaan Arsip Secara Kolektif di Perguruan Tinggi*. Diakses tanggal 28 Januari 2017.[https://www.google.co.id/?gws\\_rd=ssl#qlembaga+kearsipan:+upaya+pengelolaan+arsip+secara+kolektif](https://www.google.co.id/?gws_rd=ssl#qlembaga+kearsipan:+upaya+pengelolaan+arsip+secara+kolektif)
- Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*



Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*

Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan  
Tinggi*

Sedarmayanti. 2008. *Tugas dan Pengembangan Sekretaris*, Bandung: Mandar Maju

Suraja, Yohanes. 2012. *Pengembangan Manajemen Kearsipan Perguruan Tinggi*.

diakses 30 Januari 2017. <http://yohannes->

[suraja.blogspot.co.id/2012/09/kearsipan-perguruan-tinggi.html](http://suraja.blogspot.co.id/2012/09/kearsipan-perguruan-tinggi.html)

Terry, George R. 1979. *Asas-Asas Manajemen, Terjemahan Winardi*, Penerbit Alumni:

Bandung

**PERENCANAAN APLIKASI REMINDER DOSEN BERBASIS WEB  
Studi Kasus: Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Teknik  
Universitas Krisnadwipayana**

Ali Khumaidi  
Program Studi Teknik Informatika, Universitas Krisnadwipayana  
mr.khumaidi@yahoo.com

***Abstract***

Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana adalah salah satu fakultas yang menyadari pentingnya kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk memenuhi kewajiban dosen yang sesuai pada Tri Dharma perguruan tinggi. Pada saat ini hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dosen tetap fakultas teknik, dipandang kurang memenuhi target oleh unit P2M FT Unkris (Penelitian dan Pengabdian masyarakat). Oleh karena itu unit P2M mendorong dan menciptakan suasana yang mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, salah satunya dengan aplikasi reminder sehingga dosen mendapatkan informasi bahwa sudah waktunya memulai membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk kegiatan tersebut pada tiap semester. Fitur pada aplikasi reminder dosen pada kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi master data dosen, data penelitian dan data pengabdian masyarakat yang telah dilakukan. Forum diskusi dan chat untuk melakukan perencanaan kegiatan dan kolaborasi antar disiplin ilmu pada 7 program studi sarjana dan program magister. Data disajikan sedetil mungkin termasuk panduan proposal, panduan penulisan, dokumentasi kegiatan, evaluasi kegiatan yang meliputi kendala dan trik khusus dalam suksesnya kegiatan. Penentuan reminder berdasarkan beban kerja dosen dan batas waktu dari kebijakan pimpinan fakultas. Aplikasi ini dikembangkan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, database MySQL dan apache sebagai web server. Pemodelan sistem menggunakan UML (Unified Modelling Language).

***Keywords- Aplikasi, P2M FT Unkris, Reminder, UML, Web***

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa[1].

Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana memiliki 7 program studi sarjana dan 1 program magister, dengan sebaran jumlah dosen tetap yang cukup banyak dan disiplin keilmuan yang berbeda. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada fakultas teknik dikelola dan dikoordinasi oleh unit P2M (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Hasil evaluasi unit P2M pada akhir tahun 2016 bahwa jumlah penelitian dan pengabdian masyarakat masih di bawah target, yaitu masih cukup banyak dosen yang tidak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat selama 2 tahun. Hasil evaluasi unit P2M meyebutkan bahwa alasan tidak melaksanakan kegiatan tersebut dikarenakan unsur lupa, tidak adanya pengumuman, media diskusi dan kesibukan mengajar.

Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi manusia. Dengan memanfaatkan teknologi sudah banyak aplikasi reminder atau pengingat yang dapat mendukung aktivitas manusia. Misalnya, aplikasi pengingat yang terdapat pada telepon genggam yang dapat memberikan pengingat berupa bunyi [2], evernote sebagai catatan digital yang terdapat fitur voice, to do reminder merupakan aplikasi reminder yang menggabungkan ke media social [3]. Kehadiran reminder tersebut sebagai peringatan kepada yang bersangkutan agar dapat menghindari atau meminimalkan akibat yang ditimbulkan jika terjadi lupa atau terlewat.

Pada fakultas teknik memiliki 5 jurnal ilmiah, kesepakatan kerjasama dengan desa binaan dan kerjasama dengan beberapa kampus terkait penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat. Namun dikarenakan informasi dan pengumuman yang tidak sampai secara tepat kepada dosen maka media yang sudah dibangun dan disiapkan oleh fakultas tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu untuk mendukung program kerja unit P2M pada penelitian ini, penulis melakukan perancangan aplikasi reminder dosen yang dapat memberitahu dosen agar mulai melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tiap semester.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil sebagai berikut:

- a) Bagaimana merancang aplikasi reminder berbasis web?
- b) Bagaimana memodelkan aplikasi reminder dengan pendekatan berorientasi objek?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan mencapai tujuan berikut:

- a) Aplikasi reminder dosen dapat memberikan informasi kewajiban dosen dan memudahkan dalam melakukan pencapaian kewajiban tersebut.
- b) Aplikasi dibangun sesuai dengan rancangan dan pemodelan sistem sehingga implementasi tercapai dengan baik.

## **1.4. Metodologi Penelitian**

Metode pengembangan menggunakan GRAPPLE (Guidelines for Rappid Application Engineering) dengan tujuan dapat menghasilkan sistem berorientasi objek dalam waktu yang singkat tanpa mengurangi kualitas sistem yang dibangun. GRAPPLE adalah sebuah pemodelan pada aksi-aksi yang dilakukan sejumlah segmen, setiap segmen akan menghasilkan produk kerja dengan bentuk yang berorientasi objek [4]. Segmen-segmen yang digunakan dalam GRAPPLE mencakup analisis kebutuhan system, pengembangan model dan diagram, pembuatan code, hingga tahap instalasi dan evaluasi. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a) Requirement Gathering, mendefinisikan kebutuhan user terhadap sistem yang akan dibangun.

- b) Analysis, merupakan bentuk transisi dari informasi dasar dalam bentuk model dan diagram.
- c) Design, merupakan tahap merancang tampilan sistem dari perancangan dari model dan diagram yang telah dianalisis
- d) Development, merupakan tahap pembuatan sistem dan penerapan model dan diagram yang telah terbentuk.
- e) Deployment, merupakan tahap akhir yang dilakukan, sistem yang terbentuk akan diintegrasikan dengan hardware maupun dengan sistem operasi yang digunakan.

Pada perancangan aplikasi reminder dosen, penulis melakukan tahap requirement gathering, analysis dan desain. Untuk tahap development dan deployment akan dilanjutkan pada implementasi dan pengembangan sistem. Oleh karena itu pengujian dilakukan dengan mengambil sampel dari dosen dan unit P2M dengan kuesioner dan wawancara.

## **LANDASAN TEORI**

### **2.1. Penelitian Terkait**

Untuk mewujudkan aplikasi yang baik, maka penulis mempelajari beberapa literatur dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan aplikasi reminder, diantaranya:

- a) Aplikasi *Scheduler* dan *Reminder* Berbasis Web untuk Kelompok Profesional. (Studi Kasus di PT. Sarana Permata Container Semarang) oleh Novrido Charibaldi dan Denyu Budi pada tahun 2010.
- b) Rancang bangun Aplikasi e-Reminder Services untuk kegiatan dosen. (Studi Kasus Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA RIAU ) oleh Aang Febriyus pada tahun 2013.
- c) Pemodelan Aplikasi Mobile Reminder berbasis Android. Oleh Kosidin dan Reza Nur Farizah pada tahun 2016.

### **2.2. Aplikasi**

Aplikasi merupakan suatu subteks perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan satu tugas yang diinginkan pengguna (wikipedia.org).

Sedangkan pengertian aplikasi menurut para ahli mendefinisikan aplikasi seperti yang di kemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya adalah [6] :

- a) Menurut Pranama (2012) aplikasi adalah satu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti system perniagaan, game, pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hamper dilakukan manusia.
- b) Menurut Verman dkk (2009) aplikasi adalah perangkat intruksi khusus dalam computer yang di rancang agar kita menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
- c) Menurut Yuhefizar (2012) aplikasi merupakan program yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam menjalankan pekerjaan tertentu. Jadi aplikasi merupakan sebuah program yang dibuat dalam sebuah perangkat lunak dengan computer untuk memudahkan pekerjaan atau tugas-tugas seperti penerapan, penggunaan dan penambahan data yang dibutuhkan.

### **2.3. Reminder**

Pengertian reminder / pengingat bisa dikatakan sebagai aplikasi yang berfungsi untuk memberi tahu pada hari/waktu itu ada sebuah kegiatan atau hal yang harus dilakukan. Reminder biasanya berkaitan erat dengan alarm dan janji. Alarm pada umumnya untuk memberi peringatan kepada pengguna bahwa ada suatu kegiatan pada waktu yang telah ditentukan sebelum alarm itu berbunyi. Biasanya sebelum mengatur pengingat menggunakan reminder, dirancang dulu sebuah jadwal. Pengertian jadwal menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pembagian waktu berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja, daftar atau sistem kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci. Sedangkan pengertian penjadwalan adalah proses, cara, perbuatan menjadwalkan atau memasukkan ke dalam jadwal. Cara kerja sistem reminder adalah server selalu mencocokkan jam yang sudah disimpan di database dengan jam pada sistem operasi server[7].

Sistem peringatan dini digunakan sebisa mungkin untuk mencegah suatu hal buruk yang akan terjadi dengan memberikan peringatan sedini mungkin kepada yang bersangkutan agar bisa menghindari atau meminimalkan akibat yang akan ditimbulkan. Definisi lain yaitu sistem yang mudah digunakan dan dirancang untuk membantu mengidentifikasi atau mengenali perkembangan community yang tidak menguntungkan dan mengelola resiko organisasi.

## 2.4. Pemodelan Sistem

Pemodelan sering digunakan dalam memodelkan sebuah sistem yang akan dibangun, dan yang paling terkenal dalam memodelkan sistem adalah pemodelan berorientasi objek dengan menggunakan alat bantu UML (Unified Modeling Language). UML singkatan dari Unified Modelling Language adalah bahasa pemodelan standar yang memiliki sintaks dan semantik. Ketika kita membuat model menggunakan konsep UML ada aturan-aturan yang harus diikuti. Bagaimana elemen pada model-model yang kita buat berhubungan satu dengan lainnya harus mengikuti standar yang ada. UML bukan hanya sekedar diagram, tetapi juga menceritakan konteksnya [8].

UML adalah sebuah bahasa yang berdasarkan grafik/gambar untuk memvisualisasi, menspesifikasikan, membangun, dan pendokumentasian dari sebuah sistem pengembangan software berbasis OO (Object-Oriented). UML merupakan model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object oriented. Pemecahan masalah utama dari Object Oriented biasanya dengan penggambaran dalam bentuk model. Model abstrak (semu) merupakan gambaran detail dari inti masalah yang ada, umumnya sama seperti refleksi dari problem yang ada pada kenyataan. UML terdiri atas beberapa diagram: Diagram Use Case, Diagram Class, Diagram Package, Diagram Sequence, Diagram Collaboration, Diagram StateChart, Diagram Activity, dan Diagram Deployment.

### a. Use Case Diagram

Diagram ini menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah "apa" yang diperbuat sistem, dan bukan "bagaimana". Sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Use case merupakan sebuah pekerjaan tertentu, misalnya login ke sistem, meng-create sebuah daftar belanja, dan sebagainya. Seorang/sebuah aktor adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Use case diagram dapat sangat membantu bila kita sedang menyusun requirement sebuah sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test case untuk semua feature yang ada pada sistem.

### b. Class Diagram

Diagram *class* merupakan kumpulan kelas-kelas objek. Kelas sebagai suatu definisi sumber daya yang termasuk didalamnya informasi-informasi yang

menggambarkan fitur suatu entitas dan bagaimana penggunaannya. Sedangkan objek adalah entitas yang bersifat unik yang mengikuti aturan-aturan yang sudah didefinisikan dalam kelasnya. Dalam terminologi perangkat lunak, kode program ditulis sebagai kumpulan kelas-kelas yang mengacu pada perilaku yang telah didefinisikan dalam kelas. Dalam database, objek dinyatakan berupa sebuah baris yang tersimpan dalam file yang berada dalam memori komputer. Jadi diagram *class* menggambarkan "fisik" sistem yang akan dibuat [8]. Sebuah kelas digambarkan sebagai sebuah kotak yang terbagi atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari kelas. Bagian tengah mendefinisikan atribut kelas. Bagian akhir mendefinisikan operasi-operasi dari sebuah kelas.

#### c. Activity Diagram

Activity diagrams menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa eksekusi. Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum.

#### d. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respons dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Pada diagram ini, dimensi vertikal merepresentasikan waktu. Bagian paling atas dari diagram menjadi titik awal dan waktu berjalan ke bawah sampai dengan bagian dasar dari diagram. Garis vertikal disebut lifeline, dilekatkan pada setiap obyek atau aktor. Kemudian lifeline tersebut digambarkan menjadi kotak ketika obyek melakukan suatu operasi, kotak tersebut disebut activation.



## **2.5. PHP**

PHP adalah singkatan dari "PHP Hypertext Preprocessor", yang merupakan sebuah bahasascripting yang terpasang pada HTML. Sebagian besar sintaks mirip dengan bahasa C, Java dan Perl, ditambah beberapa fungsi PHP yang spesifik. Tujuan utama penggunaan bahasa ini adalah untuk memungkinkan perancang web. Program php harus diterjemahkan oleh web-server sehingga menghasilkan kode html yang dikirim ke browser agar dapat ditampilkan.

Kekuatan yang paling utama PHP adalah pada konektivitasnya dengan sistem database didalam web. Sistem database yang dapat didukung oleh PHP adalah: Oracle, MySQL, Sybase, PostgreSQL, dan sebagainya. Keunggulan lainnya dari PHP adalah PHP juga mendukung komunikasi dengan layanan seperti protocol IMAP, SNMP, NNTP, POP3 dan bahkan HTTP.

## **2.6. MySQL**

MySQL adalah sebuah server database SQL multiuser dan multi-threaded. SQL sendiri adalah salah satu bahasa database yang paling populer di dunia. Implementasi program server database ini adalah program daemon 'mysqld' dan beberapa program lain serta beberapa pustaka. MySQL merupakan software RDBMS (atau server database) yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat besar, dapat diakses oleh banyak user (multi-user) dan dapat melakukan suatu proses secara sinkron atau berbarengan (multi-threaded) [9].

Saat ini, MySQL banyak digunakan di berbagai kalangan untuk melakukan penyimpanan dan pengolahan data, mulai dari kalangan akademis sampai ke industri kecil, menengah, maupun besar. MySQL merupakan program yang multi-threaded, sehingga dapat dipasang pada server yang memiliki multi-CPU, didukung program-program umum seperti C, C++, Java, Perl, PHP, Python, dan sebagainya, bekerja pada berbagai platform.

## **ANALISA DAN PEMODELAN SISTEM**

### **3.1. Requirement Gathering**

Pada tahap ini dilakukan analisa permintaan untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem. Tahapan ini harus dilakukan secara benar supaya aplikasi yang di

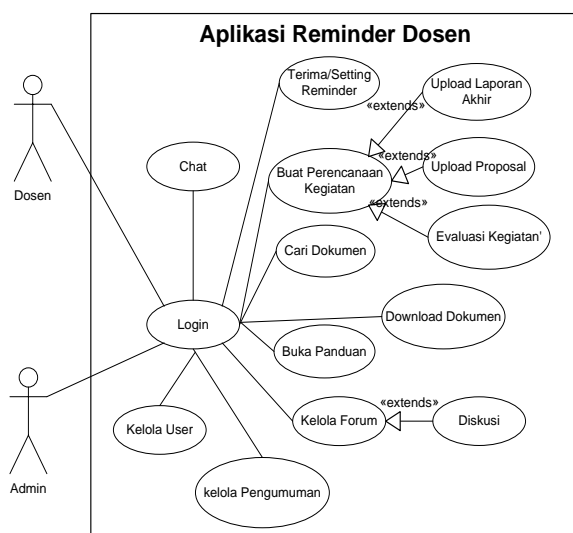
rancang sesuai dengan harapan pengguna. Pengguna menginginkan aplikasi pengingat yang mudah diakses dan terintegrasi dengan sistem yang telah ada, yaitu sistem informasi akademik. Dengan terintegrasinya sistem pengguna tidak melakukan banyak login dan akses aplikasi. Sistem informasi akademik dikembangkan berbasis web maka aplikasi reminder juga berbasis web.

### 3.2. Analisa Sistem

Pada perancangan aplikasi reminder dosen kebutuhan fungsional terdapat dua pengguna yaitu dosen dan admin, admin adalah unit p2m fakultas. Dosen akan mendapatkan reminder / pengingat dari sistem, dapat melakukan pencarian dan download dokumen yang telah terupload terkait data penelitian dan pengabdian masyarakat serta melihat hasil evaluasi dari tiap kegiatan, melakukan chat dan membuat forum diskusi. Sedangkan admin dapat mengelola fitur pengingat dosen, kelola user, kelola dokumen panduan, kelola forum, dan kelola pengumuman. Berikut beberapa diagram penjelasan kebutuhan fungsional:

#### 3.2.1. Use case Diagram

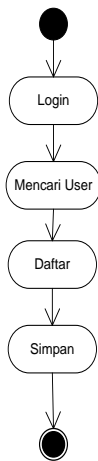
Use case diagram menjelaskan apa yang akan dilakukan oleh sistem yang akan dibangun dan siapa yang berinteraksi dengan sistem tersebut. Berikut adalah use case dari aplikasi reminder dosen yang akan dibangun.



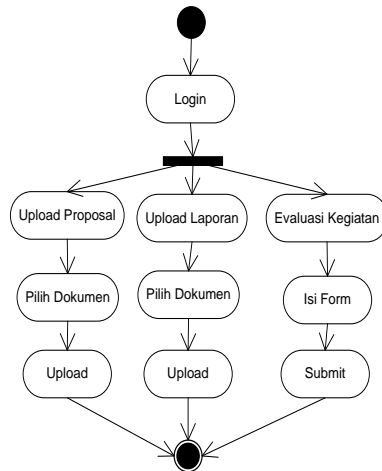
Gambar 1. Use case Diagram Aplikasi Reminder Dosen

### 3.2.2. Activity Diagram

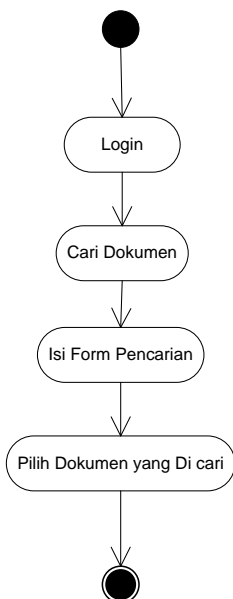
Activity Diagram merupakan diagram yang memodelkan alur kerja suatu proses bisnis, sangat mirip dengan flowchart karena memodelkan proses bisnis dari suatu aktivitas ke aktivitas lain atau dari aktivitas ke status. Berikut adalah beberapa activity diagram untuk aplikasi reminder doseen.



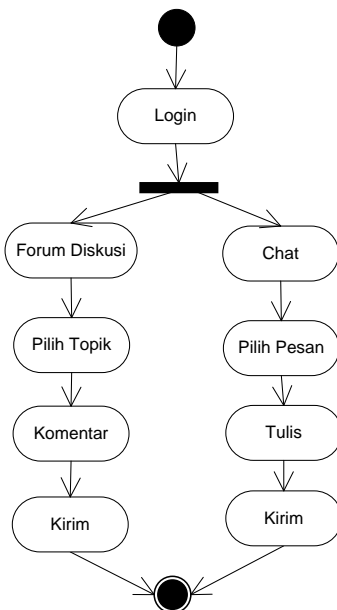
Gambar 2. Activity Diagram Kelola User



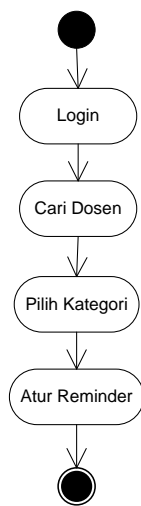
Gambar 3. Activity Diagram Perencanaan Kegiatan



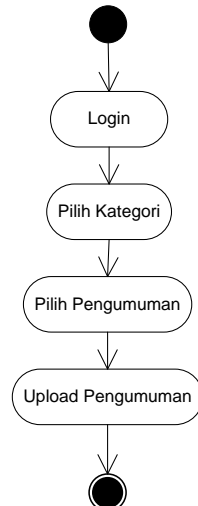
Gambar 4. Activity Diagram Cari Dokumen



Gambar 5. Activity Diagram Forum Diskusi



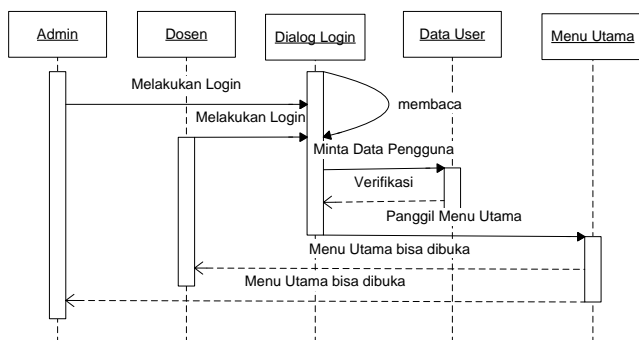
Gambar 6. Activity Diagram Setting Reminder



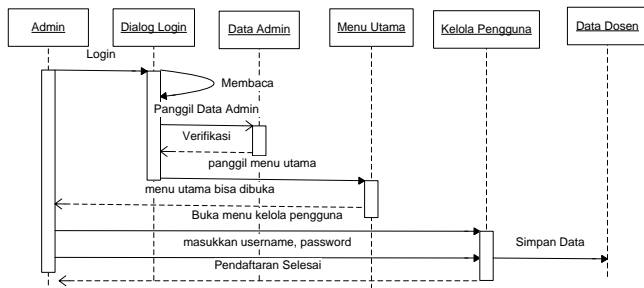
Gambar 7. Activity Diagram Kelola Pengumuman

### 3.2.3. Sequence Diagram

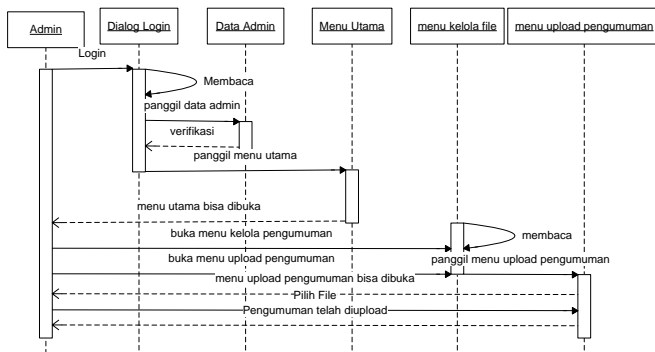
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek didalam dan sekitar sistem (termasuk pengguna, display dan sebagainya), berupa pesan terhadap waktu yang digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah sebagai respon dari sebuah kejadian untuk menghasilkan keluaran tertentu. Berikut adalah beberapa sequence diagram dari aplikasi reminder dosen.



Gambar 8. Sequence Diagram Login



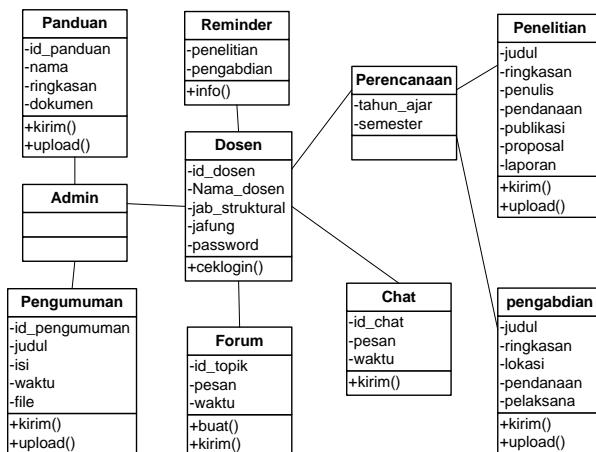
**Gambar 9. Sequence Diagram Kelola User**



**Gambar 10. Sequence Diagram Kelola Pengumuman**

### 3.2.4. Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem/perangkat lunak yang sedang kita gunakan. Class diagram memberi kita gambaran (diagram statis) tentang sistem/perangkat lunak dan relas-relasi yang ada didalamnya. Berikut adalah kumpulan obyek pada aplikasi reminder dosen.



**Gambar 11. Class Diagram Aplikasi Reminder Dosen**

### 3.3. Desain Sistem

Pada tahap ini merupakan perancangan interface aplikasi reminder dosen dari hasil analisa sistem. Berikut adalah interface untuk aplikasi reminder dosen:

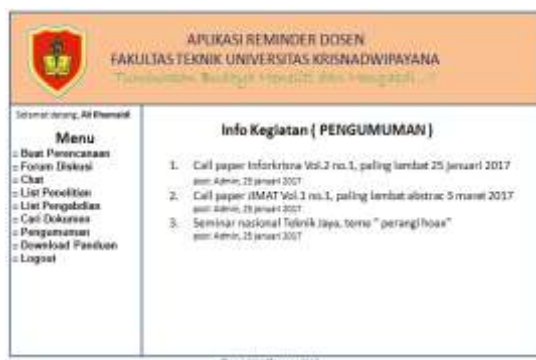
- a) Rancangan interface tampilan awal berupa reminder



**Gambar 12. Interface reminder**

Halaman ini akan muncul ketika dosen melakukan login masuk Sistem Informasi Akademik. Dosen akan disajikan data kegiatan yang belum dilakukan pada semester berjalan.

- b) Rancangan interface tampilan utama



**Gambar 13. Interface Halaman Utama**

Dosen jika menekan tombol oke pada interface reminder akan membuka halaman  
utam yang menyajikan beberapa menu dan informasi pengumuman.

c) Rancangan interface tampilan panduan



**Gambar 14. Interface download panduan**

Dosen jika melakukan klik pada pilihan list panduan akan langsung mendownload  
topic yang dipilih.

d) Rancangan interface tampilan pencarian dokumen



**Gambar 15. Interface pencarian dokumen**

Pada halaman ini dosen bisa mencari dokumen yang diinginkan dengan memilih  
jenis kegiatan dan kataategori serta memasukkan kata kunci yang mau dicari.

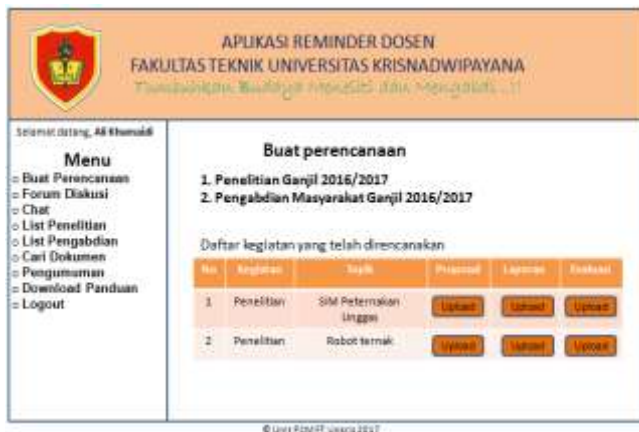
e) Rancangan interface tampilan Setting Reminder



**Gambar 16. Interface setting reminder**

Halaman ini dapat diakses oleh admin untuk pengaturan reminder bagi dosen disesuaikan dengan semester yang berlangsung.

f) Rancangan interface tampilan buat perencanaan



**Gambar 17. Interface buat perencanaan**

Dosen yang telah membuat perencanaan akan tampil pada table kegiatan. Jika akan menambah kegiatan dapat meng-klik pada list pilihan diatas table.



g) Rancangan interface isi perencanaan



**Gambar 18. Interface isi perencanaan**

Jika telah memilih list kegiatan pada gambar 17 maka akan tampil halaman isi perencanaan dan dosen bisa melakukan pengisian sesuai aturan.

h) Rancangan interface list penelitian

Halaman ini menampilkan semua daftar penelitian yang masuk pada aplikasi. Dosen juga dapat mencari dokumen yang diinginkan dengan memasukkan kata kunci dan mengklik tombol cari. Pada halaman ini setiap dokumen terdapat dokumen proposal, laporan dan evaluasi yang dapat di download.



**Gambar 19. Interface list penelitian**

i) Rancangan interface Forum Diskusi



**Gambar 20. Interface forum diskusi**

Halaman ini menginformasikan rangkungan diskusi, dosen bisa melihat diskusi dengan mengklik pada kategori. Jika akan membuat kategori atau topik baru dapat masuk pada halaman berikutnya.

### 3.4. Pengembangan Sistem

Tahap berikutnya adalah development system yang merupakan lanjutan dari desain sistem. Pada tahap ini dilakukan pengembangan aplikasi dengan melakukan coding. Aplikasi dibangun berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai databasenya. Pendukung web server menggunakan apache.

Hardware pendukung yang digunakan dalam implementasi menggunakan server pendukung sistem informasi akademik yang sudah ada di fakultas teknik.

## 4. Pembahasan

### 4.1. Pemodelan Sistem

Pemodelan aplikasi reminder dosen menggunakan pendekatan berorientasi objek menghasilkan use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram dalam bentuk gambar. Pada use case diagram terdapat 2 aktor dan 14 use case. Aktornya yaitu dosen dan admin, dimana admin dapat melakukan pengelolaan untuk user, pengumuman, reminder, forum, panduan dan chat. Selain itu admin juga memiliki hak akses sama seperti dosen yaitu terima reminder, buat perencanaan, upload, download, cari dokumen, lihat pengumuman, lihat panduan, chat dan forum diskusi.

Pada beberapa gambar activity diagram diatas menggambarkan interaksi antar user case. Pada sequence diagram memperlihatkan bahwa terdapat tahap demi tahap alur yang terjadi dan menghasilkan pada use case. Pada class diagram yang terbentuk membantu pengembang karena sudah terbentuk struktur sistem yang baik sebelum dilakukan tahap development.

Pada pemodekan aplikasi reminder dosen diatur mampu menyimpan data agenda membuat perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam waktu 2 semester. Hal ini sesuai dengan kebijakan hingga saat ini dari fakultas teknik yang di koordinasikan dengan unit P2M bahwa jika dosen tidak melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat selama 2 semester berturut-turut atau 1 tahun tahun ajaran maka akan dapat sanksi. Tetapi jika dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat setiap semester akan mendapatkan reward.

Namun pada penerapannya aplikasi ini akan memberikan peringatan tiap semester kepada dosen tetap, jika dosen tidak membuat atau mengisi perencanaan penelitian dan pengabdian masyarakat maka reminder akan muncul terus sampai sebagai pop up di sistem informasi akademik (siakad). Aplikasi reminder ini terintegrasi dengan siakad, jadi ketika dosen membuka siakad akan selalu muncul reminder berupa pop up jika dosen belum membuat perencanaan kegiatan pada semester berjalan.

## **4.2. Desain Sistem**

Hasil perancangan interface yang baik memudahkan user dalam penggunaan aplikasi. Pada aplikasi reminder dosen tiap tampilan dibuat mengutamakan kebutuhan informasi sehingga pengguna dapat akses dengan lebih mudah dan cepat.

Pada tampilan reminder menginformasikan bahwa jika dosen belum melakukan kegiatan pada penelitian dan pengabdian maka akan tampil informasi semester, tahun dan kegiatan apa yang belum dilakukan perencanaan pada semester berlangsung.

Pada halaman tampilan pengumuman dan panduan menampilkan informasi beberapa info yang diurutkan sesuai dengan waktu upload dan file yang dapat didownload. Pada halaman pencarian dokumen pengguna diharuskan memilih jenis kegiatan yaitu penelitian atau pengabdian masyarakat, pada kategori ada 3 pilihan yaitu proposal, laporan, dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pengguna dalam mencari dokumen yang terkait dengan topik yang dicari.

Halaman buat perencanaan menyajikan informasi data perencanaan yang telah dibuat oleh pengguna dan ada pilihan yang berupa link jika akan membuat perencanaan penelitian atau pengabdian masyarakat. Jika link tersebut dipilih akan mengarah pada halaman isi perencanaan kegiatan. Setelah pengisian kegiatan dilakukan, pengguna dapat mengupload dokumen proposal, laporan dan hasil evaluasi. Jika membuat perencanaan tetapi tidak upload dokumen proposal maksimal 30 hari maka otomatis akan di reminder ulang.

Secara keseluruhan pengguna mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat pada tiap halaman interface yang disajikan pada aplikasi reminder dosen.

### **4.3. Evaluasi Perancangan Sistem**

Sebelum dilakukan tahap implementasi, penulis akan memastikan bahwa hasil analisa dan desain sudah memenuhi kebutuhan sistem, untuk itu perlu dilakukan pengujian sistem. Pengujian dilakukan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan pengguna. Adapun jumlah sampel ada 10 orang yang terdiri dari 8 dosen dan 2 dari unit P2M yang sebagai admin. Berikut adalah hasil evaluasi yang disajikan dalam bentuk presentase nilai dari sampel:

a) Kategori user interface

Pada kategori ini hasil desain dinyatakan 90% sudah menarik. Sampel admin yang sebanyak 2 orang memberi nilai 100% dan menyakan bahwa tampilan interface admin sudah menarik semua dan sampel dosen sebanyak 8 orang memberi nilai rata-rata 80%. Penilaian ini didasarkan pada layout dan penempatan tombol.

b) Kategori content

Pada kategori content dinyatakan 90% sudah sesuai. Sampel admin yang sebanyak 2 orang memberi nilai 100% dan menyakan bahwa konten admin sudah sesuai dan sampel dosen sebanyak 8 orang memberi nilai rata-rata 80%. Penilaian ini didasarkan pada kesesuaian informasi.

c) Kategori usability

Pada kategori ini hasil desain dinyatakan 95% sangat berguna. Sampel admin yang sebanyak 2 orang memberi nilai 100% dan menyakan bahwa aplikasi berguna dan mendukung. Sampel dosen sebanyak 8 orang memberi nilai rata-rata 90%.

Penilaian ini didasarkan pada manfaat terhadap agenda untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.

## **5. Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perancangan aplikasi reminder dosen yang terkait kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a) Pemodelan aplikasi reminder dosen menggunakan pendekatan berorientasi objek dengan UML dan penyajian dengan menggunakan use case diagram, activity diagram, sequence diagram dan class diagram.
- b) Desain aplikasi reminder dosen secara user interface dan content sudah memenuhi kebutuhan pengguna. Hal ini terlihat dari hasil pengujian bahwa 90% user interface sudah baik dan content sudah sesuai.
- c) Aplikasi reminder dosen dipandang dapat membantu agenda dosen dan unit P2M dalam menunjang tugas dan kewajiban. Sehingga target dosen, unit P2M, dan fakultas tercapai dengan bantuan reminder. Hal ini didukung dengan data 95% pengguna menyatakan bahwa aplikasi berguna.

Dalam implementasinya sistem dikembangkan dengan berbasis web karena terintegrasi dengan sistem informasi akademik. Dalam pengembangan lebih lanjut dapat menggunakan aplikasi berbasis mobile dan dengan penambahan fitur untuk mendukung kemajuan penelitian pada tingkat fakultas dan universitas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi, Edisi X. 2016. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
- Aang Febriyus. 2013. Rancang bangun Aplikasi e-Reminder Services untuk kegiatan dosen. Tugas Akhir. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 74 Halaman
- Elfa putri S. Kumpulan Aplikasi to do list dan reminder pilihan. <https://id.techinasia.com/daftar-aplikasi-to-do-list-reminder-android>, diakses tanggal 25 januari 2016

- Schmuller, Joseph, 1999, Teach Yourself UML in 24 Hours, Sams Publishing, Indianapolis
- Kosidin, Reza Nur Farizah. 2016. Pemodelan Aplikasi Mobile Reminder berbasis Android. Yogyakarta: SENTIKA
- Hulopi, Hamzah Jenrisda. 2014. Penerjemah Teks Bahasa Gorontalo ke Text Bahasa Indonesia. Thesis. Universitas Negeri Gorontalo
- Erlangga, galuh bintang. 2013. Pembangunan Aplikasi Pengingat Aktivitas Berbasis Lokasi Pad windows Phone 8. Thesis. Teknik Informatika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Widodo, Prabowo Pudjo., & Herlawati. 2011. Menggunakan UML. Bandung: Informatika.
- Raharjo, Budi. 2015. Belajar Otodidak MySQL. Bandung: Informatika.
- Charibaldi, Novrido, Wijayanto, Budi, Denyu, 2010. Aplikasi Schedule dan Reminder Berbasis Web. (Studi kasus di PT. Sarana Permata Container Semarang) Yogyakarta: Telematika Vol. 06. No. 02.

## **MEMBANGUN KEBIJAKAN KOMPETENSI TRIDARMA PERGURUAN TINGGI KOTA JAKARTA"**

Florentina, S.Pd., M.Pd.  
(Dosen Tetap FKIP Bahasa Inggris UTAMA Jagakarsa)

### I. Pendahuluan

A.T. Kearney, sebuah perusahaan konsultan global, setiap tahun merilis Global Cities Index dan Global Cities Outlook. Pada tahun 2016, Ibu Kota Jakarta menempati peringkat ke-56 dari 125 kota dalam Global Cities Index 2016; dan urutan ke-110 juga dari 125 kota dalam peringkat Global Cities Outlook 2016, Global Cities Index (GCI) adalah penilaian kinerja kota berdasarkan lima dimensi utama, yaitu aktivitas bisnis, sumber daya manusia, sistem informasi, kebudayaan, dan keterlibatan politik.

Sementara itu, Global Cities Outlook (GCO) merupakan penilaian terhadap prospek perkembangan potensi kota-kota di dunia berdasarkan tingkat perubahan sejumlah indikator dalam empat dimensi, yaitu diantaranya sebagai berikut:

- a. kesejahteraan personal,
- b. ekonomi,
- c. inovasi, dan
- d. pemerintahan ([www.atkearney.com](http://www.atkearney.com)).

Maka, Kesimpulan yang bisa penulis paparkan pada tulisan ini adalah:

- a. Banyaknya dosen tetap Non PNS yang belum merasakan tingkat kesejahteraan, maka tugas dari Negara untuk membantu subsidi tambahan Dana bagi Gaji Dosen di Kampus swasta tersebut, baik itu melalui dana tambahan yang dianggarkan dari dana APBN/Anggaran Pendapatan Belanja Negara ataupun melalui dana subsidi dari APBD/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang berasal dari Pemprov DKI Jakarta melalui persetujuan Anggota DPR dan resmi

ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta yang baru, yang akan terpilih nanti melalui PILKADA DKI JAKARTA tahun 2017. Agar tingkat Kesejahteraan Dosen di Jakarta Pun tidak KALAH dengan Tukang Sapu Jalanan yang sudah merasakan Gaji UMR (Upah Minimum Regional).

- b. Anggaran untuk Dana Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat ada di anggarkan Pada Kemenristekdikti. Lalu Anggaran untuk Beasiswa S3 pun ada. Lalu kenapa tidak diusulkan saja, dana Anggaran GAJI DOSEN, terutama BAGI KAMPUS SWASTA, untuk sekaligus juga bisa dianggarkan penambahannya dari Dana APBN/APBD? Karena tidak mungkin bagi Kampus Swasta menaikkan SPP Semesteran kepada Mahasiswa sedemikian tingginya? Karena salah satu sumber pokok Pendanaan ADALAH BERASAL DARI Pembayaran SPP Semesteran Mahasiswa di Kampus Swasta tersebut. Jadi, Mohon Kebijakan Pemerintah yang baru terkait dengan adanya hak hak Dosen yang kurang memenuhi Standar Kesejahteraan Bersama. Karena Tugas Dosen SANGATLAH BANYAK, yaitu: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Mahasiswa/i di Kampus, Meneliti untuk Dipakai Ilmu Penelitiannya di Kehidupan Masyarakat serta memasukkan Tulisan Penelitiannya ke dalam Jurnal Terakreditasi/ISSN/Jurnal Internasional, yang memakan biaya kantong pribadi dosen yang cukup besar agar bisa dipakai sebagai bukti fisik dalam menaikkan keangkatannya sebagai Dosen serta bisa dipakai untuk Bahan Akreditasi Kampus tersebut.
- c. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, diantaranya Penyuluhan, Seminar, Workshop, dll, yang berguna bagi Kemajuan Masyarakat tersebut dan Mengisi SIPKD, yang dananya langsung berasal dari kantong pribadi dosen tersebut.
- d. Untuk Lanjut Kuliah ke jenjang S2 dan S3, tidak semua Dosen mendapatkan Beasiswa. Jadi, Dosen tersebut pun harus merogoh Koceknya sendiri. Inilah yang menjadi Kendala Kesejahteraan Dosen di seluruh Indonesia Masih Minim, khususnya pada Kota Jakarta sebagai Pusat Ibukota Negara Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Guru dan Dosen semestinya dipisahkan satu dengan yang lainnya, agar UU tentang Guru yang TUPOKSI nya hanya mengajar dan



TUPOKSI Dosen yang terkait dengan Tri Darma Perguruan Tinggi (Mengajar, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat) dapat diatur dengan jelas. Oleh karena TUPOKSI Guru dan Dosen berbeda, maka Kebijakan Undang Undangnya pun harus dipisahkan satu dengan yang lainnya.

## **II. Pembahasan**

Mengacu kepada Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu dosen dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional. Namun pada kenyataannya kompetensi profesional dosen swasta yang berkaitan dengan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional belum tersedianya program khusus baik berupa pelatihan atau loka karya, workshop yang secara intensif berkelanjutan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran pada sumber data di beberapa Kampus Swasta di Kota Jakarta.

Peningkatan kompetensi profesional dosen sebab hal ini berkaitan langsung dengan layanan mahasiswa dan hipotesisnya adalah (1) jika kompetensi profesional dosen tinggi, maka akan berdampak terhadap mutu layanan belajar mahasiswa; (2) jika mutu layanan belajar mahasiswa tinggi, maka akan berdampak besar terhadap mutu lulusan, dan jika mutu lulusan baik maka akan berdampak baik pula terhadap serapan dalam dunia kerja dan industri.

Temuan dari penelitian ini adalah (1) kebijakan penyusunan perencanaan dosen oleh lembaga kurang memperhatikan aspek pemetaan kebutuhan; (2) pelaksanaan kegiatan pengembangan manajemen kompetensi dosen kurang bertumpu pada aspek pemenuhan kebutuhan layanan mahasiswa; (3) strategi pengembangan manajemen bagi peningkatan kompetensi dosen belum terkoordinasi dengan baik, dan (4) pengawasan manajemen bagi peningkatan kompetensi profesional dosen kurang memperhatikan aspek-aspek manajemen serta (5) pembinaan pengembangan

manajemen kompetensi profesional dosen tidak berkesinambungan dan memperhatikan aspek reward dan punishment. Hasil penelitian dengan mempergunakan SWOT analysis ditemukan faktor pendukung motivasi dosen tinggi dan faktor penghambatnya adalah belum tersedianya program khusus yang secara intensif berkelanjutan sebab pada kebanyakan kasus di Universitas Swasta, terlalu banyak disibukan dalam system recruitment mahasiswa. Oleh sebab itu diperlukan strategi khusus bagi pengembangan manajemen yang berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi profesional dosen yakni manajemen mutu layanan akademik. Kejadian yang terdapat pada sumber data penelitian menjelaskan bahwa (1) terbaikannya pengembangan potensi dosen oleh universitas; (2) rendahnya mutu pembelajaran dan proses pendidikan; (3) menurunnya potensi pengembangan universitas; (4) menurunnya kinerja kelembagaan secara menyeluruh dan (5) rendahnya minat belajar mahasiswa. Kejadian – kejadian tersebut jika dianalisa secara lebih mendalam, maka terjadi dari hal – hal yang bersifat umum kepada hal – hal yang lebih spesifik yakni menurunnya kompetensi professional dosen yang tentunya diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai pendukung.

Hal diatas terjadi bukan dalam kurun waktu yang sebentar, namun dalam kurun waktu lima tahun terakhir dan dibuktikan dengan menurunnya jumlah mahasiswa baru, rendahnya pencitraan publik, serapan rancangan kerja yang kurang optimal serta masalah – masalah lain yang secara langsung ataupun tidak langung berkaitan dengan minat belajar mahasiswa seperti prestasi akademik dan non akademik diperlukan adanya peningkatan.

Di satu pihak jumlah dosen yang berlatar pendidikan S1 masih cukup besar (23,5 %), di pihak perguruan tinggi dituntut menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, kecakapan-keterampilan, motivasi dan kemandirian agar mampu hidup, berkarya dan beradaptasi dengan dunia yang terus berubah dan berkembang. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan profesional dosen, agar dapat menghasilkan lulusan sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan profesional bukan sesuatu yang statis, tetapi dinamis terus dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan.

Kemudian, kendala yang dihadapi pimpinan perguruan tinggi dalam meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, bahwa Lembaga belum banyak membuat atau menyelenggarakan program khusus atau program prioritas untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional secara intensif berkelanjutan, pendanaan pendidikan untuk menunjang kegiatan tersebut masih belum memadai, dan terbatasnya sarana prasarana yang dimilikinya. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dosen membutuhkan kerjasama antara pimpinan perguruan tinggi, dosen, karyawan, dan semua yang terlibat dalam terselenggaranya pendidikan tinggi. Mengingat begitu besarnya peranan perguruan tinggi dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang bermutu, dan begitu strategiknya kedudukan dosen dalam proses pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi.

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah maka timbul permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kebijakan apa yang ditetapkan dalam penyusunan program manajemen pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen?
2. Analisa SWOT yang ditetapkan dalam menyusun program manajemen pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen ?
3. Strategi perencanaan apa dalam kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen ?
4. Strategi pelaksanaan apa dalam kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen ?
5. Strategi evaluasi apa dalam kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen ?
6. Hasil apa yang telah dicapai dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional kompetensi dosen ?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis: Kebijakan dalam penyusunan program manajemen pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen, analisa SWOT dalam kegiatan manajemen pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen,

strategi perencanaan program pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen, strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen, strategi evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen, hasil yang telah dicapai dalam pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik & profesional dosen.

UU No 14 Tahun 2005 menyebutkan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen merupakan komponen penting dalam pendidikan tinggi, apapun kebijakan peningkatan mutu pendidikan yang dirancang yang pada akhirnya dosen melaksanakan dalam proses belajar mengajar. Sebagai ujung tombak perguruan tinggi, dosen sangat menentukan mutu pendidikan dan lulusan yang dilahirkan perguruan tinggi tersebut, disamping secara umum kualitas perguruan tinggi itu. Jika para dosennya bermutu tinggi maka kualitas perguruan tinggi bermutu, begitupun sebaliknya (Thoyib 2008).

Lebih lanjut dalam Undang-Undang guru dan dosen pada pasal 1 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional, dosen bertugas sebagai pengampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya. Salah satu wujud keprofesionalannya dalam mengampu mata kuliah, maka seorang dosen melakukan aktivitas perencanaan, melaksanakan perkuliahan dan mengevaluasi proses serta hasil perkuliahan (Setiawati, Linda: 2012).

Kebijakan penyusunan program pengembangan kompetensi dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan Perguruan Tinggi. Peran, tugas dan tanggung jawab dosen sangat penting dalam mewujudkan pendidikan Nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia, meliputi kualitas iman dan takwa (Prasetyo, Tika Dedy, Kusri, Hanif Al Fatta 2013). Strategi perencanaan pengembangan kompetensi dosen sesungguhnya

merupakan bagian tidak terpisahkan dari program pengembangan perguruan tinggi secara umum.

Keberhasilan dari program tersebut akan berpengaruh terhadap kualitas Perguruan Tinggi itu sendiri. Program-program tersebut perlu diimplementasikan secara teratur dan berkesinambungan agar betul-betul tercipta para dosen yang berkualitas tinggi dan mampu mendorong kemajuan Perguruan Tinggi. Salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi adalah mengembangkan ilmu pengetahuan. Tugas tersebut direalisasikan melalui pengkajian dan riset-riset ilmiah yang dilakukan oleh komunitas akademik yang ada di dalamnya, terutama para dosen. Beberapa indikator yang dipakai untuk menilai produktivitas ilmiah seorang dosen adalah jumlah dan kualitas publikasi ilmiah, pengakuan, dan penghargaan atas karya maupun integritas ilmiahnya, serta tingkat aktivitas ilmiahnya, dan partisipasi dalam seminar, lokarya, publikasi ilmiah melalui jurnal baik nasional maupun internasional dan kegiatan karya ilmiah lainnya. (Janne Tienari, 2011).

Dalam proses evaluasi pendidikan di perguruan tinggi, para dosen memegang peranan yang sangat penting, karena merekalah yang berhak menilai dan menimbang kualitas pembelajaran yang mereka berikan atau yang berlaku di tempat mengabdikan tersebut. Selain sebagai pihak yang mengevaluasi, para dosen juga merupakan objek evaluasi. Kinerja mereka sebagai tenaga pengajar juga dinilai untuk diperbaiki atau diberi penghargaan berupa kenaikan pangkat, atau diberikan jabatan struktural. Evaluasi program dan pengembangan kompetensi dosen dilakukan oleh fakultas. Kegiatan yang dievaluasi terutama berkenaan dengan kemampuan atau kompetensi profesional yaitu antara lain penguasaan bidang ilmu yang diampu, dan kompetensi pedagogik berkenaan dengan kemampuan mengajar atau menyampaikan ilmu kepada para mahasiswa. Evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada evaluasi karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan persiapan dosen, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata kuliah, serta keadaan lingkungan dimana pembelajaran berlangsung.

Evaluasi proses pembelajaran menekankan pada evaluasi pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh pembelajar meliputi keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan, dan minat, sikap serta cara belajar mahasiswa. Evaluasi hasil pembelajaran atau evaluasi hasil belajar antara lain menggunakan test untuk melakukan pengukuran hasil belajar sebagai prestasi belajar, dalam hal ini adalah penguasaan kompetensi oleh setiap mahasiswa. Pemilihan metode dalam penelitian ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, yakni peneliti ingin secara serius memahami dan mendalami masalah yang berkaitan dengan strategi pengembangan manajemen kompetensi dosen, tentu dengan membandingkan berbagai literatur, maka pendekatan dengan kualitatif dan deskriptif dianggap lebih tepat terutama dalam mengungkapkan berbagai kejadian yang bersifat langsung dan terjadi serta perlu penanganan yang lebih serius sebab jika dibiarkan akan memberikan dampak yang cukup signifikan baik bagi peningkatan kompetensi profesional dosen itu sendiri, bagi mahasiswa serta bagi perkembangan lembaga dimasa yang akan datang.

Dalam penyusunan program pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen tersebut dilandasi oleh beberapa Kebijakan diantaranya kebijakan dari pemerintah berupa : Undang-Undang tentang guru dan dosen, undang-undang sisdiknas, peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Pemandiknas tentang Standar tenaga pendidik dan kependidikan serta kebijakan intern Perguruan Tinggi. Kebijakan internal terkait dengan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen dilaksanakan melalui peningkatan kualifikasi jenjang pendidikan, baik menuju pendidikan S2 maupun S3. Bentuk pengembangan kompetensi lainnya berupa menulis karya ilmiah yang diseminarkan baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional serta karya ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal nasional, bentuk lokakarya dan simposium. Kebijakan internal lainnya untuk pengembangan kompetensi dosen diberikan stimulus berupa penghargaan materi maupun non materi.

Keunggulan/kekuatan yang ada pada Dosen di wilayah Jakarta dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen diantaranya

besarnya motivasi dosen, punya cita-cita, punya rasa percaya diri tinggi, loyalitas; kompetensi antara lain kemampuan dalam berbahasa Inggris. Keunggulan dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen ini karena adanya kerjasama antara pimpinan Fakultas (Dekan), Ketua Prodi dan Dosen, yaitu pimpinan selalu memberikan bimbingan dan motivasi untuk maju dan untuk berkembang kearah yang lebih baik dalam hal pengembangan kompetensi dosen maupun dalam kinerja dosen; ketua prodi selalu memberikan dukungan setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pimpinan, dan dosen dengan adanya bimbingan dan dukungan serta motivasi dari pimpinan menjadi semangat untuk melaksanakan pengembangan dirinya ke arah yang lebih baik. Aspek lainnya dukungan dana intern perguruan tinggi maupun dari DIKTI.

Kelemahan dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen yang dihadapi adalah diantaranya masih ada dosen muda perempuan, dan dosen-dosen tertentu tidak atau kurang memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, karena alasan banyak tugas atau kesibukan, dengan alasan repot dengan keluarga karena anak masih kecil dan lain sebagainya, meskipun tersedia peluang dana untuk lanjutan studi, tetapi karena jumlahnya terbatas serta sifatnya kompetitif, terbatas kemampuan dan kurangnya semangat dosen sendiri. Beberapa dosen kemampuannya dalam bidang-bidang tertentu dipandang masih kurang. Birokrasi yang terlalu dapat menghambat kelancaran proses kegiatan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen diantaranya dosen malas untuk belajar, hal ini disebabkan karena setiap orang pada hakekatnya memiliki motivasi untuk berprestasi yang besarnya berbeda satu sama lainnya, berarti ada yang memiliki motif berprestasi tinggi dan ada juga yang memiliki motif berprestasi rendah.

Motivasi seseorang tergantung pada kekuatan motifnya, karena motif merupakan kebutuhan, keinginan, dorongan gerak hati atau juga motif merupakan kekuatan yang mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu motif berprestasi merupakan tenaga pendorong yang menggerakkan seseorang, beberapa dosen kurang menguasai karakteristik peserta didik, kurang menguasai teori dan

prinsip-prinsip pembelajaran, belum memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pembelajaran, tidak memfasilitasi pengembangan peserta didik, belum dapat berkomunikasi secara efektif, belum empatik dan belum santun kepada peserta didik.

Kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga, Yayasan dan fakultas diantaranya (1) memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan secara berkala, (2) mempersiapkan dana pendidikan untuk memberikan motivasi kepada para dosen dalam meningkatkan jenjang kualifikasi, (3) menerapkan peraturan bagi dosen yang akan melaksanakan proses pembelajaran harus menempuh dahulu jenjang yang sesuai dengan tingkatannya, (4) membentuk lembaga penjamin mutu (LPM) yang berfungsi sebagai pengawasan dan evaluasi yang mengacu pada sepuluh standar nasional pendidikan (5) adanya kebijakan dari DIKTI untuk memberikan kesempatan kepada dosen yang akan meningkatkan kualifikasi.

Perencanaan pengembangan kompetensi dosen di kampus bisa dimulai dengan penyusunan rencana strategis sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan untuk kurun waktu empat tahun ke depan melalui analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*), analisis untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, dan analisis untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal organisasi. Langkah ini dilakukan agar program-program pendidikan yang dibuat dapat teraplikasi dengan baik dan relevan dengan kebutuhan lingkungan dan perkembangan zaman. Upaya untuk mengaplikasikan rencana strategis dalam bentuk tindakan nyata, rencana strategis disusun dalam bentuk rencana kerja tahunan. Rencana strategis (Renstra) dan monitoring pelaksanaannya sesuai dengan visi, misi sasaran dan tujuan program.

Perencanaan program jangka panjang dilakukan setiap lima tahun, namun peninjauan terhadap perencanaan tersebut sudah mulai dilakukan pada setiap tahun. Disisi lain evaluasi terhadap kinerja program studi dilakukan setiap awal semester yang diakumulasikan dalam satu tahun. Proses perencanaan melibatkan seluruh jajaran institusi. Strategi pelaksanaan dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen, berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu lulusan oleh lembaga penjamin mutu, karena hasil analisa berdampak pada tuntutan



peningkatan kompetensi para dosen, sebab untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, menuntut kompetensi dosen yang tinggi yang profesional pada Lembaga Penjamin Mutu, yang berfungsi mengkaji, menganalisis dan memberikan masukan tentang pengembangan kompetensi dosen kepada setiap fakultas, jurusan dan bagian. Hasil analisis dari lembaga penjaminan mutu digunakan untuk penyusunan seluruh program pendidikan. Khusus berkenaan dengan pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen yang dikembangkan adalah pendalaman materi dan pengembangan materi serta perkembangan bidang ilmu yang diampu (kompetensi profesional), juga cara-cara atau metode penyampaianya (kompetensi pedagogik). Untuk peningkatan pendalaman materi keilmuan dan metode penyampaian tersebut, dilakukan berbagai kegiatan akademis berupa pelatihan yang sifatnya sementara tidak berkesinambungan (waktu maksimal hanya satu minggu), seminar, lokakarya, symposium, ceramah menghadirkan ahli, studi banding disamping penyediaan buku-buku dan jurnal bagi dosen di perpustakaan.

Perguruan Tinggi banyak membina kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lain, terutama dalam pelaksanaan kuliah dan pembinaan dosen. Para dosen juga diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah antar jurusan, seminar di luar kampus, dan juga mereka ditugaskan sebagai dosen terbang ke luar daerah.

Untuk pengembangan lembaga dan untuk pengembangan wawasan dosen, lembaga juga mengadakan seminar-seminar baik seminar nasional maupun internasional. Karena ada tuntutan profesionalisme, para dosen juga melakukan berbagai usaha mandiri dalam bentuk membaca literatur. Dalam implementasinya pengembangan kompetensi pedagogik dan pengembangan profesional dosen belum dilandasi oleh enam nilai kehidupan. Ada juga dosen yang belum menguasai karakteristik peserta didik, ada diantaranya dosen belum menguasai teori dan prinsip-prinsip pembelajaran, dan dosen belum mengembangkan kurikulum dan rancangan pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya evaluasi proses dan hasil pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan pelaksanaan pembelajaran dan pencapaian hasil pembelajaran oleh setiap mahasiswa dan juga untuk meningkatkan kualitas proses

dan hasil pembelajaran. Kemudian manfaatnya dilaksanakan evaluasi adalah (1) memperoleh pemahaman pelaksanaan dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan, (2) membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran, dan (3) meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas keluaran.

Para dosen umumnya, terutama yang telah meningkatkan kompetensi dosen banyak memberikan kontribusi terhadap pengembangan lembaga, fakultas dan terutama pada program studinya. Dalam darma pendidikan dan pengajaran, mereka banyak berkontribusi dalam penyusunan kurikulum, pengembangan bahan ajar, pembelajaran, media, evaluasi, dan program praktek lapangan. Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, pada tahap perencanaan perkuliahan para dosen melakukan kegiatan penyusunan silabus, penyiapan soal-soal ujian dan tugas-tugas bagi mahasiswa. Untuk memelihara relevansinya dengan tujuan, suatu rencana perlu dievaluasi dan disempurnakan. Berkenaan dengan rencana-rencana pembelajaran tersebut para dosen mengevaluasi dan menyempurnakannya setelah satu tahun, setelah satu semester atau lebih dari satu tahun.

Ada beberapa faktor yang mendukung pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen. Pendukung utama adalah tersedianya peluang untuk pengembangan karir, baik dalam bidang akademis maupun struktural akademis. Karir dibidang akademis adalah menjadi ilmuan di bidang ilmu pendidikan sebagai Doktor ataupun Guru Besar. Karir di bidang struktural akademis adalah sebagai rektor, pembantu rektor, dekan, pembantu dekan, ketua lembaga penelitian, ketua lembaga pengabdian kepada masyarakat, ketua jurusan/ketua prodi, serta jabatan-jabatan struktural akademis lainnya. Pendukung lainnya adalah fasilitas-fasilitas yang mendukung kelancaran pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen, yaitu tersedianya beasiswa atau bantuan dana bagi yang akan melakukan studi lanjut ke program S2 atau S3. Fasilitas lainnya adalah adanya dorongan atau motivasi, keharusan untuk meningkatkan kompetensi dosen untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan diri, antara lain : kegiatan seminar, lokakarya, symposium, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan kegiatan karya ilmiah

lainnya serta tersedianya dana untuk pengembangan serta untuk kegiatan penelitian, penulisan buku, dan modul.

Faktor penghambat dalam pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen adalah belum adanya program khusus atau program prioritas untuk pengembangan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dosen, belum ada program pelatihan yang berkelanjutan untuk menunjang kegiatan tri dharma perguruan tinggi yaitu untuk pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, untuk penelitian dan untuk pengabdian kepada masyarakat, faktor penghambat lainnya adalah timbul dari diri dosennya yaitu tentang kemampuan dan semangat dosen sendiri. Beberapa dosen, kemampuannya dalam bidang-bidang tertentu dipandang masih kurang. Meskipun peluang untuk meningkatkan kemampuan cukup banyak, tetapi dosen-dosen tertentu tidak atau kurang memanfaatkannya karena alasan banyak tugas atau kesibukan.

Meskipun tersedia peluang dana untuk lanjutan studi, tetapi karena jumlahnya terbatas serta sifatnya kompetitif, maka pemanfaatannya juga terbatas. Birokrasi yang terlalu ketat dapat menghambat kelancaran proses kegiatan, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan pengembangan kompetensi dosen. Kebijakan yang ditetapkan dalam menyusun program manajemen pengembangan kompetensi dosen dilandasi dengan Undang-Undang tentang guru dan dosen, undang-undang dsisdiknas, peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendiknas tentang Standar tenaga pendidik dan kependidikan telah sesuai pada aspek-aspek yuridis yang berlaku di Negara Indonesia. Pengembangan kompetensi dosen bukan hanya pada salah satu komponen saja, namun pengembangan kompetensi dilaksanakan khususnya pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dan umumnya pada kompetensi profesional dan umumnya pada kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, menjelaskan bahwa dosen harus memiliki beberapa kompetensi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu: "kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial" (Ka-ho Mok.2005).

Kebijakan dalam pengembangan kompetensi dosen yang dilaksanakan, lembaga pun harus ikut memfasilitasi program studi secara berkala, berupa fasilitas proses belajar mengajar yang sudah dilengkapi dengan berbagai media, lembaga memberikan bantuan sumbangan dana pendidikan ke setiap dosen yang berprestasi, menerapkan peraturan bahwa pembelajaran harus sesuai dengan jenjang yang dimiliki. Ini semua sebagai motivasi kepada dosen dalam meningkatkan kualifikasi akademisnya, sehingga dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kompetensi dosennya. Membentuk Unit Penjamin Mutu (UPM).

UPM ini merupakan saran yang memungkinkan para pendidik dapat beradaptasi dengan "kekuatan perubahan" sehingga lembaga pun mempunyai para pendidik yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didiknya, hal ini sesuai dengan pendapat Mulyasa, (2011:120), mengatakan bahwa : Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran dan dari buruknya akhlak serta keimanan. Pendidikan bermutu lahir dari sistem perencanaan yang baik, dengan materi dan dari sistem tata kelola yang baik, dan disampaikan oleh pendidik yang baik dengan komponen pendidikan yang bermutu, khususnya para pendidik. Kebijakan penyusunan program pengembangan kompetensi dosen belum berjalan sesuai dengan tuntutan kebijakan yang ada. Dengan demikian, menurut Kim, Sunwoong, (2012) mengatakan bahwa, "Kebijakan pendidikan didukung oleh riset dan pengembangan. Suatu kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat diimplementasikan".

Maka setiap penyusunan rencana strategi perlu dilandasi oleh suatu kebijakan yang dapat diimplementasikan kegiatannya. Manajemen strategik sebagai sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan (formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi, dan untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi memiliki tugas yaitu: "Merumuskan visi dan misi organisasi meliputi rumusan umum filosofi dan tujuan, mengembangkan profil organisasi yang mencerminkan kondisi internnya,

menilai lingkungan eksternal organisasi meliputi pesaing dan faktor kontekstual, mengidentifikasi setiap alternatif strategi untuk menentukan strategi mana yang paling sesuai dengan visi dan misi organisasi.

Mengimplementasikan pilihan strategik dengan cara mengalokasikan, menganalisis alternatif strategi dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan lingkungan eksternal sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, struktur, teknologi, dan sistem imbalan”.

### III. Kesimpulan

Oleh karena itu, untuk menjadikan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan, selain harus menjadikan agama dan religiositasnya sebagai penopangnya dan juga menjadikan pendidikan sebagai pusat utama dalam mengembangkan pesat atau tidaknya kemajuan sebuah Kota Jakarta yang penuh dengan keberagaman yang humanis, inklusif, pluralis, moderat, toleran, serta membangun masyarakat madani yang memiliki keunggulan di bidang kebudayaan, teknologi, sistem transportasi, pemerintahan, bahasa, sastra, dan komunikasi, serta ekonomi warganya bisa terwujud apabila segenap komponen warga Jakarta dapat mewujudkan prasyarat-prasyarat kondisional itu, maka mimpi untuk menjadikan Jakarta sebagai pusat pendidikan yang maju dan sejahtera, bukan lagi sebagai sebuah angan-angan, melainkan cita-cita yang harus dapat diwujudkan melalui pembangunan kompetensi pendidikan tridarma perguruan tinggi di kampus negeri maupun kampus swasta.

Analisis SWOT yang ditetapkan dalam penyusunan program manajemen pengembangan kompetensi dosen, menggunakan analisis posisi dengan menggunakan pendekatan SWOT. Sesuai dengan pendekatan analisa SWOT dan aplikasinya menurut Akdon (2011: 20) adalah:

1. Bagaimana Kekuatan (*strengths*) mampu mengambil Keuntungan (*advantage*) dari Peluang (*opportunities*) yang ada.
2. Bagaimana cara mengatasi Kelemahan (*weaknesses*) yang mencegah Keuntungan (*advantage*) dari Peluang (*opportunities*) yang ada.

3. Selanjutnya bagaimana Kekuatan (*strengths*) mampu menghadapi Ancaman (*threats*) yang ada.
4. Dan yang terakhir adalah bagaimana caranya mengatasi Kelemahan (*weaknesses*) yang mampu membuat ancaman (*threats*) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aivazian, Tigran. *The British Study Edition of the Urantia Papers Book*. London: Urantia Foundation. 2008. A Kearney. *Global Cities*.  
<https://www.atkearney.com/documents/10192/8178456/Global>.  
2016.
- Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Orde*.  
New  
Delhi: Penguin Book. 1997.
- Ottersen, Carl (2014). *The Great Guide to Jakarta: The Easy Way to Discover Jakarta!*.  
Hongkong: No Trees Publishing Ltd.

## **STRATEGI MAHASISWA BELA NEGARA dan SISTEM NILAI DALAM MEMANTAPKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**Jarkawi**

Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin  
[jarkawi010462@gmail.com](mailto:jarkawi010462@gmail.com)

### Abstrak

Mahasiswa merupakan tulang punggung negara dalam mengisi pembangunan untuk suatu perubahan bermutu dan kompetitif menuju pemantapan tridarma perguruan tinggi. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa mempunyai andil sangat besar terhadap ketahanan bangsa Indonesia dengan pergerakannya menentang berbagai ancaman, tantangan dan hambatan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa seperti pergerakan menentang partai komonis pada masa orde lama, dan pada masa orde baru kembali memerankan perannya dengan pergerakan reformasi dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Perkembangan dunia globalisasi melalui berbagai bentuk perubahan membawa kepada pergeseran nilai-nilai kebangsaan dengan berbagai bentuk prilaku dan pergerakan yang dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Dapat disaksikan baik lewat media cetak maupun media elektronik seperti tawuran, narkoba, sex bebas, pornografi dan lebih memilukan lagi mencoreng dunia pendidikan adalah sorang mahasiswa melakukan kekerasan terhadap dosennya dan orang tua melakukan kekerasan terhadap guru sampai mengakibatkan kecedraan fisik terhadap guru tersebut. Panggilan peranan mahasiswa untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan suatu bela negara dengan meningkatkan kecerdasan dan kepedulian serta kepribadian dan akhlak mulia yang bermutu dan kompetitif dalam sistem nilai *Teologik, Etik, Estetik, Logik, Fisiologik, Teleologik*

Kata kunci : Strategi, Mahasiswa, Bela Negara, Sistem Nilai

### A. PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan tulang punggung negara dalam mengisi pembangunan untuk suatu perubahan bermutu dan kompetitif menuju pemantapan tridarma perguruan tinggi. Mahasiswa dilihat dari perkembangannya berada pada usia 18-20 tahun sebagian besar dengan ciri-ciri perkembangannya sebagaimana dikemukakan oleh Hurlock 1952 dalam Makmun (2000) termasuk usia masa remaja yakni antara 14-

21 tahun dan pada tahap ini hukum perkembangan perilaku dalam strategi pendidikan dan pembelajaran sebagaimana dikemukakan Makmun (2000) proses pembelajarannya pada tahap berpikir induktif dan deduktif, analisis dan sintesis, global dan spesifik. Para psikolog perkembangan pada umumnya sepakat bahwa masa muda memasuki masa dewasa antara usia 18-20 tahun dengan ditandai masa pubertas sebagai mana juga dijelaskan Upton (2012) terdapat tanda-tanda budaya, sosial, dan psikologis yang membantu menentukan peralihan kemasa dewasa.

Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tujuan pendidikan pada Bab II Pasal 2 Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 3 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini artinya tujuan pendidikan Nasional memberikan arah dan tuntunan yang akan dicapai agar menjadi mahasiswa terdidik dan berpengetahuan global berkearifan lokal sejalan dengan apa yang dikemukakan. Mulyasana (2011) Tujuan pendidikan sebagai penuntun dan pembimbing serta petunjuk bagi arah para peserta didik (mahasiswa) agar dapat tumbuh dewasa sesuai potensi dan konsep diri yang sebenarnya, bersaing dan mempertahankan kehidupan dimasa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan serta *chous*.

Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal 1 ayat 6 Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Disini perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal menyelenggarakan proses pendidikan dalam rangka pembentukan karakter bela negara sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga negara melalui tranper nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya pada pasal 1 ayat 9. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



Sebagai perguruan tinggi mengembangkan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian untuk bela negara dalam sistem nilai-nilai (*teologis, Etis, Estetis, Fisik-Fisiologis, Logis dan Teleologis*)

Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab 1 pasal 1 ketentuan umum menyebutkan bahwa mahasiswa termasuk masyarakat akademik yakni "Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa" selanjutnya yang disebut "Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi". dan begitu pula pada Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 tentang KKNP (Kerangka Kerja Nasional Pendidikan) pendidikan S-1 kualifikasi pada level 6 yakni kualifikasi analisis. Dari berbagai aturan dan perundang-undangan tersebut diharapkan mahasiswa akan menjadikan agen perubahan (*agents of change*) untuk menuju Indonesia emas tahun 2045, dan mahasiswa melalui pendidikan tinggi akan terbentuk sumber daya manusia (*human capital*) sebagaimana dikemukakan Suharsaputra (2015) dapat dijelaskan bahwa pendidikan berpengaruh pada pembentukan sumber daya manusia yang bermutu dan kompetitif dari aspek kognitif, afektif dan keterampilan. Mahasiswa sebagai sumberdaya manusia (*human capital*) akan dapat memberikan warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermutu dan kompetitif dengan suatu sistem nilai sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2015) dapat dijelaskan pendidikan dapat membangun masyarakat lebih maju.

Perkembangan dunia globalisasi melalui berbagai bentuk perubahan membawa kepada pergeseran nilai-nilai kebangsaan dengan berbagai bentuk perilaku dan pergerakan yang dapat mengancam ketahanan dan keutuhan bangsa. Ini dapat kita saksikan bersama baik lewat media cetak maupun media elektronik sekarang ini seperti tawuran, narkoba, sex bebas, pornografi dan lebih memilukan lagi yang mencoreng dunia pendidikan adalah sorang mahasiwa melakukan kekerasan terhadap dosennya dan akhir-akhir ini orang tua melakukan kekerasan terhadap guru sampai mengakibatkan kecedraan fisik terhadap guru. Dijelaskan Gafar dalam Alma (2008) globalisasi dengan kecepatan yang tinggi menyentuh semua aspek kehidupan manusia secara global dan juga menyentuh pendidikan dalam kontek mahasiswa sangat

strategis berperan untuk mengawal keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara dengan bela negara melalui empat dasar landasannya yakni Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, NKRI dan Bhinika Tunggal Ika

Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa mempunyai andil sangat besar terhadap ketahanan bangsa Indonesia dengan pergerakannya menentang berbagai ancaman dan tantangan terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa seperti pergerakan menentang partai komonis pada masa orde lama dan pada masa orde baru kembali memerankan peranannya dengan pergerakan reformasi dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya mahasiswa terus berjuang melalui pembelajaran di perguruan tinggi sebagai tempat menggali ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyongsong masa depan lebih baik bermutu dan kompetitif dengan capaian pembelajaran sesuai dengan prodi diminati dan dipilih dengan ketentuan sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk S-1 pada level 6 yakni level analisis.

Mahasiswa sebagai manusia punya pilihan untuk menentukan jalan pilihan kehidupannya antara menerima atau menolak, menyatakan ya atau tidak, membenarkan atau tidak, yang merupakan suatu keyakinan berdasarkan suatu pemikiran yang melahirkan suatu persepsi terhadap objek yang dimiliki dengan suatu sistem nilai sebagai mana dinyatakan Sanusi (2016) sistem nilai adalah merupakan gambaran bagaimana seorang berpikir bukan apa yang penting atau berharga. Dalam menentukan pilihan bagi mahasiswa untuk menyatakan ya atau tidak dalam sistem nilai yang menjadikan suatu pemikiran sebagaimana dikemukakan oleh Sanusi (2016) sistem nilai yaitu (1) nilai teologis (2) nilai etis (3) nilai estetis (4) nilai logis (5) nilai fisiologis (6) nilai teleologis.

Panggilan peranan mahasiswa untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa sangat diperlukan suatu bela negara dengan meningkatkan kecerdasan dan kepedulian serta kepribadian dan ahlak mulia yang bermutu dan kompetitif melalui pembelajaran di perguruan tinggi dengan pendekatan sistem *value teologik, etik, estetik, logik, fisiologik* dan *teleologik* yang merupakan pola berpikir dalam bela negara. Habib Luffi (2016) mengemukakan dalam pembukaan comprehensi tarikh sedunia di

Pekalongan menyatakan bahwa Bela Negara adalah wajib. Bagi mahasiswa sebagai sivitas akademika dari lembaga pendidikan tinggi memandang Bela Negara merupakan suatu sistem *value teologik, etik, estetik, logic, fisiologik dan teleologik*. Sehingga Bela Negara adalah "WAJIB" bagi setiap mahasiswa.

## B. MAHASISWA DAN BELA NEGARA DALAM SISTEM NILAI

Mahasiswa sebagai insan yang Berketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu dari sistem nilai yaitu nilai teologis memiliki pemikiran bahwa Bela Negara dalam menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa yang terimplementasi kedalam prilakunya adalah suatu kewajiban. Dalam konteks teologis inilah mahasiswa melakukan untuk mengetahui melalui proses pembelajaran di dalam atau di luar ruang kuliah agar dapat mengetahui yang selanjutnya menjadi merasakan dan menimbulkan kehendak untuk berperilaku sebagaimana dikemukakan Sanusi (2016) pada nilai keyakinan yang pertama dilakukan adalah mengetahui untuk tahu dan merasakan serta kehendak dengan tingkatan "kepercayaan, Berharap, Berdo'a, Percaya, Yakin" dengan makna "gaya, Laga, Karakter, Kepribadian, Jati diri". Inilah pengetahuan yang diketahuinya yang diwujudkan dalam perilaku diyakini.

Prilaku mahasiswa dilihat dari sudut pandang *psikoedukasi* melalui proses pembelajaran dan pembimbingan untuk Bela Negara menuju pematapan tridarma perguruan tinggi, baik proses pembelajaran dengan target capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah maupun target capaian pengembangan dirinya melalui bimbingan dan konseling dengan memposisikan dalam sistem nilai sebagaimana dikemukakan Sanusi (2016) yaitu: mencatat, tahu, mengerti dan paham. Untuk memperkuat perilaku mahasiswa dalam Bela Negara sebagai suatu cerminan karakter jati diri bangsa Indonesia dengan sistem nilai *teologik, etik, estetik, logic, fisiologik dan teleologik* maka "Mahasiswa wajib tahu Bela Negara, Mahasiswa wajib mengerti Bela Negara, Mahasiswa wajib paham Bela Negara" sesuai dengan peran dan fungsi mahasiswa masing-masing dalam keberagaman, kesatuan yang tunggal bangsa Indonesia yang berketer sebagai jati diri bangsa sebagai pematapan tridarma perguruan tinggi.

## 1. Mahasiswa dan Empat Dasar

Mahasiswa adalah suatu sebutan bagi seseorang yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi seperti di Universitas, Sekolah Tinggi, Akademi. Menurut dalam Undang-Undang RI no 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 13 bahwa "Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuan, praktisi, dan/atau professional" Dilihat dari usia perkembangan mahasiswa berusia antara 18-20 tahun dan usia ini dari usia perkembangan menurut kesepakatan psikolog termasuk anak muda memasuki usia dewasa ( Upton (2012:2016) yaitu usia anatar 18-20 tahun sejalan dengan Hurlock (2002: 246) mengemukakan usia 18 tahun dianggap dewasa secara syah seiring dengan bertambah lamanya hidup atau bertambah panjangnya usia manusia. Mahasiswa yang berusia mulai dari usia 18 tahun menuju kedewasaan dan memasuki perguruan tinggi merupakan jalur yang tepat untuk menuju suatu kedewasaan sebagaimana dikemukakan Papalia (2009:153) menjelaskan perguruan tinggi merupakan suatu jalur menuju kedewasaan sebagai suatu pilihan. Mahasiswa dengan kehidupan kampusnya bergelut dengan keilmuan yang diminati dan tekuni dengan bebas menentukan kehidupan akademiknya dikampus dengan penuh tanggungjawab dan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara, juga dengan nilai kehidupan kampus yang bermoral sehingga menjadi sosok insan yang berkepribadian luhur serta memiliki jiwa yang utuh untuk suatu perubahan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bahkan mahasiswa dengan berpikir kritisnya menciptakan suatu tatanan kehidupan yang terkontrol baik, serta kritis terhadap ketidak nyamanan, ketidak selarasan, ketidak konsestenan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, birokrasi, bangsa dan negara sebagai hasil dari keaktifannya dalam mengembangkan potensinya dengan melalui pembelajaran dan pembimbingan dan pencarian ilmiahnya sebagaimana dijelaskan dalam UU RI No 12 tahun 2012 bahwa "Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan dan

pengamalan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmunan, intelektual, praktisi, dan/atau professional yang berbudaya”.

Kampus merupakan suatu wadah tempat mahasiswa menuntut dan mengkaji berbagai disiplin ilmu dengan kebebasan akademik sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang RI no 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 13 “Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik” dan mahasiswa berpikir kritis yang bermanfaat dan memiliki kepribadian serta moral yang utuh sebagai anak bangsa unggul dan kompetitif dalam membangun pribadinya, masyarakat, bangsa dan negara di tengah tengah modernisasi dan globalisasi yang merupakan modal sumber daya manusia (*human capital*) sebagaimana dikemukakan Suharsaputra (2015:139) dapat dijelaskan bahwa modal sumber daya manusia (*human capital*) sebagai posisi utama dalam suatu pergerakan menjadi bagian terpenting.

Negara Republik Indonesia yang biasa dikenal dengan RI merupakan suatu negara berdaulat atas wilayahnya yang terdiri dari beberapa ribu pulau dengan berbagai suku, adat istiadat dan agama yang beragam namun tetap utuh dalam bingkai kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan empat dasar sebagaimana di kemukakan Drs. Nurdin Ady. M.Psi. dari Lemhanas yaitu Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Empat dasar bagi mahasiswa merupakan harga mati yang wajib dibela, dipertahankan dan dikawal dari tantangan, hambatan dan acaman yang datangnya baik dari dalam maupun dari luar sebagai suatu jiwa dengan sistem nilai *teologik, etik, estetik, logik, fisiologik, teleologik* dalam bela negara sejalan dengan kewajiban mahasiswa sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 menyebutkan warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Begitu pula dalam Undang-Undang RI no 12 tahun 2012 bahwa” Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridarma dan pengembangan budaya akademik”



Gambar 1: Mahasiswa dan Empat Dasar

## 2. Mahasiswa dan Ketahanan Nasional

Bangsa Indonesia terdiri dari kepulauan dengan suku, adat dan istiadat, budaya dan agama yang beragam merupakan suatu kekuatan yang sangat berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu negara yang besar unggul dan kompetitif di era globalisasi dan modernisasi sebagai modal dasar (*basic capital*) dalam meningkatkan dan mempertahankan ketahanan dan kesatuan bangsa sebagaimana dikemukakan Wahidin (2012:111) dapat dimaknai potensi yang dimiliki dapat diberdayakan untuk *balance* dalam mengimbangi suatu perubahan. Terkenalnya Bangsa Indonesia dengan kemajemukan tercermin pada ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dan terdapat pada simbol burung garuda dengan simbol dari beberapa sila dalam dasar negara Pancasila sebagaimana diungkapkan Ubaedillah (2013:53) dapat dimaknai bahwa simbol burung garuda dengan simbol sila-sila dari Pancasila merupakan kemajemukan bangsa Indonesia dari perpaduan sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama dan bahasa.

Dalam mewujudkan suatu potensi negara dan bangsa sangat dibutuhkan suatu ketahanan dan keutuhan bangsa yang kuat dan mampu menghadapi segala ancaman, hambatan dan tantangan baik datang dari luar maupun dari dalam untuk menjadi suatu negara dan bangsa yang unggul dan kompetitif melalui bela negara yang harus dibangun dan ditanamkan kepada mahasiswa dan masyarakat Indonesia sebagaimana dapat dijelaskan Wahidin (2012:124) dalam mewujudkan kesatuan dan persatuan

Indonesia yang utuh dan integral diperlukan suatu kekuatan yang unggul dan kompetitif yang dapat memberikan daya tangkal (*deterent*) yang berwibawa dan dihormati sekaligus sebagai pemantapan tridarma perguruan tinggi.



Gambar 2. Mahasiswa dan Ketahanan Nasional

### 3. Mahasiswa dan Pergerakan

Mahasiswa dalam suatu pergerakan telah memberikan andil yang cukup besar terhadap bangsa dan negara dalam mempertahankan dan membela negara dan bangsa dengan berbagai ancaman, hambatan, dan tantangan terus berkontribusi sebagai mana menentang komonis pada era orde lama, begitu pula pada era orde baru dengan gerakan reformasinya dan sekarang serta kedepannya pergerakan tersebut dilakukan dengan meningkatkan keunggulan dan daya saing mahasiswa untuk kemajuan bangsa dan negara ditengah-tengah persaingan dan kompetitif dari kuatnya arus dan gelombang modernisasi dan globalisasi disamping yang positif namun juga tidak bisa dipungkiri ada efek dari kuatnya arus modernisasi dan arus globalisasi sebagaimana munculnya kebebasan sex, pergaulan bebas, narkoba, tawuran antar anak bangsa dan antar suku, ISIS, kekerasan mahasiswa dengan dosen, kekerasan orang tua terhadap guru dan ini tidak bisa dibiarkan berkembang, dan sangat penting untuk ditangkal dan dihidari agar bangsa dan negara tidak terpuruk dari segi moral dan karakternya. Dalam menjaga dan membela negara dan bangsa yang kuat ketua PBNU KH Said Aqil Siradj pada Liputan6.com, Jakarta (2015) dapat dimaknai Indonesia memerlukan kegiatan bela negara demi mencegah berkembangnya paham terorisme dengan kegiatan memperdalam wawasan kebangsaan seluruh warga negara yang berguna untuk menyaring paham ISIS.

Untuk mempertahankan dan mengawal empat dasar yakni Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhinneka Tugal Ika dan NKRI bagi seorang mahasiswa sebagai seorang yang dewasa dan memiliki intelektual yang baik serta terdidik dan terpelajar dengan idealisnya yang tinggi dan penuh semangat untuk suatu perubahan sehingga mahasiswa memiliki peran sangat strategis dalam melakukan suatu perubahan untuk bangsa dan negara yang unggul dan kompetitif di era modernisasi dan globalisasi dengan sistem nilai sejalan dengan Taniredja (2014:119) dapat dimaknai nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan civitas akademik kampus dengan tempat ibadah, dikembangkan rasa persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban dan dikembangkannya cinta tanah air dan bangsa serta bangga sebagai bangsa Indonesia, berkembangnya nilai demokratisasi kampus.

Dalam suatu teori pergerakan social sebagaimana dikemukakan Zald dalam Situmorang (2007:41) dapat dijelaskan bahwa dengan teori *frame process* mengemukakan dimana keluhan dan ketidakadilan membentuk dan tersusun *frame* sehingga terjadi aksi kolektif yang memungkinkan. Mahasiswa dalam usaha dan ihtiar untuk kemajuan bangsa dan negara sebagai penggerak terhadap suatu perubahan dengan jiwa dan semangat bela negara ditengah-tengah pergerakan arus globalisasi dan modernisasi perlu dibentuk di susun pada suatu *frem* dengan semangat bela negara dan pemantapan tri darma perguruan tinggi melalui pergerakan sebagai :

### **1. Change Force**

Mahasiswa sebagai sumberdaya manusia memiliki semangat tinggi dan pikiran kritis dalam sistem nilai untuk suatu pergerakan perubahan sebagai insan intelektual selalu bergelut dengan ilmu pengetahuan menjadikan suatu perubahan kehidupan yang nyata dan bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat, bangsa dan negara.

### **2. Social Force**



Mahasiswa mampu melakukan sosial kontrol terhadap ketidak ramahan dan ketidak nyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu kehidupan dimasyarakat kampusnya, masyarakat kritis, masyarakat birokrasi dalam sistem nilai dengan pergerakan mahasiswa sebagai *sosial force* akan memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakat umumnya , bangsa dan negaranya.

3. **Value Force**

Mahasiswa dengan memiliki sistem nilai yang baik menunjukkan suatu sampel pergerakan kehidupan yang bermoral baik dengan kehidupan kampusnya untuk bebas menentukan dengan tanggungjawab terhadap dirinya, masyarakat kampusnya, masyarakat umumnya, bangsa dan negara.

4. **Driver Force**

Mahasiswa dengan kemampuan intelektualnya yang masih murni dengan landasan keilmuan yang digelutinya akan menjadi sebagai penggerak dan pelopor pembangunan untuk masyarakat, bangsa dan negara yang lebih unggul dan kompetitif di era globaliasi dan moderniasi dalam suatu sistem nilai.



Gambar 3. Mahasiswa dan Pergerakan

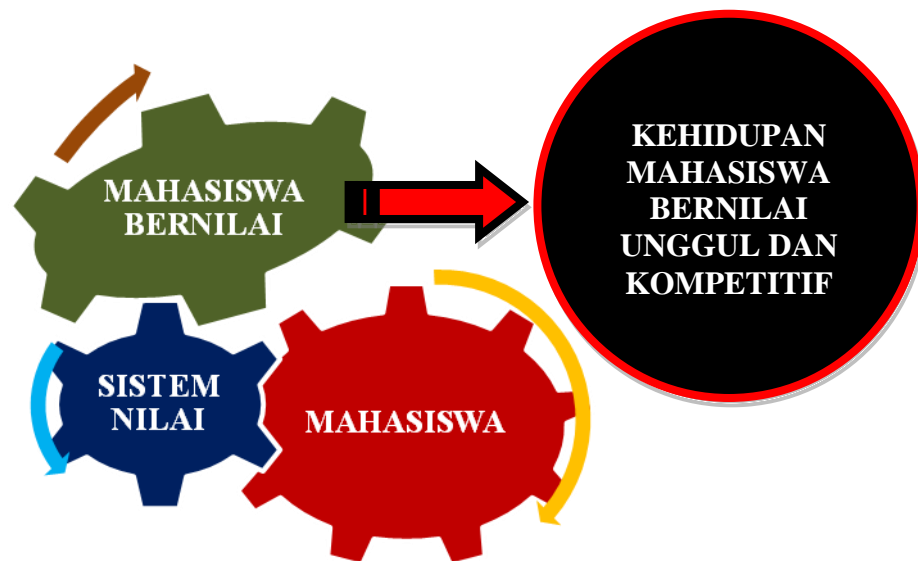
4. Bela Negara Dalam Sistem Nilai

Bela Negara bagi bangsa Indonesia merupakan suatu kewajiban setiap warga negara dan masyarakat Indonesia bahkan setiap negara dan setiap bangsa di dunia dengan negaranya masing-masing wajib bela negaranya. Bela Negara merupakan suatu kepentingan dalam mempertahankan eksistensi negara dalam arti sebagai suatu usaha dan ihtiar untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, moral, sosial maupun ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan sejalan dalam Wikipedia menjelaskan bahwa Bela Negara adalah suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang *patriotisme* seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut.

([https://id.wikipedia.org/wiki/Bela\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara). 19 September 2016 ) lebih tegas lagi Habib Lufi dari Pekalongan dalam convensi internasional tarikh sedunia di Pekalongan Jawa Tengah menegaskan bahwa bela negara adalah wajib setiap warga negara Indonesia. Dalam Bela Negara bagi mahasiswa dalam kehidupan akademik di kampus penuh dan syarat dengan nilai, baik itu nilai moral, kebenaran, tanggung jawab dan keilmuan serta keilmiahan dan penalaran sebagai hasil proses berpikir yang dilahirkan dalam pola tingkah laku dalam kehidupan akademik sejalan dengan Sanusi (2016:86)) nilai mendorong manusia bertindak atau menetapkan tujuan yang mau dicapai manusia dalam bidang apapun termasuk dalam kehidupan di kampus, nilai merupakan suatu pernyataan dari hasil proses berpikir sebagaimana dijelaskan Sanusi (2016:87) nilai merupakan sesuatu yang dipandang sebagai motivasi dan orientasi yang tetap dan serupa untuk menghadapi suatu situasi.

Nilai-nilai dalam kehidupan kampus yang bernilai telah terkadung dan saling keterkaitan antara satu nilai dengan nilai lainnya dalam sistem nilai, dimana nilai dalam suatu sistem nilai semua dilakukan yang terkadang meperiotaskan satu nilai dengan tanpa mengabaikan nilai yang lainnya sebagaimana Mulyana (2004:8) dapat dijelaskan sistem nilai merupakan sekelompok nilai yang saling berkaitan satu dengan nilai dengan nilai lainnya dalam sebuah sistem yang menguatkan dan tidak terpisahkan. Adapun nilai-nilai dalam sistem nilai kehidupan kampus yang bernilai itu adalah sebagaimana dikemukakan Sanusi (2016: 94) yaitu: *teologik, etik, estetik,*

*logic, fisiologik, teleologik.* Bela Negara merupakan suatu kewajiban mahasiswa yang mengandung nilai *Patrioisme* dan *Nasionalisme* dalam Sistem Nilai kehidupan kampus yang bernilai dengan nilai-nilai *telogik, etik, estitik, logic, fisiologik, teleologik.* Sehiungga bela negara merupakan bagian tak terpisahkan dari tri darma perguruan tinggi



Gambar 4: Bela Negara dan Dalam Sistem Nilai

### C. STRATEGI MAHASISWA BELA NEGARA DALAM MEMANTAPKAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Perkembangan dunia moderenisasi dan globalisasi membawa kepada suatu perubahan kehidupan manusia termasuk kehidupan mahasiswa di kampus dan perubahan ini terus berlaku dan bergulir sebagaimana bumi berputar bola bergulir. Perubahan terus berlanjut karena setiap kehidupan manusia atau mahasiswa dikampus terus berubah bahkan yang tidak berubah hanyalah perubahan itu sendiri. Perubahan mahasiswa tentunya melalui suatu strategi yang efektif, efisien, kreatif, produktif, output dan outcamesnya bernilai dalam suatu sistem nilai *teoloik, etk, etitik, logic, fisiologik, teleologik* sehingga menjadikan suatu kehidupan mahasiswa dikampus yang bernilai.

Beberapa efek dari kehidupan modernisasi dan globalisasi sebagaimana dikemukakan Nurihsan (2012:87) dapat dimaknai yakni: a) kekerasan hidup yang semakin meningkat dengan masuknya budaya kekerasan, pornografi, dan pornoaksi, b) pelanggaran rambu-rambu lalu lintas di jalan raya dengan alasan kebebasan, c) ambisi yang berlebihan dengan munculnya kompleks dan permusuhan di masyarakat dengan, d) ada kecenderungan kehidupan melalui jalan pintas seperti korupsi, kolusi, nepotisme, sex bebas, penggunaan narkoba (narkotik dan zat adiktif). Semua dampak negatif dari modernisasi dan globalisasi merupakan perilaku yang merusak dan merupakan ancaman, hambatan dan tantangan bagi mahasiswa untuk bergerak dengan keimanan, kebaikan dan kebenaran, keindahan, kemampuan tenaga dan imajinasinya menghindari dan menangkal serta mencegah dengan kewajiban bela negara dengan sistem nilai *teologik, etik, estetis, logik, fisikalistik, teleologik* menuju kehidupan mahasiswa yang bernilai.

Dalam sistem kehidupan mahasiswa sebagai manusia memiliki potensi yang mengalami perubahan baik secara pribadi, dalam keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan kampusnya bahkan bangsa dan negara sejalan dengan dikemukakan Sanusi (2016:79) dapat dijelaskan bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan baik pada tingkat pribadi, komunitas maupun global. Mahasiswa sebagai manusia dalam *role life system (RLS)* yang *organik* bukan *mekanis* tentunya akan terjadi perubahan, pertumbuhan dan perkembangan begitulah mahasiswa dalam kehidupan kampusnya, maka bagi mahasiswa harus memahami sistem kehidupan sejalan dengan yang dikemukakan Sanusi (2016:82) bahwa sistem kehidupan merupakan *role life system (RLS)* yang mengalami perubahan dan pertumbuhan serta perkembangan. Disamping memahami perubahan kehidupan seorang mahasiswa juga harus mengetahui kekuatan pergerakan karena ada kemungkinan perubahan dan pergerakan itu hanya sekedar hiasan dan ada juga perubahan dan pergerakan itu benar-benar *esensial* dan *filosofis-ideologis* yang memurnikan, menyatukan, serta menambah keindahan dan kebaikan serta meningkatkan nilai *spiritual*.

Perubahan dan pergerakan modernisasi dan globalisasi patut dipahami dan disadari mahasiswa sebagai *role life system* yang terus berubah dan bergerak, maka

untuk itu mahasiswa wajib bela negara untuk menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara dalam sistem nilai *teologik, etik, estetik, logic, fisiologik, teleologik* agar kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara bernilai sebagai jati diri.

Strategi mahasiswa dalam bela negara dengan sistem nilai *teologik, etik, estetik, logic, fisiologik dan teleologik* dengan pendekatan teori *idealisme* atau *pereneliasme* sebagaimana dikemukakan Sanusi (2016:98) dapat dimaknai yakni :

1. Peluang dan Kemungkinan, Untuk berbuat mahasiswa tentunya ada peluang untuk memikirkan, menimbang dalam menetapkan pilihan atau menolaknya karena tidak sesuai dengan nilai dalam sistem nilai
2. Kebutuhan, Dalam kehidupan bermacam-macam kebutuhan baik yang primer maupun sekunder, namun dalam memenuhi kebutuhan kehidupan perlu suatu kesadaran nilai dalam sistem nilai
3. Penciptaan, Dalam sistem penciptaan ada hukum perubahan karena diciptakan, maka setiap manusia yang diciptakan akan mengalami perubahan atau biasa disebut "baharu alam" merupakan suatu nilai dalam sistem nilai
4. Kemanusiaan, Dalam setiap diri manusia ada potensi akan kesadaran diri dan berpikir, merasa, menilai sehingga potensi ini terus membawa pada konsekuensi akan adanya perubahan sebagai suatu nilai dalam sistem nilai. Potensi kesadaran diri dan potensi berpikir manusia dikaitkan dengan perkembangan dan pembangunan akan menjadikan potensi untuk memajukan diri yang bertanggungjawab, dan memelihara lingkungan yang ramah serta bela negara.

Model Strategi bagi mahasiswa dalam bela negara ada dua pendekatan yaitu pendekatan *resources* dan *market*. Pendekatan *resource* merupakan suatu strategi dengan memberdayakan potensi internal agar menjadi efektif, efisien, dan kreatif, produktif, output dan outcome untuk menjadi bermutu kehidupan mahasiswa yang dapat dikatakan menjadi kehidupan yang bernilai sebagai pemantapan tridarma perguruan tinggi. Sedangkan pendekatan *market* merupakan suatu strategi dengan berorientasi kepada luaran dihasilkan dari perilaku mahasiswa yang mampu

berkompetitif untuk menjadikan kehidupan mahasiswa bernilai sejalan dengan Agus Rahayu dalam Alma (2008:64) mengemukakan model strategi yang dapat dijelaskan bahwa strategi dalam mencapai suatu tujuan adalah model strategi *resource-based* yakni lingkungan internal merupakan input utama dan penentu dalam suatu strategi dan *market-based* yakni karakteristik lingkungan eksternal merupakan input utama dalam penentuan strategi dalam pemantapan tridarma perguruan tinggi

Strategi mahasiswa dalam bela negara dengan menyatukan pendekatan dilakukan menjadi pendekatan *integrated* akan mampu secara *internal* diri mahasiswa dalam kehidupannya efektif, efisien, kreatif, produktif, output dan out comes dengan kata lain kehidupan yang bermutu dan bernilai dalam suatu sistem nilai dan secara *eksternal* diri mahasiswa dalam kehidupan mampu berkompetitif dalam kehidupan penuh dengan persaingan dan *chous* menjadi bernilai dalam sistem nilai dalam pemantapan tridarma perguruan tinggi. Kedua model strategi tersebut menjadi satu dengan model strategi *integrated-based* yang bernilai dalam sistem nilai sebagai jati diri menuju pemantapan tridarma perguruan tinggi.



Gambar 5: Strategi Mahasiswa Dalam Bela Negara dan Sistem Nilai

#### D. KESIMPULAN

1. Mahasiswa sebagai insan akademik dalam *role life system* kehidupan memiliki potensi tumbuh dan berkembang kearah perkembangan dan

perubahan kehidupan bernilai dalam sistem nilai *teologik, etik, estetik, logic, fisiologik, teleologik*.

2. Strategi mahasiswa dalam Bela Negara dengan sistem nilai melalui pendekatan *integrated-based* dengan pemberdayaan potensi diri menjadi *efektif, efisien, kreatif, produktif, output dan outcomes* dan peningkatan kompetensi diri untuk mampu bersaing dalam persaingan yang kompetitif dengan sistem nilai *teologik, etik, estetik, logic, fisiologik, teleologik* menjadi kehidupan yang bernilai sebagai jati diri menuju pematangan tridarma perguruan tinggi

#### E. REFERENSI

- Alma, Buchari. Nurriyati, Ratih (2008) *Manajemen Corporate & Strategi Pemasaran Jasa Pendidikan*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- <http://news.liputan6.com/read/2371664/ketum-pbnu-bela-negara-bisa-kikis-terorisme>.  
19 September 2016
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Bela\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara). 19 September 2016
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Bela\\_negara](https://id.wikipedia.org/wiki/Bela_negara). 19 September 2016
- Hurlock, Elizabeth B (1980) *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jarkarta: Erlangga
- Makmun, Abin Syamsudin (2000) *Psikologi Kependidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasana, Dedy (2011) *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Mulyasana, Rohmat (2004) *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta
- Sanusi, Achmad (2016) *Sistem Nilai*. Bandung: Nuansa Cendikia
- (2016) *Pendidikan Untuk Kearifan Mempertimbangkan Kembali Sistem Nilai, Belajar, dan Kecerdasan*. Bandung: Penerbit Nuansa
- (2016) *Pendidikan Untuk Kearifan Mempertimbangkan Kembali Sistem Nilai, Belajar, dan Kecerdasan*. Bandung: Penerbit Nuansa

- Situmorang, Abdul Wahid (2016) *Gerakan Sosial Teori dan Praktek*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar
- Suharsaputra, Uhar ( 2015) *Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi*. Bandung:  
Refika Aditama
- Taniredja, Tukiran. Afandi, Muhammad. Fariadi, Miftah (2014) *Paradigma Baru  
Pendidikan Pancasila Untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H.A.R (2015) *Pedagogik Teoritis Untuk Indonesia*. Jakarta: Kompas Media  
Nusantara
- Ubaedillah, A. Rozak Abdul (2013) *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat  
Madani*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Upton, Penney (2012) *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga
- Wahidin, Samsul (2012) *Pokok-Pokok Pendidikan Kewarganegaraan* . Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar



## **PENGARUH KEDISIPLINAN MAHASISWA DAN MOTIVASI BELAJAR MAHASISWA TERHADAP TRIDARMA PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI XXX DI JAKARTA PUSAT**

**Khasanah**

Program Studi Sistem Informasi, STMIK Indonesia Jakarta  
na21\_na12@yahoo.com

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar yang dimiliki mahasiswa dengan tridarma perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah survey dengan analisis korelasi dan regresi. Data tentang kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa serta tridarma perguruan tinggi diperoleh melalui angket yang disusun oleh peneliti, yaitu yang mengukur hal-hal yang berkaitan dengan tiga hal di atas. Dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yang sangat erat sehingga terdapat pengaruh yang signifikan kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa secara bersama-sama terhadap tridarma perguruan tinggi, terdapat pengaruh yang signifikan kedisiplinan mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi, terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi.*

**Kata Kunci :** Kedisiplinan Mahasiswa, Motivasi Belajar Mahasiswa, Tridarma Perguruan Tinggi

### **1. PENDAHULUAN**

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat atau latihan bagi peranannya dimasa yang akan datang. Sehingga dalam pengembangan tugasnya dosen (pendidik) dituntut dapat mendidik, mengajar dan melatih agar penugasan konsep lebih tertanam.

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh perubahan dan pembaharuan dalam segala unsur-unsur yang mendukung. Semua unsur tersebut saling terkait dalam memperkuat tercapainya tujuan pendidikan.

Perkembangan dunia pendidikan dari tahun ke tahun mengalami perubahan seiring dengan tantangan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas

dan mampu bersaing di era global. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kita adalah masih rendahnya kualitas pada setiap jenjang.

Banyak hal yang telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualitas dosen (pendidik), penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian mutu pendidikan yang dicapai belum seperti yang diharapkan. Perbaikan yang dilakukan pemerintah tidak akan ada artinya jika tanpa dukungan dari dosen, orangtua, mahasiswa dan masyarakat. Berbicara tentang mutu pendidikan tidak akan lepas dengan proses belajar mengajar, dimana dalam proses belajar mengajar dosen harus mampu menjalankan tugas dan peranannya.

Dalam proses belajar mengajar disiplin terhadap tata tertib sangat penting diterapkan, karena jika di suatu perguruan tinggi tidak memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan sesuai rencana.

Guna terciptanya disiplin yang harmonis dalam terciptanya disiplin dari mahasiswa dalam rangka pelaksanaan peraturan dan tata tertib yang baik, maka di dalam suatu lembaga pendidikan perlu menetapkan sikap disiplin pada mahasiswa agar terciptanya proses belajar mengajar yang baik.

Menciptakan kedisiplinan mahasiswa bertujuan untuk mendidik mahasiswa agar mampu memerintahkan diri sendiri. Mereka dilatih untuk dapat menguasai kemampuan, juga melatih mahasiswa agar ia dapat mengatur dirinya sendiri, sehingga mahasiswa dapat mengerti kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya.

Keberhasilan mahasiswa dalam belajar dipengaruhi oleh cara belajarnya. Mahasiswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau presentasi yang lebih tinggi dari pada mahasiswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. Untuk belajar yang efektif dan efisien diperlukan kesadaran disiplin dan motivasi belajar yang tinggi pada setiap mahasiswa. Belajar efektif dan efisien dapat dilakukan oleh mahasiswa yang berdisiplin dan cara belajar yang tepat baginya. Jadi langkah pertama yang harus dimiliki agar dapat belajar efektif dan

efisien adalah kesadaran atau tanggung jawab pribadi dan keyakinan bahwa belajar adalah untuk kepentingan diri sendiri, dilakukan sendiri dan tidak menggantungkan nasib pada orang lain.

Para mahasiswa tidak ingin hidup dalam dunia yang kacau, alih-alih buku dan artikel-artikel, surat kabar dan program tv yang memberitakan bahwa anak-anak zaman sekarang apatis, lemah dalam belajar dan penelitainm terlambat berkembang secara mental, tidak mau atau tidak dapat memperhatikan, mustahil untuk diajarkan atau didisiplinkan. Disiplin positif adalah kunci keberhasilan mahasiswa, dengan begitu dapat mengatasi ketakutan siswa, menciptakan ketenangan dan ketertiban dalam pendidikan. Mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka dan keingintahuan dan antusiasme belajar mereka akan kembali.[1]

Adapun macam-macam disiplin berdasarkan ruang lingkupnya berlakunya ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi, dapat dibedakan sebagai berikut : a. Disiplin Diri, yaitu apabila peraturan atau ketentuan hanya berlaku bagi diri sendiri. Disiplin ini hanya dilakukan personal yang mengikat dirinya sendiri, sseperti : disiplin belajar, bekerja dan beribadah.; b. Disiplin Sosial, yaitu apabila ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan itu harus dipatuhi oleh orang banyak atau masyarakat, seperti : disiplin lalu lintas, disiplin menghadiri rapat.; c. Disiplin Nasional, merupakan kesadaran nasional akan tatanan masyarakat yang berlaku secara ketaatan pada peraturan perundangn. Memasyarakatkan kesadaran hukum merupakan salah satu upaya menegakkan disiplin nasional. Disamping ketaatan pada hukum dan perundangan dalam menegakkan disiplin nasional perlu juga dipahami tata krama dan adat istiadat yang lazim dalam masyarakat. Norma adat dan agama merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kesadaran berdisipin. [2]

Berdisiplin akan membuat seseorang mahasiswa memiliki kecakapan mengenai cara belajar yang baik, juga merupakan suatu proses ke arah pembentukan watak yang baik.

Untuk melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, maka dosen bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini staff perguruan tinggi atau dosen perlu terjalin

kerjasama sehingga tercipta disiplin dan tata tertib yang baik, tanpa adanya kerjasama tersebut dalam pembinaan disiplin perguruan tinggi maka akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib perguruan tinggi serta terciptanya suasana belajar yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu Subari [3] mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus dikembangkan dalam pembinaan disiplin dosen terlaksananya tata tertib dengan baik antara lain : a. Mengadakan perencanaan secara kooperatif dengan mahasiswa, yaitu demi terjaminnya hak dan kewajiban masing-masing dan demi tercapainya tujuan.; b. Mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab pada mahasiswa.; c. Membina organisasi dan prosedur kelas secara demokratis.; d. Mengorganisasi kegiatan kelompok besar maupun kecil.; e. Memberi kesempatan untuk berdiri sendiri, berfikir kritis temuan, mengemukakan dan menerima pendapat.; f. Memberi kesempatan untuk mengembangkan kepemimpinan dan kerjasama.; g. Menciptakan kesempatan untuk mengembangkan sikap yang diinginkan secara sosial psikologis.

Dengan demikian terciptanya disiplin yang harmonis dan terciptanya disiplin dari mahasiswa dalam rangka pelaksanaan peraturan dan tata tertib dengan baik, maka di dalam suatu lembaga atau lingkungan perguruan tinggi perlu menetapkan sikap disiplin terhadap mahasiswa, agar tercipta proses belajar mengajar yang baik, serta mahasiswa dapat melakukan penelitian serta mahasiswa dapat mengimplementasikannya dalam bentuk pengabdian masyarakat.

Selain kedisiplinan yang menjadi peranan penting yang harus dimiliki mahasiswa, maka motivasi belajar juga menjadi peranan penting yang harus dimiliki setiap mahasiswa.

Berbicara tentang motivasi, pasti akan berkaitan dengan kemampuan yang terkandung di dalam diri pribadi seseorang. Motivasi merupakan salah satu yang terpenting dalam rangka seseorang menjalankan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan diri. Ada banyak hal yang perlu dilakukan seseorang dalam rangka mengembangkan dirinya sendiri. Ada banyak hal yang harus dilakukan seseorang dalam rangka mengembangkan dirinya sendiri, namun bila semua usaha itu tidak

dilakukan dengan motivasi kuat, maka hasilnya pun tidak memuaskan sebagaimana yang diharapkan.

Selain itu motivasi juga merupakan aspek psikis yang memiliki pengaruh terhadap tercapainya prestasi belajar.

Motivasi merupakan segala sesuatu yang mendorong seseorang bertindak melakukan sesuatu. [4]. Selanjutnya motivasi juga merupakan suatu keadaan dalam diri pribadi seseorang yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan. [5]. Motivasi menjadi hal terpenting sesuatu yang menjadi pendorong tingkah laku individu sebagai sesuatu kebutuhan atau tujuan nyata yang ingin dicapai.

## 2. METODE PENELITIAN

Kedisiplinan erat kaitannya dengan kemampuan belajar mahasiswa pada perguruan tinggi dan juga dalam belajar. Kedisiplinan perguruan tinggi mencakup kedisiplinan dosen dalam mengajar dengan melaksanakan tata tertib, kedisiplinan dosen dalam melakukan penelitian, kedisiplinan dosen dalam mengimplementasikan ilmunya dalam masyarakat, kedisiplinan pegawai serta karyawan dalam pekerjaan administrasi dan kebersihan dan keteraturan kelas, gedung perguruan tinggi, halaman dan lain-lain, kedisiplinan ketua program studi, kedisiplinan pimpinan perguruan tinggi dalam mengelola staff beserta mahasiswanya dan kedisiplinan bagian akademik dalam pelayanan kepada mahasiswa.

Seluruh staf perguruan tinggi yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan disiplin membuat mahasiswa disiplin pula, selain itu memberi pengaruh yang positif terhadap pembelajaran yang berlangsung. Banyak perguruan tinggi yang dalam pelaksanaan disiplinnya kurang sehingga mempengaruhi sikap mahasiswa dalam belajar. Kurang bertanggung jawab sebab bila tidak melaksanakan tugas tetap tidak ada sangsi. Hal apapun yang dilakukan dalam proses belajar maka mahasiswa perlu disiplin untuk membangkitkan motivasi yang kuat.

Teknik-teknik kedisiplinan yang didesain untuk membuat mahasiswa berfikir tentang perilaku mereka, bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan,

memahami akibat-akibat perilaku mereka terhadap mahasiswa-mahasiswa lain, memecahkan masalah mereka, dan belajar bagaimana membuat pelajaran-pelajaran yang lebih baik.

Seseorang dikatakan berhasil dalam belajar, apabila di dalam dirinya ada keinginan untuk belajar, sebab tanpa mengerti apa yang akan dipelajari dan tidak memahami mengapa hal tersebut perlu dipelajari, maka kegiatan belajar mengajar sulit untuk mencapai keberhasilan. Keinginan atau dorongan disebut sebagai motivasi.

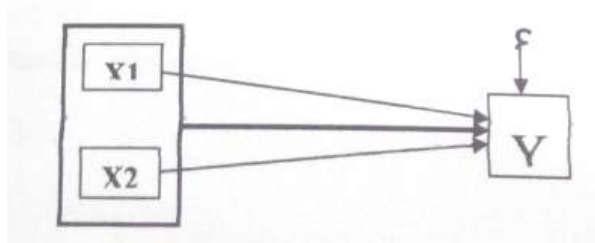
Disiplin dan motivasi adalah potret keberhasilan seorang dari mengelola lembaga perguruan tinggi atau sumber belajar. Dalam dunia pendidikan, sikap disiplin mahasiswa dan motivasi belajar diperlukan sebagai salah satu sarana pendukung tercapainya efisiensi tridarma perguruan tinggi, karena dengan disiplin mahasiswa dan motivasi belajar maka pembuangan waktu yang sia-sia akan terminimalisasi. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, sikap disiplin mahasiswa dan motivasi belajar juga haruslah dimiliki oleh komponen orang dalam perguruan tinggi untuk menunjang keberhasilan tridarma perguruan tinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa sampel seberapa besarkah kedisiplinan mahasiswa dan seberapa besar motivasi belajar mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi pada perguruan tinggi swasta XXX di Jakarta Pusat, yang berlokasi di Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Untuk membantu proses pengumpulan data, pada penelitian ini digunakan beberapa instrumen yaitu tes tertulis, pedoman wawancara, kuesioner. Tes tertulis merupakan soal tes yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi proses motivasi mahasiswa dan kedisiplinan mahasiswa. Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam proses wawancara agar topik pertanyaan tetap terfokus.

Dalam analisa korelasional, hal utama yang dianalisa adalah koefisien korelasi, yaitu bilangan yang menunjukkan derajat hubungan antara dua variabel yang mempunyai hubungan sebab akibat dan saling mengadakan perubahan.

Untuk itu maka teknik analisis pembuktian hipotesis tersebut digunakan teknik korelasional. Adapun model konstelasi hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 1** Konstelasi hubungan antar variabel penelitian

Keterangan :

Variable Bebas ( $X_1$ ) : Pengaruh Kedisiplinan Mahasiswa

Variabel Bebas ( $X_2$ ) : Motivasi Belajar Mahasiswa

Variabel Terikat (Y) : Tridarma Perguruan Tinggi

$\epsilon$  : Variabel lain yang tidak di teliti

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.775 <sup>a</sup>	.600	.578	7.729

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3314.653	2	1657.326	27.746	.000 <sup>b</sup>
	Residual	2210.122	37	59.733		
	Total	5524.775	39			

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.165	10.377		1.365	.180
	Persepsi Dosen Atas Kepemimpinan Ketua Program Studi	.236	.062	.452	3.808	.001
	Motivasi Mengajar	.325	.086	.448	3.772	.001

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa secara bersama-sama terhadap tridarma perguruan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $F_o = 27,746$  dan  $Sig = 0,000 < 0,05$
2. Terdapat pengaruh yang signifikan pengaruh kedisiplinan mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_o = 3,808$  dan  $Sig. = 0,001 < 0,05$
3. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai  $t_o = 3,772$  dan  $Sig. = 0,001 < 0,05$

### 4. KESIMPULAN

Dari penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan :

- a. Terdapat pengaruh yang signifikan kedisiplinan mahasiswa dan motivasi belajar mahasiswa secara bersama-sama terhadap tridarma perguruan tinggi.
- b. Terdapat pengaruh yang signifikan kedisiplinan mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi.
- c. Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi belajar mahasiswa terhadap tridarma perguruan tinggi.

## 5. REFERENSI

- Gle, The Liang. 1995. *Cara Belajar Yang Efisien*. Yogya : Liberti Yogya.
- Chairul Rochman dan Edi Warsidi, 2011. *Membangun Disiplin Dalam Mendidik*. Bandung : Putra Setia.
- Subari. 1994. *Supervise Pendidikan Dalam Rangka Perbaikan Situasi Belajar*. Jakarta : Bima Aksara.
- M Ngalim Purwanto. 2000. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumardi Suryobrata. 2001. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamalik Damai. 2005. *Metode Belajar Dengan Kesulitan-Kesulitan Belajar*. Bandung : Tarsito.
- Mas'udi.Asy. 2000. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogya : PT. Tiga Serangkai.
- Rasyid Dimas Muhammad. 2005. *20 Langkah Saleh Dalam Mendidik Anak*. Bandung : Syaamil Cipta Mulia.
- Silberman, Melvin L, 2007. *Active Learning :101 Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogya : Pustaka Irsani Madani.
- Soemanto, Wasty. 1990. *Psikologi Pendidikan, Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.



**PENDIDIKAN POLA ASRAMA SEBAGAI ALTERNATIF  
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TRIDARMA  
PERGURUAN TINGGI DI JAKARTA**  
Sebuah Studi Kasus di Propinsi Papua Sebagai Daerah Khusus

**Dr. Margaretha Rumbekwan<sup>36</sup>**

*Abstrak*

Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah manusia dan lingkungannya kearah yang lebih baik. Guna mencapai tujuan dimaksud bentuk-bentuk pendidikan dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum pola pendidikan dilakukan diluar asrama, dimana pendidik utama adalah keluarga, masyarakat dan sekolah formal. Disisi lain, pada masyarakat tradisional dan khas membutuhkan pola pendidikan yang bersifat khusus untuk mengubah perilaku setiap individu dalam sistem sosial yang ketat menjadi lebih longgar dan modern. Pendidikan umum biasanya efektif dilakukan pada masyarakat yang telah maju seperti wilayah Jakarta dan sekitarnya. Namun pola pendidikan alternatif seperti sekolah berasrama (*boarding school*) menjadi pilihan yang lebih adaptif pada masyarakat tertentu guna mengubah pola pikir dan pola tindak sebagaimana masyarakat di Provinsi Papua. Tulisan singkat ini bermaksud mendeskripsikan pola pendekatan pendidikan yang lebih sesuai guna menjawab masalah yang dihadapi di wilayah Papua dibanding pendidikan umum di wilayah perkotaan seperti Jakarta.

---

Pendahuluan

Fenomena gunung es kembali terjadi di Indonesia. Setelah bangsa Indonesia gempar dengan munculnya fakta yang mengklaim bahwa generasi muda mengalami degradasi moral lewat narkoba dan kasus aborsi yang semakin banyak pertahun,<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Dosen tetap pada Program Studi Pendidikan Profesi Kepamongprajaan IPDN Cilandak Jakarta.

<sup>37</sup>Di Hari Anti Narkoba 2016 narkoba masih populer di kalangan remaja dan generasi muda bangsa Indonesia. Hal ini didukung oleh data BNN yang memperkirakan jumlah pengguna narkoba di Indonesia akan terus meningkat. Pada tahun 2015 saja, diprediksi angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang. Salah satu survei nasional penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan BNN bersama Universitas Indonesia menunjukkan anak sekolah dasar sudah mengkonsumsi narkoba. Survei yang diikuti 13.710 responden ini menyatakan pengguna narkoba termuda berusia 7 tahun dengan jenis inhalan. Pada usia 8 tahun sudah menggunakan ganja dan usia 10 tahun sudah menggunakan narkoba dengan jenis bervariasi, seperti pil penenang, ganja dan morfin. Sementara hasil penelitian Women Research Institute sepanjang 2008-2009 terungkap, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia mencapai 228/100.000 kelahiran hidup. Ditaksir, 2,3 juta abortus tidak aman

kini serentak hati bangsa prihatin atas kasus yang menimpa dunia pendidikan. Ujian Nasional yang menjadi alat ukur penentu kelulusan peserta didik ternyata mengandung kecurangan yang dapat berpotensi melahirkan koruptor ulung di masa depan. Bagaimana tidak, ujian nasional yang seharusnya dilaksanakan dengan asas kejujuran sebagaimana halnya ujian sekolah biasa justru penuh dengan kecurangan untuk memperebutkan kelulusan. Oknum yang terlibat tidak hanya peserta didik sebagai objek, akan tetapi merambat pula pada pihak sekolah hingga dinas pendidikan selaku penyelenggara. Hal ini menjadi perhatian yang serius mengingat bahwa generasi muda adalah satu-satunya penerus bangsa.

Amartya Sen (1999) menyatakan bahwa pembangunan sebagai kebebasan (*development as freedom*), dimana pembangunan harus mampu mengantarkan suatu bangsa mencapai kehidupan politik yang bebas dan demokratis dengan cara menghilangkan kemiskinan dan berbagai penderitaan seperti kekurangan pangan, malnutrisi, pengidapan penyakit, buta huruf, ketiadaan kebebasan sipil dan hak berdemokrasi, diskriminasi serta berbagai bentuk perampasan hak-hak milik pribadi.

Merujuk Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang pendidikan, pasal 3 menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu beberapa tahun lalu, pendidikan berbasis karakter digalakkan oleh pemerintah dalam rangka membentuk generasi penerus yang dapat diandalkan. Nilai-nilai karakter seperti sikap, perilaku, motivasi, keterampilan mulai ditanamkan pada setiap pembelajaran.

Bentuk pembelajaran dari guru yang semula mengedepankan aspek kognitif berangsur merujuk pula pada aspek-aspek pembentukan karakter. Perubahan yang cukup besar ini pada mulanya mendapat sambutan yang baik dari pakar pendidikan karena pendidikan tidak akan membuahkan hasil tanpa karakter. Akan tetapi dalam

---

terjadi setiap tahun di Indonesia. Sebanyak 1 juta keguguran spontan, 700 ribu karena kehamilan tidak diinginkan, dan 600 ribu karena kegagalan KB, (Kepala Komite Ahli Kesehatan Reproduksi, Roy Tjiong dalam Peluncuran dan Diskusi Buku Target MDG's Menurunkan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 Sulit Dicapai, Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Rabu 24 Maret 2010 (lihat [bekasiurbancity.com](http://bekasiurbancity.com) & [viva.co.id](http://viva.co.id), diakses 7 Feb 2017).

praktiknya pendidikan karakter yang digalakkan terbentur oleh perkembangan teknologi yang menjadi masalah utama, ditambah lagi pembentukan karakter yang dikembangkan kurang mempengaruhi karakter anak bangsa tanpa adanya praktik nyata, tidak hanya berbagai konsep dan teori yang dapat dipelajari namun nilai-nilai seperti keagamaan, kedisiplinan, rasa hormat dan keberanian harus benar-benar diterapkan dalam aksi nyata.

Kendati demikian masih ada harapan untuk menaikkan citra bangsa yang telah terjun payung ini. Dalam bukunya tentang Kecerdasan Ganda (*Multiple Intelligences*), Daniel Goleman (1990) menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual hanyalah 20% saja. Dengan demikian yang kita perlukan saat ini sebenarnya adalah kerja nyata dari program pendidikan berkarakter. Sedangkan karakter yang paling mulia adalah dengan cara mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja, namun hanya beberapa sekolah negeri yang dengan kedisiplinan tinggi menuntut peserta didiknya untuk benar-benar mengamalkan ajaran agamanya, selebihnya adalah pondok pesantren atau sekolah berpola asrama (*boarding school*). Sekolah berpola asrama mungkin dapat menjadi solusi pemecahan masalah besar dewasa ini. Ditinjau dari segi pembentukan karakter anak didik yang diusung ternyata mampu melakukan aksi-aksi nyata. Aspek-aspek seperti kemandirian, tanggung jawab, kedisiplinan dan sebagainya yang dalam dunia pendidikan menjadi pilar pembentukan karakter telah diusung oleh sebagian sekolah berpola asrama jauh sebelum pendidikan karakter digalakkan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus telah memasuki 16 tahun di Papua, namun tampaknya belum terlihat perubahan kualitas generasi Papua khususnya di bidang pendidikan. Studi Universitas Indonesia yang di paparkan beberapa tahun lalu di Jakarta (2005), menempatkan Provinsi Papua sebagai daerah buta huruf paling tinggi di Indonesia. Kondisi ini seharusnya tidak demikian, sebab proporsi dana Otsus untuk pendidikan secara kuantitatif memenuhi dan dapat menjawab persoalan tersebut. Melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari perbandingan harapan hidup saat kelahiran dan pengetahuan yang

diukur dari angka tingkat baca tulis pada orang dewasa sertastandar hidup layak terlihat bahwa Provinsi Papua tahun 1999 IPM-nya 58,8% menjadi 64% ditahun 2008. Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2008, IPM Propinsi Papua paling rendah dar irata-rata nasional (tahun 1999 IPM Indonesia 64,3% menjadi 71,17% di tahun 2008) dan terendah di antara provinsi lainnya. Bahkan bila dibandingkan dengan propinsi yang termiskin sumber daya alamnya seperti Sultra 69%, Bengkulu 72,14%, Jambi 71,99% untuk tahun 2008.<sup>38</sup>

## Kerangka Teoritik Pendidikan Berpola Asrama

### A. Dukungan Sosial

Dukungan social merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerangkan bagaimana hubungan social menyumbang manfaat bagi kesehatan mental atau kesehatan fisik individu. Rook (1985, dalam Smet, 1994) berpendapat dukungan sosial sebagai satu diantara fungsi pertalian atau ikatan sosial. Ikatan-ikatan sosial menggambarkan tingkat tingkat dan kualitas umum dari hubungan interpersonal. Menurut Cobb (1976, dalam Sarafino, 1997), dukungan sosial diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain Cohen dan Wills (1985, dalam Bishop, 1994) mendefinisikan dukungan sosial sebagai pertolongan dan dukungan yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain. Dukungan sosial timbul oleh adanya persepsi bahwa terdapat orang-orang yang akan membantu apabila terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang dipandang akan menimbulkan masalah dan bantuan tersebut dirasakan dapat menaikkan perasaan positif serta mengangkat harga diri. Kondisi atau keadaan psikologis ini dapat mempengaruhi respon-respon dan perilaku individu sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan individu secara umum.

Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat menjadi dukungan sosial atau tidak tergantung pada sejauh

---

<sup>38</sup> Lihat Pigay, Natalis. "Kondisi Riil Papua saat ini yang perlu dilihat oleh Akademisi." Jakarta: Pusat Kajian Papua UKI, April 2011, hal. 31.

mana individu merasakan hal itu sebagai dukungan sosial. Senada dengan pendapat tersebut, Cobb (dalam Gottlieb 1983) menyatakan, setiap informasi apapun dari lingkungan sosial yang menimbulkan persepsi individu bahwa individu menerima efek positif, penegasan, atau bantuan menandakan suatu ungkapan dari adanya dukungan sosial. Adanya perasaan didukung oleh lingkungan membuat segala sesuatu menjadi lebih mudah terutama pada waktu menghadapi peristiwa yang menekan. Cobb menekankan orientasi subyektif yang memperlihatkan bahwa dukungan sosial terdiri atas informasi yang menuntun orang meyakini bahwa ia diurus dan disayangi. Dari pengertian-pengertian tersebut di atas dukungan sosial dapat disimpulkan sebagai kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain

#### **B. Penyesuaian Sosial di Lingkungan Sekolah**

Schneider (1964) mendefinisikan penyesuaian sosial sebagai "*The capacity to react effectively and wholesomely to social realities, situations, and relations so that the requirements for social living is fulfilled in an acceptable and satisfactory manner*". Berdasarkan definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penyesuaian sosial individu menunjukkan kemampuan individu untuk bereaksi secara efektif dan bermanfaat terhadap realitas sosial, situasi, dan hubungan sehingga tuntutan atau kebutuhan dalam kehidupan sosial terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Jika individu ingin mengembangkan kemampuan dalam penyesuaian sosial maka ia harus menghargai hak orang lain, mampu menciptakan suatu relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menghargai nilai-nilai dari hukum-hukum sosial dan tradisi. Apabila prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten, maka penyesuaian sosial yang baik akan tercapai (Schneider, 1964). Schneider juga membagi penyesuaian sosial menjadi tiga aspek yaitu penyesuaian sosial di lingkungan rumah dan keluarga, penyesuaian sosial di lingkungan sekolah dan penyesuaian sosial di lingkungan masyarakat, dikemukakan bahwa penyesuaian seorang individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Kondisi fisik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, meliputi hereditas, konstitusi fisik, kesehatan, sistem syaraf, kelenjar, dan otot.
- b. Perkembangan dan kematangan, khususnya intelektual, sosial, moral, dan emosi.
- c. Kondisi psikologis, meliputi pengalaman, proses belajar, pembiasaan, frustrasi, dan konflik.
- d. Kondisi lingkungan, khususnya lingkungan rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, termasuk agama.

Schneiders (1964) menyebutkan penyesuaian social sebagai kemampuan individu untuk bereaksi secara efektif dan bermanfaat terhadap realitas sosial, situasi, dan hubungan sehingga tuntutan atau kebutuhan dalam kehidupan social terpenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Dengan demikian, jika siswa ingin mengembangkan kemampuan dalam penyesuaian social di lingkungan sekolah maka ia harus menghargai hak orang lain, mampu menciptakan suatu relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, menghargai nilai-nilai dari hukum-hukum sosial dan budaya yang ada di lingkungan sekolahnya. Apabila prinsip-prinsip ini dilakukan secara konsisten, maka penyesuaian sosial di lingkungan sekolah yang baik akan tercapai.

Siswa sekolah berpola asrama tidak semata-mata dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya, namun mereka pun dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan pembelajaran dan tugas dari sekolah. Keinginan orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya ke *boarding school* tidak semata-mata mencari lingkungan yang baik bagi perkembangan sang anak, namun mampu prestasi dalam akademik pun merupakan hal yang tidak biasa diabaikan dalam proses pendidikan itu sendiri. Menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang berbeda dengan lingkungan keluarga dan berinteraksi secara intens baik di sekolah dan asrama sekaligus adanya harapan atau pun tuntutan untuk bias mengikuti pendidikan dengan baik yang ditunjukkan dengan prestasi akademik tentu bukan hal mudah bagi para siswa *boarding school* apalagi mereka sendiri sedang berada pada masa transisi,

memasuki masa remaja. Karenanya dukungan social khususnya orang tua merupakan suatu keniscayaan untuk tetap bisa diperoleh siswa sekolah berpola asrama. Bagaimanapun menyekolahkan anak disekolah berpola asrama tidak berarti melepaskan tanggung jawab orang tua dalam mengawasi perkembangan anak-anaknya.

Adanya dukungan social khususnya dari orang tua akan memberikan kenyamanan fisik dan psikologis bagi anak. Karena dengannya anak akan merasa dicintai, diperhatikan, dihargai oleh orang lain dalam hal ini orang tuanya. Situasi lingkungan *boarding school* yang menuntut penyesuaian diri siswa dan berpotensi menjadi situasi yang menekan atau *stressfull* bagi siswa. Sebagaimana diungkap Lieberman (1992) bahwa secara teoritis adanya dukungan sosial dapat menurunkan kecenderungan munculnya kejadian yang dapat mengakibatkan stress. Dukungan sosial akan mengubah persepsi individu pada kejadian yang menimbulkan *stressfull* dan oleh karena itu akan mengurangi potensi terjadinya stress pada individu yang bersangkutan.

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa dimana status remaja tidaklah jelas dan menimbulkan keraguan akan peran yang dilakukan. Karena pada masa transisi ini, remaja tidak mau lagi diperlakukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat sebagian anak-anak. Namun dilihat dari pertumbuhan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan), dan mentalnya belum menunjukkan tanda-tanda dewasa. Dalam masa tersebut banyak perubahan yang terjadi diantaranya adalah perubahan fisik, perubahan emosi dan perubahan sosial (Hurlock, 1981).

Penyesuaian social di lingkungan sekolah terhadap orang lain dan lingkungan sangat diperlukan oleh setiap orang, terutama dalam usia remaja. Kemampuan dalam melakukan penyesuaian sosial di lingkungan sekolah pada remaja akan tercipta hubungan yang harmonis. Apabila remaja tidak mampu mengakibatkan ketidakpuasan pada diri sendiri karena merasa dikucilkan dan mempunyai sikap menolak diri. Akibatnya remaja tidak mengalami saat-saat yang mengembirakan seperti yang dinikmati oleh teman-teman sebayanya (Hurlock,

1981).

### C. Penumbuhan Moral

Wacana moral dewasa ini adalah salah satu istilah yang boleh dikatakan sudah umum digunakan dalam sistem pendidikan. Moral merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kemampuan menentukan benar atau salahnya tingkah laku seseorang. Dalam konteks ini pula pendidikan moral mencakup ajaran sekitar penggunaan aturan-aturan dan prinsip-prinsip menegakan keadilan dan penghargaan terhadap sesuatu yang hal tersebut membatasi kita untuk melakukan suatu perbuatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum, komunitas atau bahkan masyarakat. Pendidikan moral umumnya lebih menunjuk kepada pengembangan konsepsi keadilan yang begitu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ( Kant dalam: Rawls, 1971). Moralitas mencakup beberapa makna yang luas seperti :

- a. Tingkah laku membantu orang lain ;
- b. Tingkah laku yang sesuai dengan norma-norma sosial ;
- c. Internalisasi norma-norma sosial ;
- d. Timbulnya empati atau rasa salah, atau keduanya ;
- e. Penalaran tentang keadilan ;
- f. Memperhatikan kepentingan orang lain.

### C. Prestasi Akademik

Pengertian prestasi akademik menurut Bloom (dalam Azwar, 2005) adalah mengungkap keberhasilan seseorang dalam belajar. Suryabrata(2002) menyatakan bahwa prestasi akademik adalah seluruh hasil yang telah dicapai (*achievement*) yang diperoleh melalui proses belajar akademik (*academic achievement*) maka menurut penulis istilah yang dapat disimpulkan bahwa seluruh hasil yang telah dicapai (*achievement*) atau diperoleh melalui proses belajar akademik (*academic achievement*) yang dapat dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui sejauhmana para siswa menguasai bahan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari. Dari beberapa uraian diatas



dapat disimpulkan bahwa prestasi akademik adalah hasil dari kegiatan belajar untuk mengetahui sejauh mana seseorang menguasai bahan pelajaran yang diajarkan serta mengungkapkan keberhasilan yang dicapai oleh orang tersebut.

Wahyuni (dalam Gunarsa dan Gunarsa, 2000) menjelaskan bahwa prestasi akademik dapat dipengaruhi oleh factor internal dan faktor eksternal. Hal-hal yang termasuk kedalam faktor internal adalah kemampuan intelektual atau kecerdasan (intelegensi), minat, bakat khusus, motivasi untuk berprestasi, sikap, kondisi fisik dan mental, hargadiri akademik, dan kemandirian. Kemudian dikemukakan pula hal-hal yang termasuk kedalam faktor eksternal, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan faktor situasional.

### **Konsep Dasar Sekolah Berpola Asrama**

Menurut Lickona (1992) pendidikan karakter yang benar harus melibatkan aspek *knowing the good, desiring the good, loving the good, and acting the good*. Peranan dari *Boarding School* atau sekolah yang berpola asrama mempunyai peran yang baik dalam proses pembentukan karakter terhadap peserta didik. Secara teoritis, keberhasilan dalam proses pendidikan moral yaitu dipengaruhi oleh ketepatan seorang guru dalam memilih dan mengaplikasikan metode-metode penanaman nilai-nilai moral. Sekolah yang berpola asrama cenderung memiliki tata tertib atau aturan-aturan yang cukup tegas dan bersifat lebih ketat. Hal tersebut, merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menjadikan manusia yang baik. *Sekolah berpola asrama* setidaknya memiliki strategi pembelajaran yang lebih modern dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal yang seperti biasanya. Untuk mewujudkan pembelajaran yang ingin dicapai khususnya dalam era modern seperti saat ini, maka dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang modern pula. Dalam sekolah yang berpola asramasiswa lebih di didik untuk mandiri dan mendasarkan pada perbedaan individu, meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan. Efektifitas proses penanaman nilai-nilai budi pekerti sangat dipengaruhi oleh ketepatan metode pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru.

Kelebihan lain adalah sistem *boarding school* lebih menekankan pendidikan kemandirian. Berusaha menghindari dikotomi keilmuan (ilmu agama dan ilmu umum). Dengan pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum diharapkan akan membentuk kepribadian yang utuh bagi setiap siswanya. Pelayanan pendidikan dan bimbingan dengan sistem sekolah berpola asrama yang diupayakan selama 24 jam, akan diperoleh penjadwalan pembelajaran yang lebih leluasa dan menyeluruh, segala aktifitas siswa akan senantiasa terbimbing, kedekatan antara guru dengan siswa selalu terjaga, masalah kesiswaan akan selalu diketahui dan segera terselesaikan, prinsip keteladanan guru akan senantiasa diterapkan karena murid mengetahui adanya aktifitas guru selama 24 jam. Pembinaan mental siswa secara khusus mudah dilaksanakan, ucapan, perilaku dan sikap siswa akan senantiasa terpantau, tradisi positif para siswa dapat terseleksi secara wajar, terciptanya nilai-nilai kebersamaan dalam komunitas siswa, komitmen komunitas siswa terhadap tradisi yang positif dapat tumbuh secara leluasa, para siswa dan guru-gurunya dapat saling berwasiat mengenai kesabaran, kebenaran, kasih sayang, dan penanaman nilai-nilai kejujuran, toleransi, tanggungjawab, kepatuhan dan kemandirian dapat terus-menerus diamati dan dipantau oleh para guru/ pembimbing serta semua elemen yang ada dalam kompleks sekolah, terlibat dalam proses pendidikan. Pada dasarnya, semua orang dewasa yang ada di Sekolah berpola asrama adalah guru.

Disamping itu, sekolah berpola asrama mampu menampung siswa dari berbagai latar belakang yang tingkat heteroginitasnya tinggi. Siswa berasal dari berbagai daerah yang mempunyai latar belakang sosial, budaya, tingkat kecerdasan, kemampuan akademik yang sangat beragam. Kondisi ini sangat kondusif untuk membangun wawasan nasional dan siswa terbiasa berinteraksi dengan teman-temannya yang berbeda sehingga sangat baik bagi anak untuk melatih dan menghargai pluralitas (keragaman).

Sekolah berpola asrama juga berupaya secara total untuk menjaga keamanan siswa-siswinya. Tata tertib dibuat lengkap dengan sanksi bagi pelanggarnya. Daftar "dosa" dilist sedemikian rupa dari dosa kecil, menengah sampai berat. Selain itu jaminan keamanan diberikan oleh sekolah berpola asrama, mulai dari jaminan

kesehatan (tidak terkena penyakit menular), tidak narkoba, terhindar dari pergaulan bebas, dan jaminan keamanan fisik (tawuran dan perpeloncoan/bullying), serta jaminan pengaruh kejahatan dunia maya.

Melalui pendidikan pola asrama ini, anak-anak diajar, dididik, dan dikontrol perkembangan hidupnya secara langsung, kontinu, dan mendalam, yang meliputi empat faktor utama, yaitu: (1) Fisik: pemberian gizi seimbang melalui makanan dan minuman yang diberikan tiga kali sehari, menjaga kesehatan/kebersihan tubuh dan lingkungan, serta istirahat/tidur yang cukup; (2) Rohani: pertumbuhan iman dan pengenalan akan Firman Tuhan melalui ibadah pagi dan malam, serta melalui pemuridan; (3) Intelektual: perkembangan kecerdasan ilmu pengetahuan dan kemampuan akademik melalui kegiatan belajar secara pribadi dan kelompok yang dibimbing oleh pengasuh atau guru; dan (4) Karakter: pengembangan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma luhur yang berlaku di masyarakat, seperti; mengasihi dan menghormati orang tua, guru, kakak/adik, dan teman, disiplin dalam belajar dan bekerja, jujur, dan mandiri.

Secara singkat, apabila sebuah sekolah berpola asrama benar-benar memiliki program yang komprehensif-holistik, fasilitas yang lengkap, guru yang berkualitas, dan lingkungan yang kondusif dan terkontrol, akan lebih dapat memberikan jaminan kualitas jika dibandingkan dengan sekolah konvensional. Dalam sekolah berpola asrama, pintar tidak pintarnya anak, baik dan tidak baiknya anak sangat tergantung pada sekolah karena 24 jam anak bersama sekolah.

### **Persoalan dan Tantangan Sekolah Berpola Asrama di Papua**

Sekolah berpola asrama di Indonesia tidak sepenuhnya mendapatkan poin seratus, hal tersebut dikarenakan sampai saat ini sekolah-sekolah berpola asrama masih banyak memiliki persoalan yang belum dapat diatasi sehingga banyak sekolah berpola asrama layu sebelum berkembang. Adapun faktor-faktornya adalah sebagai berikut:

a. Ideologi sekolah berpola asrama yang tidak jelasterm ideologi

Digunakan untuk menjelaskan tipologi atau corak sekolah berpola asrama, apakah religius, nasionalis, atau nasionalis-religius. Yang mengambil corak religius sangat beragam dari yang fundamentalis, moderat sampai liberal. Masalahnya dalam implementasi ideologinya, terlalu banyak improvisasi yang bias dan keluar dari pakem atau frame ideology tersebut. Hal itu juga serupa dengan yang nasionalis, tidak mengadop pola-pola pendidikan kedisiplinan militer secara baik, akibatnya terdapat kekerasan dalam sekolah berpola asrama. Sementara yang nasionalis-religius dalam praktik sekolah berpola asrama masih belum jelas formatnya.

b. Dikotomi guru sekolah versus guru asrama (pengasuhan)

Sampai saat ini sekolah berpola asrama kesulitan mencari guru yang cocok untuk sekolah berpola asrama. Sekolah-sekolah tinggi keguruan (IKIP dan Mantan IKIP) tidak "memproduksi" guru-guru sekolah berpola asrama. Akibatnya masing-masing sekolah mendidik guru asramanya sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Guru sekolah (mata pelajaran) bertugas hanya untuk mengampu mata pelajarannya, sementara guru pengasuhan adalah tersendiri hanya bicara soal pengasuhan. Padahal idealnya, dua kompetensi tersebut harus melekat dalam sekolah berpola asrama. Ini penting untuk tidak terjadinya saling menyalahkan dalam proses pendidikan antara guru sekolah dengan guru asrama.

c. Kurikulum Pengasuhan yang Tidak Baku

Salah satu yang membedakan sekolah-sekolah berpola asrama adalah kurikulum pengasuhannya. Kalau bicara kurikulum akademiknya dapat dipastikan hampir sedikit perbedaannya. Semuanya mengacu kepada kurikulum KTSP-nya produk Depdiknas dengan ditambah pengayaan atau suplemen kurikulum international dan muatan lokal. Tapi kalau bicara tentang pola pengasuhan sangat beragam, dari yang sangat militer (disiplin habis) sampai ada yang terlalu lunak. Kedua-duanya mempunyai efek negative. Pola militer melahirkan siswa yang berwatak kemiliter-

militeran dan terlalu lunak menimbulkan watak licik yang bisa mengantar siswa mempermainkan peraturan.

d. Sekolah dan Asrama Terletak Dalam Satu Lokasi.

Umumnya sekolah-sekolah berpola asrama berada dalam satu lokasi dan dalam jarak yang sangat dekat. Kondisi ini yang telah banyak berkontribusi dalam menciptakan kejenuhan anak berada di sekolah Asrama.

Tantangan yang dihadapi Sekolah berpola asrama di Papua dapat dilihat dari sisi internal dan eksternal antarlain:

*Pertama*, keadaan geografis yang sulit dijangkau karena berada di daerah-daerah pedalaman yang lokasinya terpencil, tetapi ada juga beberapa pelayanan yang beroperasi di daerah pesisir. Untuk menjangkau dan melayani daerah pedalaman cukuplah sulit karena akan banyak menghadapi permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks. Secara geografis daerah Papua dan Papua Barat pada umumnya merupakan daerah dengan dataran rendah berawa-rawayang terdiri dari tanah gambut, dikelilingi oleh hutan yang lebat, wilayah pegunungan dan bukit-bukit yang curam, tanahnya muda, tipis, rapuh, serta curah hujan musiman yang tinggi. Kemudian untuk menuju ke daerah-daerah pedalaman satu-satunya alat transportasi yang dapat digunakan adalah dengan pesawat terbang dan/atau berjalan kaki bermil-mil jauhnya karena sampai saat ini belum ada jalan tembus darat yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor.

*Kedua*, minimnya sarana prasarana public dan sangat tingginya harga kebutuhan pokok. Tantangan lain yang dihadapi di daerah pedalaman adalah minimnya atau malahan tidak ada sama sekali sarana prasarana publik, seperti jaringan listrik dan telepon, rumah sakit yang ada biasanya puskesmas, alat transportasi, pertokoan, dan seterusnya. Keadaan ini tentunya akan sangat menyulitkan Yayasan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, apalagi dalam kondisi yang sangat mendesak dan tiba-tiba saja ada anggota kami yang memerlukan

saranaprasarana tersebut. Begitu juga halnya dengan harga-harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi turut pula memberatkan yayasan dalam memenuhi kebutuhan pokok anak-anak, paraguru, pengasuh sehari-hari, belum lagi ditambah dengan biaya berbagai kebutuhan lainnya. Kondisi ini pun menyebabkan biaya operasional yang dikeluarkan setiap bulannya sangat besar sehingga Pembina dan pengurus yayasan harus berusaha lebih keras lagi mengumpulkan dana bagi pelayanan pendidikan.

*Ketiga*, masalah sosial budaya. Selain berbagai tantangan atau permasalahan tadi, masalah pada umumnya yang sangat pelik dihadapi di Papua adalah menyangkut kondisi social budaya. Contohnya tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan fragmentasi kebudayaan yang ekstrim, kemudian kurang dari tiga juta penduduk pribumi Papua menggunakan 250 bahasa yang berbeda dan mempunyai kebudayaan yang unik, bahkan kadang-kadang saling bentrok satu samalain. Budaya masyarakat pedalaman masih sangat bersifat tradisional, dimana adat istiadat amat kuat mempengaruhi dan mengatur pola hidup mereka sehari-hari. Secara umum masyarakat Papua belum memahami secara baik betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak dan kemajuan daerahnya sehingga partisipasi aktif mereka dalam dunia pendidikan masih sangat rendah. Kemudian, perang antar suku yang terus-menerus terjadi di beberapa daerah dan konflik-konflik yang muncul karena berbagai hal menambah panasnya suasana social politik di masyarakat. Selain itu, tidak tercapainya tujuan otonomi khusus secara optimal dalam menciptakan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas pelayanan public bagi masyarakat Papua telah banyak menimbulkan rasa kekecewaan yang besar dari masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan pemuda. Padahal dana yang digulirkan sejak sebelas tahun pelaksanaan otonomi sudah berjumlah Rp.32 triliun, sebuah angka fantastis untuk jumlah penduduk asli Papua yang hanya sekitar 2 juta dari 3,6 juta penduduk. Kondisi ini pun memicu masyarakat Papua untuk melakukan aksi protes atau demonstrasi setiap tahunnya.

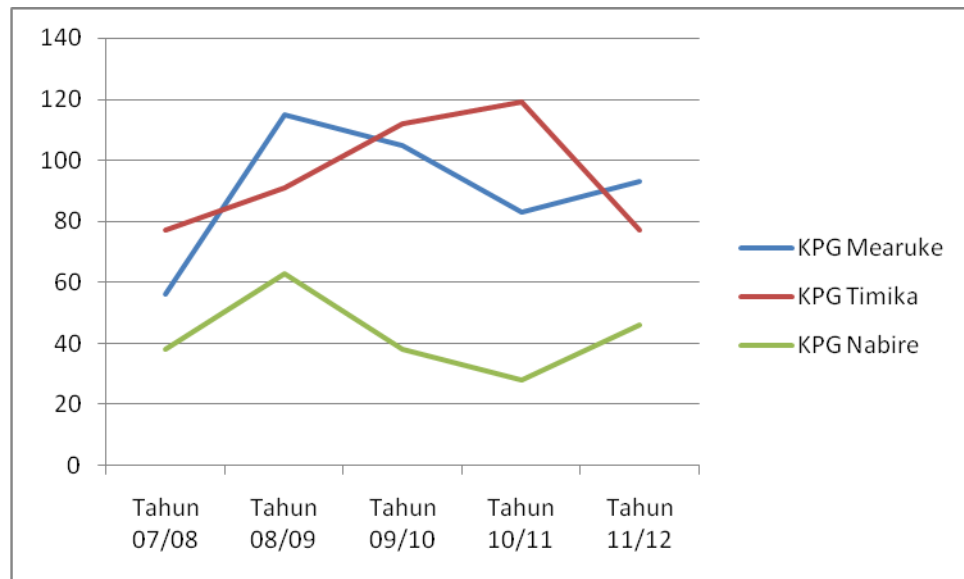
## Upaya Pengembangan Pendidikan Berpola Asrama Di Pedalaman Papua

### Ketersediaan dan Kualifikasi Pendidikan Guru

Ketersediaan para guru yang telah lulus sejumlah 1229 sejak tahun 2007/2008 sampai dengan tahun 2011/2012 dari Kolese Pendidikan Guru (KPG) dari tiga sekolah masing-masing KPG Mearuke, KPG Timika dan KPG Nabire, mampu mendorong dan mengembangkan pendidikan berpola asrama dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:

Gambar 1.

Perkembangan Data kelulusan Kolese pendidikan Guru (KPG) Tahun 2007/2008 – 2011/2012



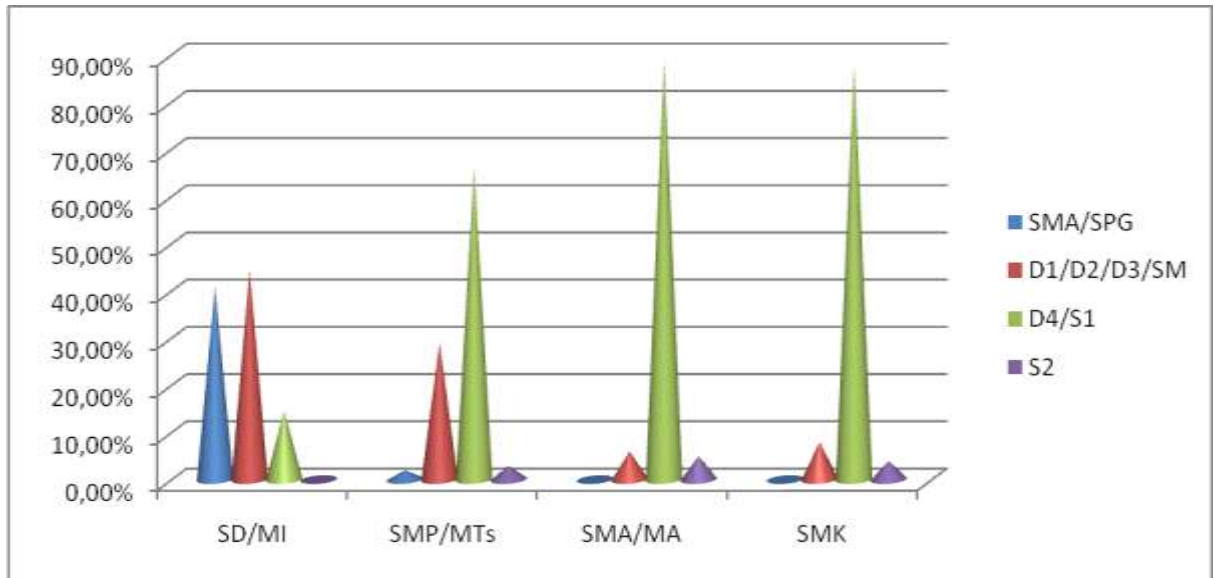
Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemprov Papua 2012

Kualitas guru di Papua yang mengajar di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK cenderung meningkat seiring tingkatan pendidikan yang diampu, hal itu ditunjukkan dengan komposisi kualifikasi pendidikan yang dimiliki terutama pada

diagram yang berwarna hijau pada gambar 2 di bawah ini:

Gambar 2

Komposisi Kualifikasi Guru Pengampu Sekolah di Propinsi Papua



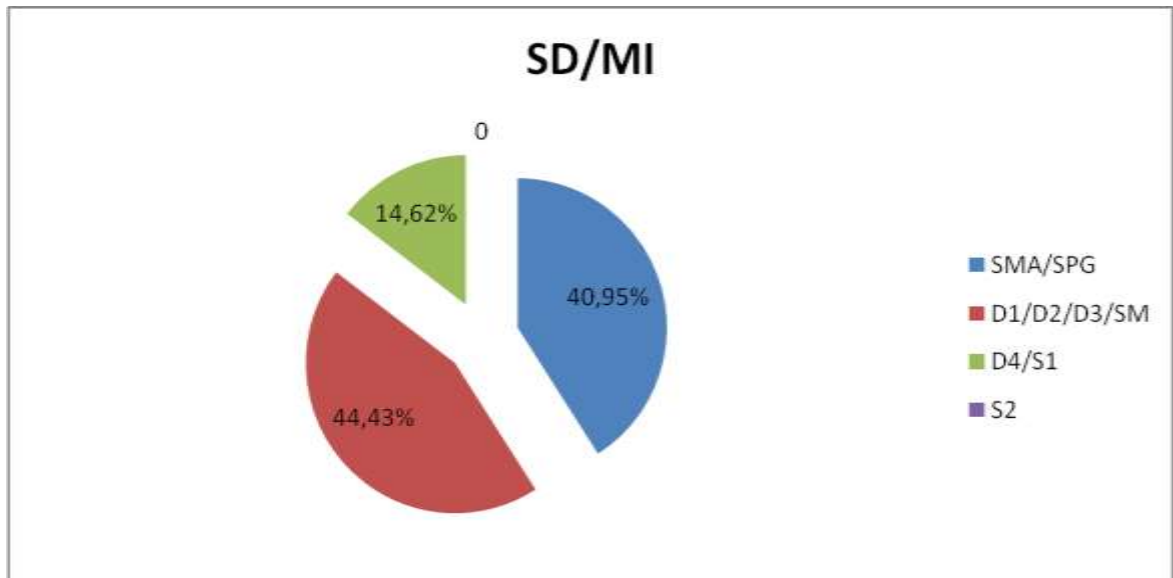
Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemprov Papua 2012

Proporsi kualitas Guru SD/MI yang dimiliki Propinsi Papua pada tahun 2012 dengan kualifikasi pendidikan SMA/SPG sebanyak 40,95%, D1 s/d SM sebanyak 44,43%, D4/S1 sebanyak 14,62% bisa dilihat pada gambar 3 dibawah ini:



Gambar 3

Proporsi Kualifikasi Pendidikan Guru Pengampu SD/MI di Propinsi Papua

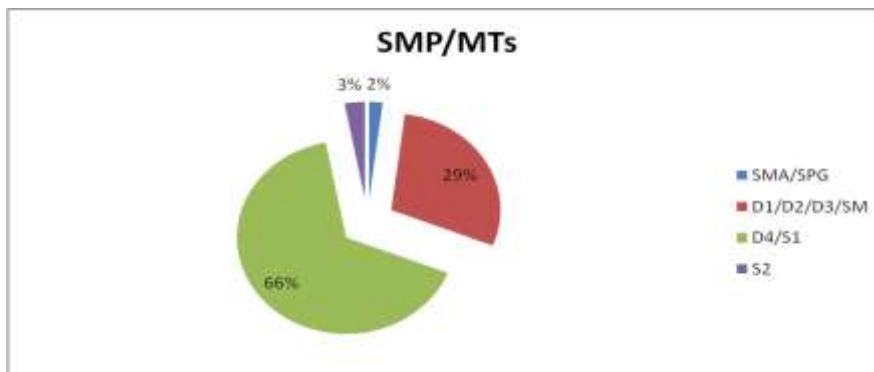


Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemprov Papua 2012,

Proporsi kualitas Guru SMP/MTs yang dimiliki Propinsi Papua pada tahun 2012 dengan kualifikasi pendidikan SMA/SPG sebanyak 2%, D1 s/d SM sebanyak 29%, D4/S1 sebanyak 66% dan S2 sebanyak 3% bisa dilihat pada gambar 4 dibawah ini:

Gambar 4

Proporsi Kualifikasi Pendidikan Guru Pengampu SMP/MTs di Propinsi Papua



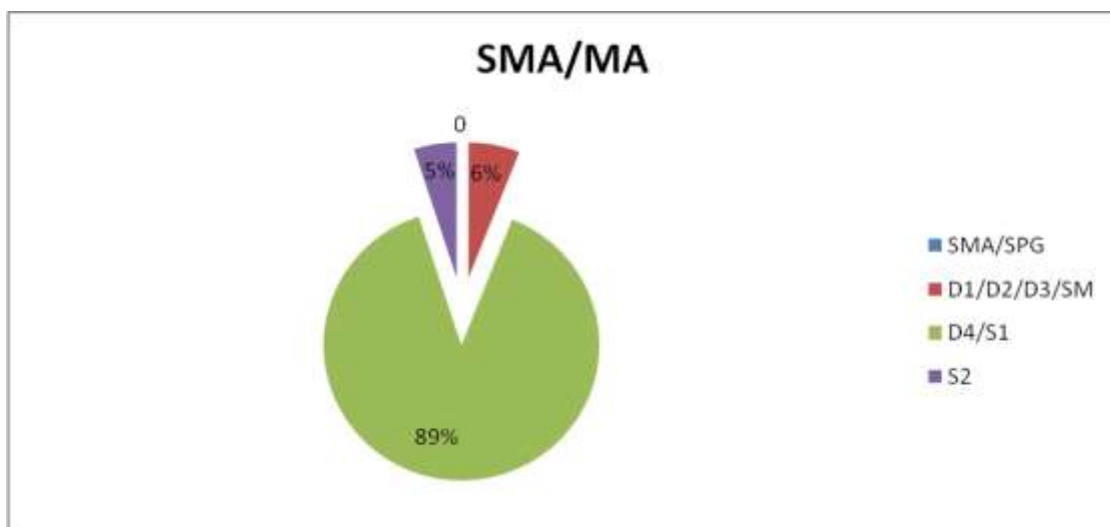
Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga, Pemprov Papua 2012

Proporsi kualitas Guru SMA/MA yang dimiliki Propinsi Papua pada tahun 2012 dengan kualifikasi pendidikan D1 s/d SM sebanyak 6%, D4/S1 sebanyak 89% dan S2 sebanyak 5% bisa dilihat pada gambar 5 di bawah ini:

Gambar 5

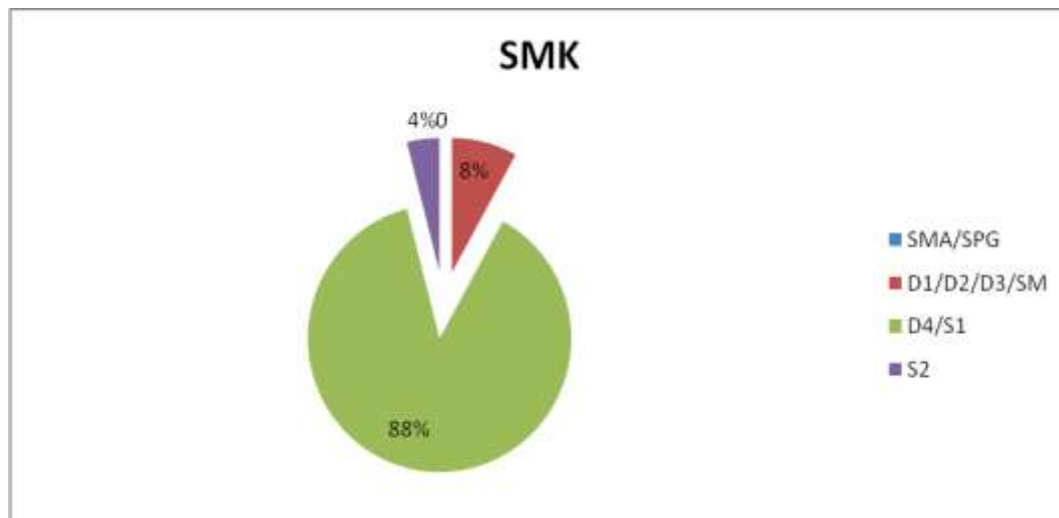
Proporsi Kualifikasi Pendidikan Guru Pengampu SMA/MA di Propinsi Papua



Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemprov Papua 2012

Proporsi kualitas Guru SMK yang dimiliki Propinsi Papua pada tahun 2012 dengan kualifikasi pendidikan D1 s/d SM sebanyak 8%, D4/S1 sebanyak 88% dan S2 sebanyak 4% bisa dilihat pada gambar 6 dibawah ini:

Gambar 6  
Proporsi Kualifikasi Pendidikan Guru Pengampu SMK di Propinsi Papua



Sumber: Data Perkembangan Pendidikan Provinsi Papua, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Pemprov Papua 2012

Mengingat pendekatan penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Papua memiliki tujuan dan arah tertentu maka ada beberapa kondisi di bawah ini yang layak menjadi pertimbangan upaya mendorong pengembangan pendidikan berpola asrama di pedalaman Papua yaitu:

- Melihat kondisi ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang masih jauh tertinggal serta keadaan sosial budaya masyarakat pedalaman yang kurang kondusif terhadap kegiatan pendidikan maka sangat tepat jika pendidikan pola asrama diselenggarakan bagi anak-anak pedalaman.
- Melalui pendidikan pola asrama perkembangan fisik, rohani, intelektual, dan karakter anak-anak dapat dikontrol secara langsung, kontinu, dan mendalam oleh para pengasuh asrama dan guru sehingga diharapkan perkembangan kualitas hidup anak-anak mencapai hasil yang optimal.
- Untuk menjamin efektivitas penyelenggaraan pendidikan pola asrama sehingga dapat mencapai hasil yang memuaskan maka diperlukan kemitraan yang lebih baik lagi antara yayasan, pemerintah daerah, tokoh adat/agama, dan swasta

### **Ketersediaan Infrastruktur dan Zona Penyangga**

Sedangkan ketersediaan infrastruktur dan Zona Penyangga sebagai tempat yang cocok untuk penempatan asrama sebagai sarana Akulturasi Budaya Di Propinsi Papua dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu:

1. Kategori Wilayah Kota

Karakteristik:

Ada akses transportasi umum, tersedia sarana komunikasi dan informasi, gaya hidup modern berkembang sangat cepat, penghargaan terhadap waktu, kesehatan dan gizi sangat tinggi

2. Kategori Wilayah Pinggiran (Sebagai Zona Penyangga untuk penempatan asrama sebagai sarana akulturasi budaya)

Karakteristik:

Dapat dijangkau dengan transportasi umum setiap hari, terjangkau sarana komunikasi

3. Kategori Wilayah Terpencil

Karakteristik:

Dapat dijangkau transportasi umum namun tidak dengan jarak tempuh yang jauh dan sulit sehingga membutuhkan biaya yang mahal, sarana komunikasi masih sangat terbatas, infrastruktur dasar sangat terbatas

4. Kategori Wilayah Terisolir

Karakteristik:

Belum Tersentuh pembangunan, masyarakatnya masih terpencar satu sama lain, belum tersedia infrastruktur dasar (sarana komunikasi)

### **Mendorong Pola Pembelajaran Tematik di Papua**

Premis penting yang harus dikembangkan dalam pembangunan manusia Papua adalah mengutamakan manusia Papua sebagai pusat perhatian (bukan sebagai alat atau instrument) dan memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia Papua secara keseluruhan (tidak hanya terbatas pada peningkatan pendapatan atas aspek

ekonomi semata).

Pembangunan manusia Papua mencakup dimensi yang sangat luas. Ukuran kualitas SDM yang telah dilakukan disuatu wilayah harus dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk sekaligus dapat memberikan gambaran tentang persentase pencapaian terhadap sasaran pembangunan yang ideal atau diharapkan. Oleh karena itu diperlukan alat untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia Papua secara kuantitatif.

Konsep pembangunan manusia Papua yang sesungguhnya adalah menempatkan manusia Papua sebagai tujuan akhir dari pembangunan, dan bukan sebagai alat bagi pembangunan. Hal ini berbeda dari pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia Papua memperkenalkan konsep yang lebih luas dan lebih komprehensif yang mencakup semua pilihan yang dimiliki oleh manusia Papua di semua golongan masyarakat pada semua tahapan pembangunan.

Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Papua, maka perlu dilihat salah satu dimensi yang diukur sebagai pencapaian pembangunan manusia Papua yaitu Pengetahuan, hal ini dapat dilihat dari standard pendidikan yang diterima mulai dari tataran yang paling rendah yaitu Sekolah Dasar (SD). Pemerintah pada beberapa tahun lalu telah mengeluarkan kebijakan tentang otonomi daerah. Kebijakan ini antara lain memberi ruang gerak yang luas kepada lembaga pendidikan khususnya sekolah dasar dalam mengelola sumber daya yang ada, dengan cara mengalokasikan seluruh potensi dan prioritas sehingga mampu melakukan terobosan-terobosan sistem pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif.

Salah satu upaya kreatif dalam melaksanakan pembelajaran yang menggunakan kurikulum berbasis kompetensi di sekolah dasar adalah melakukan pembelajaran tematik. Pembelajaran model ini akan lebih menarik dan bermakna bagi anak karena model pembelajaran ini menyajikan tema-tema pembelajaran yang lebih aktual dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Namun demikian masih banyak pihak yang belum memahami dan mampu menerapkan model ini secara baik.

Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema/topik pembahasan. Sutirjo dan Sri Istuti Mamik (2004: 6) menyatakan bahwa pembelajaran tematik merupakan satu usaha untuk mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, nilai, atau sikap pembelajaran, serta pemikiran yang kreatif dengan menggunakan tema. Dari pernyataan tersebut dapat ditegaskan bahwa pembelajaran tematik dilakukan dengan maksud sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, terutama untuk mengimbangi padatnya materi kurikulum. Disamping itu pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi/keterlibatan siswa dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar.

Dalam menerapkan dan melaksanakan pembelajaran tematik, ada beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan yaitu 1) bersifat kontekstual dan terintegrasi dengan lingkungan, 2) bentuk belajar dirancang agar siswa menemukan tema, dan 3) efisiensi. Pembelajaran tematik memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagaimana diungkapkan dalam *www.pppg.tertulis.or.id*. sebagai berikut : berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.

Sehubungan dengan hal tersebut diungkapkan pula dalam *www.p3gmatyo.go.id/download/SD* karakteristik pembelajaran terpadu/tematik sebagai berikut: 1) pembelajaran berpusat pada anak, 2) menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan, 3) belajar melalui pengalaman langsung, 4) lebih memperhatikan proses daripada hasil semata, 5) sarat dengan muatan keterkaitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, S. (2005). *Tes prestasi dan pengukuran prestasibelajar*. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- (2010). *Penyusunan SkalaPsikologi*. Yogyakarta: Pustakapelajar
- Bishop, G.D.(1997).*Health Psychology: Integrating Mind andBody*.Boston: Allyn&Bacon
- Blanchard,KendanPhilips Hodges.LeadLikeJesus. Belajar dariModelKepemimpinan PalingDahsyat Sepanjang Zaman. (Dionisius Pare, Penerjemah). Tangerang: Visimedia, 2007
- Covey,R. Stephen.*The8th Habit*. (Wandi S.Brata& ZeinIsa,Penerjemah). Jakarta: Gramedia, 2010.
- Cutrona,C.E,*etal*. (1994). Peceivedparental socialsupport andacademic achievement:anattachment theory perspective. *Journal of Personality and SocialPsychology*. 66, 2, 369-378
- Daniel Goleman, *Multiple Intelligences*, 2014
- Deswita. (2007). *Psikologi Perkembangan*.Bandung: RosdaKarya
- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (2012), Data Perkembangan pendidikan provinsi Papua, PT. Percetakan Rakyat Papua
- Drucker,F. Peter.*ManagingtheNonprofitOrganization:Principlesand Practices*. NewYork: HarperCollins, 2005.
- Fuhrmann,B.S.(1990). *Adolescence, Adolescents*. 2 edition. Glenview, Illinois:A Division of Scott, Foresman and Company
- Gottlieb, B.H. (1983). *Social Support Strategie: Guideliness for Mental Helth Practice*.London: Sage Publication
- Gunarsa, S.D. &Gunarsa, Y.S. (2000).Psikologi remaja. Jakarta: BPK GunungMulia
- Hobfoll, S.E. (1986). *Stress, social support andwomen:the seriesinclinicaland*

- community psychology*. New York: Harper & Row
- Hurlock, E.B. (1981). *Developmental Psychology, A Life-Span Approach*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing Company Ltd.
- Lerner, R. & Hultch, D. (1983). *Human Development: A Life-Span Perspective*. New York: McGraw-Hill, Inc
- Lieberman, M.A. (1992). The Effect of Social Support on Response to Stress. Dalam Bretnitz & Golberger (Eds). *Handbook of Stress: Theoretical & Clinical Aspects*. London: Collier Mac Millan Publisher
- Light, Mark. *Result Now for Nonprofits: Purpose, Strategy, Operations, and Governance*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2011.
- Low, Will and Eileen Davenport. "NGO Capacity Building and Sustainability in the Pacific." Blackwell Publishing. Asia Pacific Viewpoint: Victoria University of Wellington. Vol. 3 No. 3, 2002.
- Manufandu, Septer. "Akses Masyarakat Papua dalam Pelayanan Publik." Depok: Simposium & Lokakarya Nasional Papua Fisip UI, April 2010.
- Millessen, L. Judith and L. Bies. "Nonprofit Capacity Building; Who is doing What for Whom and to What End?" Ohio: *Journal for Nonprofit Management*, 2007.
- Modouw, James. "Menghitung Kontribusi Pembangunan Pendidikan Bagi Manusia Papua." Depok: Simposium & Lokakarya Nasional Papua Fisip UI, April 2010.
- Mukhtar, dkk. *Sekolah Berprestasi*. Jakarta: Nimas Multima, 2003.
- Nenobais, Harry. "Manajemen Pelayanan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) Pemerintahan Kabupaten Nabire." Tesis. Yogyakarta: Magister Administrasi Publik Fisipol UGM, 2004.
- Nenobais, Harry, "Pengembangan Pendidikan Berpola asrama di Pedalaman Papua" Makalah disampaikan pada acara Dies Natalis ke-57 Fisipol-UGM dengan Tema "Membangun Optimisme di Tanah Papua: Belajar dari Praktik



- Baik Pelayanan Publik." Yogyakarta, Selasa 27 November 2012.
- Pigay, Natalis. "Kondisi Riil Papua Saat Ini yang Perlu Dilihat oleh Akademisi."  
Jakarta: Seminar Kebijakan Pembangunan untuk Papua Baru. Pusat Kajian Papua  
UKI, April 2011
- Ratna Wulandari, S.S, M.Pd., Peran Sekolah berpola asrama Bagi Pendidikan  
Karakter Anak Bangsa, mimeo
- Republik Indonesia, Undang  
Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia, Undang-  
Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat..
- Schneiders, A.A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Holt,  
Rinehart and Winston
- Sri Maslihah, Studi Tentang Hubungan Dukungan Sosial, Penyesuaian Sosial  
Di Lingkungan Sekolah Dan Prestasi Akademik Siswa Smpit Assyfa Sekolah  
*berpola asrama Subang Jawa Barat,*  
*Jurnal Psikologi Undip Vol.10, No.2, Oktober 2011*
- Suebu, Barnabas. *Kami yang Menanam, Kami yang Menyiram dan Tuhanlah  
yang Menumbuhkan*. Jayapura: Pemda Provinsi Papua, 1997.
- Suryabrata, S. (2002). *Psikologi pendidikan*. Yogyakarta: PT. Raja grafindo persada
- Sutirjo dan Sri Istuti Mamik. (2005). *Tematik: Pembelajaran Efektif dalam  
Kurikulum 2004*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Tim Sintesa. "Sintese Kapasitas Pembangunan Papua." (Jayapura: UNDP & Pemerintah Pr  
ovinsi Papua, Mei 2005), hal. 17.
- Tebay, Vience. "Paradigma Baru Dalam Pelayanan Publik di Papua." Jakarta:  
Seminar Kebijakan Pembangunan untuk Papua Baru. Pusat  
Kajian Papua UKI, April 2011. Widjojo, S  
Muridan, dkk. *Papua Road Map*. Jakarta: LIPI, Yayasan TIFA dan Yayasan Obor  
Indonesia, 2009.
- World Bank. *Investing in Future of Papua & West Papua: Infrastructure for Sustainable Dev*

*elopment*. Jakarta: The World Bank & Australian Indonesia Partnership,  
2009.

[http://www.acces-indo.or.id/documents/OCA\\_Manual.pdf](http://www.acces-indo.or.id/documents/OCA_Manual.pdf) diakses tanggal 1

Oktober 2011. <http://bappeda.papua.go.id/> diakses pada tanggal 25 April  
2011.

<http://www.bps.go.id> diakses pada tanggal 15 februari 2014

<http://www.ptfi.com> diakses tanggal 10 November 2012.

[http:// 208.42.83.77/org\\_perf/capacity.htm](http://208.42.83.77/org_perf/capacity.htm) 12 September  
2011.

<http://edukasi.kompasiana.com/2012/04/14/peran-pendidikan-moral-di-sma-boardingschool-schoolvan-lith-muntilan-449864.htm>

[www.pppg.tertulis.or.id](http://www.pppg.tertulis.or.id). *Pembelajaran Tematik*

[www.p3gmatyo.go.id](http://www.p3gmatyo.go.id). *Pembelajaran Tematik, 14 Februari 2014*

**ANALISIS PENGARUH PENERAPAN KURIKULUM KJNI  
TUJUH KOMPONEN TERHADAP SISTEM PEMBELAJARAN  
FAKULTAS TEKNIK UNKRIS JAKARTA**

**Jenniria Rajagukguk**  
**Fakultas Teknik Mesin, Universitas KrisnaNwipayana**  
*e-mail: jenniria\_rajagukguk@yahoo.com*

***Abstract***

Students of the Faculty of Engineering, University Krisnadwipayana Jakarta (UNKRIS) each year it was increased the number, increase the number of students needs were matched with an increase in the quality of the entire academic community. The plan starategi UNKRIS 2016-2026, Faculty of Engineering UNKRIS declared vision to become a university that excels in scholarship. In order for the strategic plan implemented, then one of the efforts taken is to provide quality services to students in education is one of the activities is a learning system. KJNI curriculum implementation through an the seven of components of the learning system will be implemented aims to produce graduates who in accordance with their competence and meet the expectations of the various stakeholders concerned. The method research used quantitative research methods, time study with cross-sectional research, conducted over three months, with primary data collection techniques (making questionnaire) with 40 respondents. This study uses bivariate analysis techniques with the aim to see whether or not the influence / strong between the two variables. From the results of SPSS-20, shows the regression equation:  $Y = 2634 + 0.964 X$ , from the above results can was obtained  $H_0$  rejected and  $H_a$  accepted, because  $t_{count} > t_{table}$  ( $25.956 > 2.0244$ ). From the results of research, there is a strong positive effect ( $r = 98.6$ ) between curriculum implementation factors KJNI seven votes component (X) with a learning system (Y) on a student in the Faculty of Engineering Unkris Jakarta. Thus the need was applied / implemented curriculum KJNI especially for ratings of seven components of the learning system at the Faculty of Engineering Unkris Jakarta that the student must have competence and be competitive.

***Key Words: KJNI, Curriculum for Seven Component and Learning System.***

## **I. PENDAHULUAN**

Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Krisnadwipayana Jakarta (UNKRIS) tiap tahun jumlahnya semakin bertambah, penambahan jumlah mahasiswa ini perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas dari seluruh civitas akademik. Berdasarkan renstra UNKRIS 2016-2026, Fakultas Teknik UNKRIS mencanangkan visi untuk menjadi universitas yang unggul dalam keilmuan. Agar renstra terlaksana, maka salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan layanan yang berkualitas kepada mahasiswa dibidang pendidikan salah satu kegiatannya adalah pembelajaran.

Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar, pembelajaran ini kegiatan yang sangat penting dalam rangka pencapaian kompetensi mahasiswa agar dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk menjamin agar penerapan kurikulum KKNi sistem penilaian tujuh komponen terhadap proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di Fakultas Teknik UNKRIS, maka disusun pedoman sistem pembelajaran KKNi Fakultas Teknik UNKRIS yang di dalamnya memuat tentang apakah adapengaruh penerapan kurikulum KKNi penilaian tujuh komponen terhadap sistem pembelajaran di Fakultas Teknik UNKRIS Jakarta. Kurikulum KKNi dengan penilaian tujuh komponen terhadap sistem pembelajaran akan dilaksanakan dengan tujuan pendidikan, menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensi dan memenuhi harapan berbagai pemangku yang berkepentingan.

Landasan hukum tentang sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi dan SK Rektor tentang Manual Penjamin Mutu UNKRIS.

Berdasarkan landasan hukum, standar sistem pembelajaran di Fakultas Teknik UNKRIS merujuk pada standar mutu program studi yang ditetapkan melalui SK Rektor Unkris dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi standarisasi, standar proses dan standar penilaian sistem pembelajaran berdasarkan kurikulum KKNi dengan tujuh komponen.

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan. Standarisasi mengacu pada deskripsi capaian tujuh komponen pada sistem pembelajaran dari KKNIlulusan program diploma, sarjana, program magister, magister terapan dan spesialisituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, materi kuliah disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain.

Standar proses pembelajaran tergantung pada karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat sebagai berikut: (1) Interaktif (mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen), (2) Holistic (mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional), (3) Integrative (proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin), (4) Sainifik (proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan), (5) Kontekstual (capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya), (6) Tematik (proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin), (7) Efektif (capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum), (8) Kolaboratif (proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan), (9) Berpusat pada mahasiswa (proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan (10) Kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan).

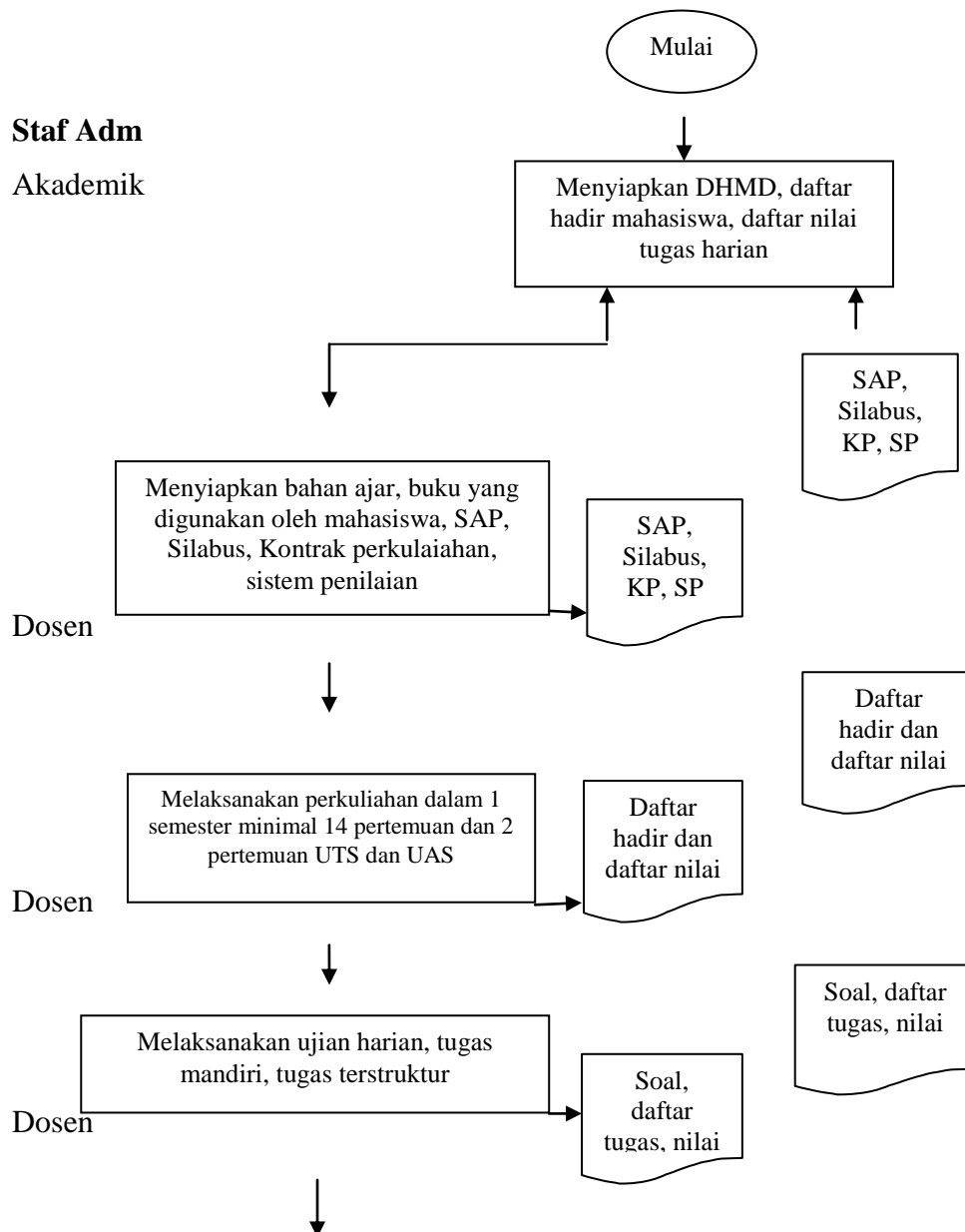
Perencanaan proses pembelajarandisusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran per semester (RPS dan RPKPS) yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan IPTEKS. Adapun perencanaan sebagai berikut:

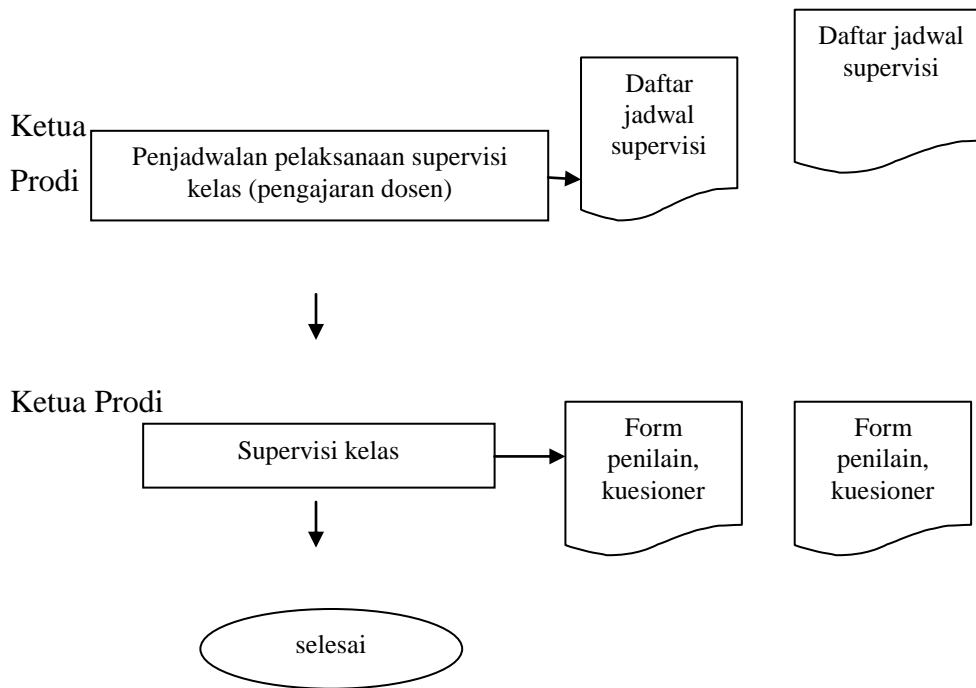
1. Rencana pembelajaran paling sedikit memuat

Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen

Pengampu: Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, metode pembelajaran, waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, kriteria, indikator, dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan.

2. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah, dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran/prosedur perkuliahan seperti terlihat pada gambar 1.





**Gambar 1.**

### **Bagan Alir Prosedur Perkuliahan**

3. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajarankolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, response, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, kerja praktek lapangan.

- a. **Beban Belajar Mahasiswa**

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Satu sks setara dengan 145 (seratus enam Lima) menit kegiatan belajar per minggu per semester, dimana 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup (1) Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (2) Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; (4) Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian pembelajaran tergantung pada (1) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa. (2) Prinsip penilaian hendaknya mencakup: (a) Prinsip edukatif, yaitu penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. (b) Prinsip otentik, yaitu penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. (c) Prinsip objektif, yaitu penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai. (d) Prinsip akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa. Dan (e) Prinsip transparan, yaitu penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan, (3) Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, (4) Instrumen penilaian terdiri atas (a) Penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain. (2) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi dan (3) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian. (4) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan., (5) Mekanisme penilaian terdiri atas (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran, (b) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip



- penilaian, (c) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (6) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, dan (7) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu, dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. (8) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran sebagai berikut: a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik, b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik, c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang atau huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- c. Standar evaluasi hasil belajar berdasarkan kurikulum KKNI dengan penilaian 7 komponen adalah Kuis 10 %, absensi 5 %, Tugas 10 %, laporan ilmiah 10 %, UTS 30 % dan UAS 35 %. Dan skor penilaian akhir Nilai A ( 80-100); A- (78 – 79,99); B+ (72 – 75,99); B (64 – 67,99); B- (60 -63,99); C+ (60 -63,99); C (56- 59,99); C- (45– 55,99); < 46 = E.
- d. Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat), Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran, Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) sedangkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK). Mahasiswa program Diploma dan Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol). Kelulusan mahasiswa dari program diploma, sarjana dan pasca sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: (1) Mahasiswa

dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol); (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian atau cumlaude apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).

4. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan metode penelitian kuantitatif, yang diambil dari beberapa teori, kajian, konsep, hipotesis, dan asumsi sebelum mengumpulkan data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dikarenakan penelitian kuantitatif memberikan fakta yang dapat dipergunakan untuk memberikan prediksi yang akurat mengenai hubungan antara faktor pasar dengan perilaku, memperoleh pengetahuan mengenai hubungan tersebut (Hair, Bush & Ortinau, 2003).

Jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tiga aspek, yaitu tujuan penelitian, dimensi waktu penelitian dan manfaat penelitian (neuman, 2000). Berdasarkan aspek diatas, analisis pengaruh evaluasi penerapan sistem penilaian kurikulum KKNi tujuh komponene terhadap proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Unkris Jakarta sebagai berikut:

Metode Penelitian adalah jenis penelitian eksplanatif yang menjelaskan secara akurat sebuah topik yang diangkat dalam satu penelitian, dalam penelitian eksplanatif atau prediksi yang dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan informasi tentang topik yang diketahui dan memiliki gambaran yang jelas mengenai hubungan-hubungan yang terdapat dalam topik tersebut. Maka tujuan penelitian analisis pengaruh evaluasi penerapan sistem penilaian kurikulum KKNi tujuh komponene terhadap proses belajar mengajar di Fakultas Teknik Unkris Jakarta untuk meneliti interaksi antarsistem kurikulum KKNi penilaian tujuh dengan sistem pembelajaran. Waktu Penelitian. Menurut Neuman (2014) mengatakan ada dua dimensi waktu dalam melakukan penelitian, yakni *Cross-Sectional Research* dan *Longitudinal Research*. Penelitian ini termasuk dalam *Cross-Sectional Research* karena penelitian dilakukan dalam waktu tertentu. Selain itu penelitian ini hanya dilakukan dalam waktu sekali

waktu saja, tidak akan melakukan penelitian di waktu yang berbeda untuk dijadikan perbandingan. Penelitian ini dilakukan pada bulan 1 Oktober -16 Desember 2016.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data primer adalah dengan menggunakan survei, survei yang digunakan adalah kuesioner sebagai alat pengumpul data yang utama. Melakukan pengumpulan data dilapangan dengan mengajukan pertanyaan tertulis dalam kuesioner tersebut. Sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuisisioner tersebut yang terdiri dari sejumlah daftar pertanyaan kuesioner tersebut yang terdiri dari sejumlah daftar pertanyaan berdasarkan indikator-indikator yang telah tercantum dalam operasionalisasi konsep dengan alternatif jawaban yang disediakan. Kuesioner ini diisi sendiri dan langsung oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah mahasiswa, dosen dan Dekan di Fakultas Teknik Unkris Jakarta. Data Sekunder dalam penelitian ini berupa data yang bersifat rujukan atau literatur dokumen sehingga pengumpulan data atau informasi yang di dapat dari internal dan eksternal perguruan tinggi. Data internal adalah data yang diperoleh dari perguruan tinggi yang akan diteliti seperti profil perguruan tinggi, laporan jumlah mahasiswa /dosen/dekan dan data-data lainnya yang berkaitan dengan variabel penelitian.

### **3.HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengujian Validitas dan Reliabilitas berada dalam tahap akan diketahui apakah alat ukur yang digunakan dapat dipahami oleh responden, pada penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi 10 pertanyaan untuk variabel sistem pembelajaran, 10 pertanyaan untuk variabel penerapan kurikulum KKNi penilaian tujuh komponen dan jumlah 40 responden adalah mahasiswa, dosen dan dekan dilakukan selama bulan November sampai dengan desember 2016 di lingkungan Fakultas Teknik UNKRIS.

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan karakteristik responden secara keseluruhan pada penelitian ini, disamping itu bertujuan untuk menggambarkan sebaran jawaban dan seberapa banyak variasi jawaban yang telah di isi oleh responden dari tiap variabelnya.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bivariat, tujuannya untuk melihat apakah ada atau tidaknya pengaruh tersebut dan juga melihat seberapa kuat hubungan di antara dua variabel tersebut. Dimana seperti yang telah disampaikan sebelumnya. penerapan kurikulum KKNi melalui penilaian tujuh komponen menjadi variabel independen dan sistem pembelajaran yang menjadi variabel dependen. Dalam menganalisis pengaruh antara kedua variabel ini

menggunakan uji regresi linier sederhana, besaran koefisien determinasi menunjukkan presentase variabilitas observasi dari sistem pembelajaran merupakan variabel dependen (Y) yang dijelaskan oleh variabel independennya yaitu evaluasi penerapan kurikulum KKNI penilaian tujuh komponen (X). Maka hipotesis nya adalah H1 : Terdapat pengaruh sistem pembelajaran di Fakultas Teknik Unkris dan H2 : Terdapat pengaruh evaluasi penerapan sistem kurikulum KKNI penilaian tujuh komponen.

Analisis Regresi Linier Sederhana dilakukan dengan menggunakan SPSS versi- 20, analisis tersebut dipergunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel terhadap variable Y, adapun persamaan regresi linier sederhana adalah :  $Y = a + bX$  (Suharsimi Arikunto, 2005 : 372). Dari hasil SPSS-20, menunjukkan Persamaan Regresi :  $Y = 2634 + 0,964 X$ . Berdasarkan aturan pengambilan keputusan untuk pengujian satu arah ke kanan pada taraf nyata sebesar 0,05 atau 5 %, menunjukkan bahwa  $H_0$  jika  $t_{hitung} > \text{nilai } t_{tabel}$ , yang menyatakan bahwa ada pengaruh dari hubungan yang nyata antara variable X (Penerapan kurikulum KKNI penilaian tujuh komponen) dengan variable Y (sistem Pembelajaran). Dari hasil SPSS-Versi 20 menunjukkan nilai uji  $t_{hitung}$  adalah 25,956 dan  $t_{tabel}$  2,0244, dengan taraf kesalahan  $\alpha = 0,05$  dengan derajat kebebasan (dk) adalah  $n - 2$  atau  $40 - 2$  dapat diperoleh  $t_{tabel}$  2,1009. Jadi, dari hasil diatas dapat diperoleh  $H_0$  di tolak dan  $H_a$  diterima, karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $25,956 > 2,0244$ ). Dengan demikian dapat disimpulkan terdapat hubungan positif dan hubungan sangat kuat/besar berpengaruh ( $r = 98,6 \%$ ) antara factor penerapan kurikulum KKNI dengan sistem pembelajaran pada mahasiswa di Fakultas Teknik Unkris Jakarta

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pengaruh yang positif kuat ( $r = 98,6$ ) antara faktor penerapan kurikulum KKNI penilaian tujuh komponen (X) dengan sistem pembelajaran (Y) pada mahasiswa di Fakultas Teknik Unkris Jakarta. Dengan demikian perlunya di terapkan/dilaksanakan kurikulum KKNI khususnya untuk penilaian tujuh komponen terhadap sistem pembelajaran pada di Fakultas Teknik Unkris Jakarta harus agar mahasiswa mempunyai kompetensi dan dapat bersaing dimana pun mereka berada.

#### **5. REFERENSI**

Asmawi Z., *Pedoman Pembelajaran & Monitoring Evaluasi Pembelajaran*, Sukabumi  
2014.

Hariwung A. J, *Supervisi Pendidikan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Jakarta,  
1989

Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, Penerbit PT.Remaja  
Rosdakarya, Bandung, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif: Kualitatif dan RGB*, Penerbit AlfaBeta,  
Bandung, 2006

William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Gajah Mada University  
press, Yogyakarta, 2003

Wina Sanjaya, *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*, Penerbit Kencana, Jakarta,  
2009

Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  
Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, 2003.

## **KAJIAN IMPLEMENTASI TUGAS TRI DHAMA DOSEN MATAKULIAH KEWIRAUSAHAAN**

Edi Wahyu Wibowo  
Dosen Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Jakarta  
kaifahal.indonesia@gmail.com; edipreneur79@gmail.com

### **ABSTRAK**

Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Peranan dosen pengampu Matakuliah Kewirausahaan menjadi sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang ingin menjadi pengusaha. Kemampuan dosen Matakuliah Kewirausahaan dapat dicapai kualitasnya melalui tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya.

Implementasi dari pendidikan dan pengajaran matakuliah Kewirausahaan tentunya melaksanakan kegiatan perkuliahan Kewirausahaan secara efektif dengan metode belajar (pedagogik) yang sesuai seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan target pencapaian profit. Implementasi dari penelitian dalam bidang Kewirausahaan dapat membuat modul atau buku Kewirausahaan yang berkualitas, sehingga mudah dipelajari oleh mahasiswa. Dapat juga menciptakan produk / jasa yang dapat dijual dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat, produk tersebut haruslah yang inovatif sehingga masyarakat ingin merasakan manfaat dari produk tersebut. Implementasi dari pengabdian masyarakat dapat bekerja sama dengan pengurus desa/kelurahan untuk membantu program pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM). Kerjasama ini melibatkan mahasiswa sehingga ada sinergi antara teori yang didapat di kelas dengan praktek dilapangan. Implementasi dari kegiatan penunjang dengan menghadiri kegiatan seminar kewirausahaan, sehingga dapat memperoleh keilmuan baru dan juga relasi baru yang dapat bermanfaat untuk peningkatan saat pembelajaran matakuliah Kewirausahaan nantinya.

*Kata kunci : Kewirausahaan; Dosen Kewirausahaan; Tri Dharma Perguruan Tinggi*

### **PENDAHULUAN**

Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. Saat ini, jumlah wirausaha yang terdapat di Indonesia mencapai 400 ribu jiwa atau kurang dari 1% populasi penduduk Indonesia yang berkisar 200 juta jiwa. Kondisi ini sangat berbanding terbalik dengan yang terjadi di Amerika Serikat misalnya yang memiliki

jumlah wirausaha sebesar 11,5% dari populasi penduduknya atau negara tetangga yaitu Singapura dengan 7,2% warganya bekerja sebagai wirausaha. Efeknya tidak mengherankan bila kedua negara tersebut menjadi salah satu negara dengan perkembangan ekonomi termaju di dunia. Jika melihat jumlah kebutuhan wirausaha baru untuk memosisikan Indonesia sebagai negara maju, setidaknya masih butuh waktu 25 tahun lagi untuk mencapainya (Rukka, 2011). Estimasi waktu yang cukup lama tersebut menuntut perlu segera diupayakan langkah-langkah agar jumlah wirausaha baru dapat bertambah dengan waktu pencapaian yang relatif singkat. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan penciptaan wirausaha baru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Penciptaan lulusan perguruan tinggi yang menjadi seorang wirausahawan tidak serta merta mudah untuk dilaksanakan. Berdasarkan bukti empiris di lapangan, terdapat kecenderungan bahwa lulusan perguruan tinggi lebih senang memilih bekerja dengan tingkat kenyamanan/keamanan serta kemapanan dalam waktu yang singkat.

Dari sisi pembentukan karakter seorang wirausaha/entrepreneur, perguruan tinggi sudah seharusnya menciptakan atmosfer yang dapat mendorong sikap mandiri bagi sivitas akademika. Hal ini dapat dicapai melalui; 1) Mengembangkan dan membiasakan unjuk kerja yang mengedepankan ide kreatif dalam berpikir dan sikap mandiri bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran (menekankan model latihan, tugas mandiri, problem solving, cara mengambil keputusan, menemukan peluang, dst), 2) Menanamkan sikap dan perilaku jujur dalam komunikasi dan bertindak dalam setiap kegiatan pengembangan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai modal dasar dalam membangun mental entrepreneur pada diri mahasiswa, 3) Para praktisi pendidikan juga perlu sharing dan memberi dukungan atas komitmen pendidikan mental entrepreneurship ini kepada lembaga-lembaga terkait dengan pelayanan bidang usaha yang muncul di masyarakat agar benar-benar berfungsi dan benar-benar menyiapkan kebijakan untuk mempermudah dan melayani masyarakat. Praktisi pendidikan penting juga menjalin hubungan erat dengan dunia usaha agar benar-benar terjadi proses learning by doing. Peranan dosen pengampu Matakuliah Kewirausahaan menjadi sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang ingin menjadi pengusaha. Kemampuan dosen Matakuliah Kewirausahaan dapat dicapai kualitasnya melalui tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan bagian visi dan misi yang menjadi tujuan untuk seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Baik itu perguruan tinggi negeri mau pun perguruan tinggi swasta. Tuntutan terhadap perguruan tinggi dewasa ini bukan

hanya sebatas kemampuan untuk menghasilkan lulusan yang diukur secara akademik, melainkan kese-luruhan program dan lembaga-lembaga per-guruan tinggi harus mampu membuktikan kualitas yang tinggi didukung oleh akuntabilitas. Faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dan kualitas suatu perguruan tinggi diantaranya adalah kemampuan dosen dalam melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi (Hidayat, 2013). Tugas utama dosen adalah melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, disebutkan bahwa dosen adalah pendidik dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Depdiknas, 2010:1). Berdasarkan tugas utama dosen di atas jelaslah bahwa pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menuntut dosen dalam pelaksanaannya.

Terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dosen Matakuliah Kewirausahaan memegang peran penting dan strategis. Peran, tugas, dan tanggung jawab dosen Matakuliah Kewirausahaan sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional (Depdiknas, 2010). Tugas utama dosen Matakuliah Kewirausahaan adalah sebagai pendidik, dosen Matakuliah Kewirausahaan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mendidik mahasiswa menjadi individu yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang berguna bagi kehidupannya dan diperlukan untuk menjadi pengusaha, melalui kemampuannya mengajar berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, disamping tanggung jawab dalam bentuk sikap dan perilaku yang benar dalam bertindak melalui sifat ketauladannya sebagai manusia yang bermoral. Tugas dan tanggung jawab dosen Matakuliah Kewirausahaan tidak hanya terbatas dalam hal *transferring of knowledge* semata. Dosen matakuliah Kewirausahaan memikul tanggung jawab individual dan kolektif. Tanggung jawab individual adalah tanggung jawab secara akademik, sedangkan tanggung jawab kolektif adalah tanggung jawab selaku senat perguruan tinggi. Tugas dan tanggung jawab dosen tidak hanya sebagai pendidik dan peneliti tetapi juga berperan sebagai penyebar informasi dan agen pembaharuan, yang mana sejalan dengan fungsi perguruan tinggi sebagai



lembaga pendidikan. Tugas dan tanggung jawab dosen yang diamanatkan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi mencakup: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi) khususnya dalam bidang kewirausahaan.

## **KAJIAN TEORI**

### **A.Matakuliah Kewirausahaan**

Kewirausahaan merupakan faktor penting dalam pengembangan dan kesejahteraan masyarakat, hal ini mendorong perguruan tinggi untuk memperkenalkan kompetensi yang dimuat dalam kurikulum pada hampir semua bidang dan program (Marta Peris, 2016). Interaksi dengan mitra sektor swasta dan publik telah bertambah, dan kantor-kantor telah menciptakan untuk membantu membentuk perusahaan baru.. Siswa memiliki akses mendapatkan pelatihan melalui kegiatan ekstra kurikuler dan mata pelajaran. Namun, kewirausahaan dalam studi penelitian belum cukup terintegrasi ke dalam kurikulum lembaga pendidikan tinggi. Sebagian besar keterampilan tidak dipertimbangkan dalam kurikulum mata pelajaran, sementara keterampilan ini dapat dipelajari baik secara langsung atau dengan menentukan kompetensi di program pendidikan tinggi. Pada dasarnya pendidikan tinggi mengembangkan pengajaran dan strategi yang meningkatkan kewirausahaan pada siswa mereka belajar.

Definisi kewirausahaan adalah kesadaran dalam meningkatkan peluang baru dalam bisnis, selalu ada hubungannya dengan menciptakan baru dan cara penggunaan sumber daya alam. Kewirausahaan adalah tentang mengadopsi pola pikir dan sistem kepercayaan bahwa selalu ada cara untuk menggunakan kreativitas, gairah, dan visi terinspirasi untuk menciptakan nilai dalam dunia-atau mengambil sesuatu yang sudah ada dan membuatnya lebih baik. Sementara definisi pengusaha dapat diidentifikasi sebagai sekelompok besar individu yang berani untuk kemajuan ekonomi, mereka melakukan sesuatu dengan cara-cara cepat dan baru serta lebih baik dalam melakukan sesuatu. Pengusaha memiliki peran manajerial. Ia bertindak sebagai pemimpin dan manajer karena menjadi peran penting dalam koordinasi produksi dan distribusi (Marta Peris, 2016).

Adapun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya. Selain itu, kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari

kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakekatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata secara kreatif.

Dari beberapa konsep yang ada, setidaknya terdapat 6 hakekat penting kewirausahaan yaitu:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*).
5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*creative*), dan sesuatu yang berbeda (*innovative*) yang bermanfaat memberi nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien, memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada, dan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen.

Berdasarkan keenam konsep diatas, secara ringkas kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai sesuatu kemampuan kreatif dan inovatif (*create new and different*) yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi risiko. Dari segi karakteristik perilaku, Wirausaha (entepreneur) adalah mereka yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan miliknya sendiri. Wirausaha adalah mereka yang bisa menciptakan kerja bagi orang lain dengan berswadaya. Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai kemampuan normal, bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) peluang dan (2) kemampuan menanggapi peluang.

## **B.Kajian Implementasi Tugas Tri Dharma Dosen Matakuliah Kewirausahaan**

Menurut PP Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen menyebutkan dosen harus memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi-kompetensi tersebut yang harus dimiliki oleh Dosen Matakuliah Kewirausahaan meliputi:

### 1. Kepribadian

Seorang dosen Matakuliah Kewirausahaan dituntut mempunyai nilai, komitmen dan etika professional yang mempengaruhi semua bentuk perilakunya baik terhadap mahasiswa, rekan, keluarga dan masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi motivasi belajar mahasiswa serta mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dirinya. Untuk menilai masalah kepribadiannya ini maka yang dinilai adalah;

- a. Kewibawaan sebagai pribadi dosen
- b. Kearifan dalam mengambil keputusan
- c. Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku
- d. Satunya kata dan tindakan
- e. Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi dan kondisi
- f. Adil dalam memperlakukan sejawat, karyawan dan mahasiswa

### 2. Profesional

Seorang dosen Matakuliah Kewirausahaan dalam melaksanakan tugasnya harus mempunyai suatu kemampuan yang tumbuh secara terpadu dari pengetahuan yang dimilikinya tentang bidang ilmu tertentu yang menghasilkan keterampilan menerapkan pengetahuan yang dimilikinya tentang bidang ilmu Kewirausahaan yang dikuasainya tersebut untuk memajukan, memperbaiki dan mengembangkan secara berkelanjutan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Penilaiannya berdasarkan;

- a. Penguasaan bidang keahlian Matakuliah Kewirausahaan yang menjadi tugas pokoknya
- b. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik Kewirausahaan yang diajarkan dengan bidang/topik lain
- c. Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang keahlian Kewirausahaan yang diajarkan dengan konteks kehidupan
- d. Penguasaan isu-isu mutakhir dalam bidang Kewirausahaan yang diajarkan

- e. Kesiapan melakukan refleksi dan diskusi (*sharing*) permasalahan pembelajaran yang dihadapi dengan kolega dalam bidang Kewirausahaan
- f. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian/kajian dan atau pengembangan /rekayasa /desain yang dilakukan dosen khususnya dalam bidang Kewirausahaan
- g. Kemampuan mengembangkan ipteks untuk pemutakhiran pembelajaran dalam bidang Kewirausahaan
- h. Keterlibatan dalam kegiatan ilmiah organisasi profesi dalal bidang Kewirausahaan.

### 3. Pedagogik

Pedagogik adalah kemampuan seorang dosen Matakuliah Kewirausahaan dalam melakukan proses pembelajaran yang terdiri dari kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran dan kemampuan memanfaatkan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya.

Dengan poin penilaiannya berdasarkan;

- a. Kesungguhan dalam mempersiapkan perkuliahan
- b. Keteraturan dan ketertiban penyelenggaraan perkuliahan
- c. Kemampuan mengelola kelas
- d. Kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan akademik
- e. Penguasaan media dan teknologi pembelajaran
- f. Kemampuan melaksanakan penilaian prestasi belajar mahasiswa
- g. Objektivitas dalam penilaian terhadap mahasiswa
- h. Kemampuan membimbing mahasiswa
- i. Berpersepsi positif terhadap kemampuan mahasiswa

### 4. Sosial

Dosen Matakuliah Kewirausahaan diharapkan mempunyai kemampuan melakukan hubungan sosial dengan mahasiswa, kolega, karyawan dan masyarakat untuk menunjang pendidikan.

Hal ini dinilai dari;

- a. Kemampuan menyampaikan pendapat
- b. Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain
- c. Mudah bergaul di kalangan teman sejawat, karyawan, dan mahasiswa
- d. Mudah bergaul di kalangan masyarakat
- e. Toleransi terhadap keberagaman di masyarakat

Keempat kompetensi ini merupakan hal yang sangat penting, karena kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen (Kemenag, 2011) lebih khusus lagi untuk dosen matakuliah Kewirausahaan.

### *1. Pendidikan dan Pengajaran Matakuliah Kewirausahaan*

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan terbagi dua menjadi;

#### A. Pengajaran Matakuliah Kewirausahaan

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan, bengkel/studio/kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan yang berkaitan dengan Kewirausahaan.
2. Mengembangkan program kuliah yang berkaitan dengan Kewirausahaan
3. Mengembangkan bahan pengajaran Matakuliah Kewirausahaan
4. Menyampaikan orasi ilmiah Matakuliah Kewirausahaan

Pengajaran adalah merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Penilaian untuk pengajaran adalah berapa banyak dosen tersebut mengampu Matakuliah Kewirausahaan pada satu semester.

#### B. Pembimbingan Matakuliah Kewirausahaan

1. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan mahasiswa dalam bidang kewirausahaan
2. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi dalam bidang kewirausahaan

Implementasi dari pendidikan dan pengajaran matakuliah Kewirausahaan tentunya melaksanakan kegiatan perkuliahan Kewirausahaan secara efektif dengan metode belajar (pedagogik) yang sesuai seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah,

pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan target pencapaian profit. Selain itu dapat juga berperan aktif membuat Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan dimana mahasiswa yang mempunyai bakat dalam bidang usaha dapat terus melakukan usahanya diluar perkuliahan dengan bimbingan dari dosen Kewirausahaan.

## *2. Penelitian Kewirausahaan*

Dosen Matakuliah Kewirausahaan selain bertugas dalam proses pembelajaran juga dituntut untuk melakukan penelitian dan pengembangan minimal dua kali dalam satu tahun. Hal ini merupakan salah satu bentuk proses kreatif dosen dalam memajukan wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diharapkan bisa membawa pengaruh yang baik dan semakin maju kepada masyarakat. Hasil dari penelitian, eksperimen dan pengembangan sebagai salah satu bentuk pelayanan pemecahan masalah yang terjadi, peningkatan efisiensi dunia usaha dan industri, serta perbaikan mental masyarakat yang menunjang pembangunan watak dan kesejahteraan bangsa.

### *a. Karya Ilmiah*

1. Menghasilkan karya ilmiah dalam bidang kewirausahaan
2. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bidang kewirausahaan
3. Mengedit/Menyunting karya ilmiah dalam bidang kewirausahaan

### *b. Penelitian*

1. Membuat rancangan dan karya teknologi yg dipatenkan
2. Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukkan/karya sastra

Implementasi dari penelitian dalam bidang Kewirausahaan dapat membuat modul atau buku Kewirausahaan yang berkualitas, sehingga mudah dipelajari oleh mahasiswa. Dapat juga menciptakan produk / jasa yang dapat dijual dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat, produk tersebut haruslah yang inovatif sehingga masyarakat ingin merasakan manfaat dari produk tersebut.

## *3. Pengabdian Kepada Masyarakat*

Pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya pengenalan, penyebarluasan, dan penerapan hasil penelitian baik itu dari dosen Matakuliah Kewirausahaan yang bersangkutan ataupun merupakan penerapan teknologi atau sikap hidup yang berkemajuan sebagai kegiatan

pengembangan untuk memajukan kebudayaan dan peradaban masyarakat melalui sebagai berikut :

#### A. Pengabdian Masyarakat

1. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam bidang kewirausahaan
2. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat dalam bidang kewirausahaan
3. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan dalam bidang kewirausahaan

#### B. Kegiatan Profesional (di luar lingkungan kampus)

1. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah/ pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya dalam bidang kewirausahaan
2. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang kewirausahaan

Implementasi dari pengabdian masyarakat dapat bekerja sama dengan pengurus desa/kelurahan untuk membantu program pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), contohnya membuatkan website untuk para UKM, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan usaha. Kerjasama ini melibatkan mahasiswa sehingga ada sinergi antara teori yang didapat di kelas dengan praktek dilapangan.

#### *4. Penunjang*

Selain melaksanakan tugas dan perannya sebagai seorang pendidik, seorang dosen matakuliah kewirausahaan juga diharapkan untuk mengembangkan profesionalisme di bidang kewirausahaan dengan mengikuti organisasi profesi atau kegiatan ilmiah lainnya. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ilmiah dan organisasi profesi selain bisa berinteraksi dengan sesama ilmuwan maka juga bisa mengembangkan keilmuannya sesuai dengan bidang kewirausahaan. Dengan demikian ilmu yang dimilikinya tidak statis tapi berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu yang terjadi.

#### A. Kegiatan Ilmiah

1. Menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada Perguruan Tinggi dalam bidang kewirausahaan

2. Mewakili Perguruan Tinggi/Lembaga Pemerintah duduk dalam panitia antar Lembaga dalam bidang kewirausahaan
3. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional dalam bidang kewirausahaan
4. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah dalam bidang kewirausahaan
5. Menulis buku pelajaran SLTA ke bawah yang diterbitkan dan diedarkan secara Nasional dalam bidang kewirausahaan

#### B. Organisasi Profesi

1. Menjadi anggota Organisasi Profesi dalam bidang kewirausahaan
2. Menjadi anggota panitia/badan pada Lembaga Pemerintah dalam bidang kewirausahaan

#### C. Penghargaan

Mendapatkan tanda jasa/penghargaan dalam bidang kewirausahaan

Implementasi dari kegiatan penunjang dengan menghadiri kegiatan seminar kewirausahaan, sehingga dapat memperoleh keilmuan baru dan juga relasi baru yang dapat bermanfaat untuk peningkatan saat pembelajaran matakuliah Kewirausahaan nantinya.

### **KESIMPULAN**

Salah satu faktor yang menyebabkan sebuah negara menjadi maju adalah ketika jumlah wirausahawan yang terdapat di negara tersebut berjumlah 2% dari populasi penduduknya. kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*create new and different*) melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Peranan dosen pengampu Matakuliah Kewirausahaan menjadi sangat penting dalam menghasilkan lulusan yang ingin menjadi pengusaha. Kemampuan dosen Matakuliah Kewirausahaan dapat dicapai kualitasnya melalui tugas dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan penunjang lainnya.

Implementasi dari pendidikan dan pengajaran matakuliah Kewirausahaan tentunya melaksanakan kegiatan perkuliahan Kewirausahaan secara efektif dengan metode belajar (pedagogik) yang sesuai seperti pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek dengan memberikan target pencapaian profit. Selain itu dapat



juga berperan aktif membuat Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan dimana mahasiswa yang mempunyai bakat dalam bidang usaha dapat terus melakukan usahanya diluar perkuliahan dengan bimbingan dari dosen Kewirausahaan. Implementasi dari penelitian dalam bidang Kewirausahaan dapat membuat modul atau buku Kewirausahaan yang berkualitas, sehingga mudah dipelajari oleh mahasiswa. Dapat juga menciptakan produk / jasa yang dapat dijual dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat, produk tersebut haruslah yang inovatif sehingga masyarakat ingin merasakan manfaat dari produk tersebut. Implementasi dari pengabdian masyarakat dapat bekerja sama dengan pengurus desa/kelurahan untuk membantu program pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM), contohnya membuatkan website untuk para UKM, memberikan penyuluhan tentang pentingnya pencatatan usaha. Kerjasama ini melibatkan mahasiswa sehingga ada sinergi antara teori yang didapat di kelas dengan praktek dilapangan. Implementasi dari kegiatan penunjang dengan menghadiri kegiatan seminar kewirausahaan, sehingga dapat memperoleh keilmuan baru dan juga relasi baru yang dapat bermanfaat untuk peningkatan saat pembelajaran matakuliah Kewirausahaan nantinya.

Dengan mengimplementasikan Tri Dharma diharapkan dosen Kewirausahaan dapat menghasilkan mahasiswa yang berkualitas, sehingga harapannya banyak tumbuh wirausahawan baru di Indonesia yang pada akhirnya dapat memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Depdiknas, *Pedoman Operasional PAK Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar*. Jakarta, 2009
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, *Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2010
- Hidayat, Alfian, *Tri Dharma perguruan Tinggi*.<http://alfianh.ngeblog.itelkom.ac.id>, 2013
- Ida Widaningrum, *Sistem Informasi Evaluasi Kinerja Dosen Aspek Kompetensi dan Tridarma di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, Jurnal Multitek Indonesia Vol. 6, No 1 , Juni 2012, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2012

Kemenag, *Petunjuk Teknis peningkatan Kompetensi Dosen PTAI*.<http://www.pendis.kemenag.go.id>. Diakses 29 Agustus 2013, 2011

Media Roza, *Produktivitas Dosen dalam Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi*, *Jurnal Tarbiyah al-Awlad*, Volume IV Edisi 1 hlm. 398-407

Marta Peris Ortiz . 2016 . *Education Tools for Entrepreneurship Creating an Action-Learning Environment through Educational Learning Tools*. Newyork:Springer.

Rukka, Muhammad Rusli. 2011. *Buku Ajar Kewirusahaan -I..* Makassar :Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Sri Yuliawati, *Kajian Impelemntasi Tri Dharma Perguraun Tinggi Sebagai Fenomena Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Pendidikan*, Pascasarjana UHAMKA, Tahun 29 Nomor 318 Maret 2012

## **OPTIMALISASI PERGURUAN TINGGI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA**

Ida Ri'aeni\*

[Ida.iswahyudi@yahoo.com](mailto:Ida.iswahyudi@yahoo.com)  
Prodi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Cirebon

### **Abstrak**

Kinerja dosen di lingkungan perguruan tinggi meliputi aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sudah menjadi kewajiban dasar. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut membutuhkan kesadaran, kemauan dan ketrampilan bagi setiap dosen dalam menjalaninya. Pilihan menjadi pendidik di lingkungan perguruan tinggi, tentu melibatkan upaya-upaya tertentu dalam menunjang proses suksesnya pencapaian kinerja dosen pada ketiga hal tersebut. Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dosen dan sivitas akademika pun memiliki peran penting. Terutama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa, saling mengingatkan kepada sesama rekan akademisi atau melakukan kontrol terhadap pengampu kebijakan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Selain itu, adanya pusat kajian yang terus berkembang dalam melakukan pengawasan terhadap isu KKN dan melakukan jejaring dengan berbagai pihak demi semangat pemberantasan korupsi.

***Kata Kunci: Anti Korupsi, Perguruan Tinggi, Peran Dosen***

### **A. Pendahuluan**

Media massa kita tak pernah lepas memberitakan kasus korupsi. Sebut saja Kasus Bank Century, Skandal Wisma Atlet, Kasus Simulator SIM, dan berbagai Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan suap oleh KPK yang marak belakangan ini. Pada 2011 lalu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendesak dilakukannya pengawasan internal secara ketat di lembaga pemerintahan, di antaranya untuk pegawai negeri sipil (PNS) muda. Hal tersebut terkait maraknya tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan PNS berusia muda. PPATK sudah menyampaikan analisis itu kepada setiap Inspektorat Jenderal di kementerian, terutama jika ada indikasi ada yang mempunyai kekayaan yang tidak wajar dan bergaya hidup mewah. Contoh adanya indikasi gaya hidup mewah PNS muda, misalnya dengan gaji Rp 4 juta, mereka menyekolahkan anak dengan biaya per orang Rp 2 juta. Padahal anaknya ada tiga orang. Beberapa contoh sektor yang

rawan korupsi, yakni jabatan dengan kewenangan memungut retribusi atau pajak, memberi perizinan, atau pengadaan proyek. Sayangnya, PNS muda yang mungkin melakukan tindakan korupsi adalah mereka yang berumur 28 tahun dengan golongan 3B yang sudah memiliki kewenangan. Mereka ini sebenarnya punya potensi. Ini anak-anak pintar.

Sejak 2002, PPATK sudah menemukan 1.818 transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri dan non-PNS. Ada 10 nama PNS muda berumur 28 hingga 38 tahun dengan transaksi keuangan mencurigakan. Bahkan, ada temuan dua PNS muda yang mengadakan proyek fiktif, mengambil belasan miliar rupiah, kemudian bagi dua. Parahnya, uang itu kemudian ditransfer kepada istrinya yang melakukan pencucian uang dengan cara memasukan dana ke dalam asuransi, membeli emas, serta valuta asing. (id.berita.yahoo.com, diakses 6 Desember 2016)

Fenomena korupsi sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Di sejumlah negara lain pun, korupsi menjadi persoalan yang rumit. Namun, korupsi di Indonesia seperti sudah mudah mendarah daging, karenanya tak heran kalau di negeri ini apapun kalangannya sudah akrab dengan istilah korupsi. Kalangan akademisi, di perguruan tinggi juga tak lepas dari beberapa kasus korupsi.

Korupsi juga dianggap sebagai kenyataan hidup. Korupsi justru dianggap sebagai salah satu cara bertahan hidup (survival). Untung memenangkan tender suatu proyek, seorang pengusaha harus memberi pelicin; untuk mengurus surat-surat di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga pusat, seseorang harus mengeluarkan uang ekstra. Tanpa itu, jangan berharap surat-surat yang diurusnya akan cepat selesai.<sup>39</sup>

Dalam persoalan korupsi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agaknya tidak pernah sepi dari sorotan publik. Setelah masalah gaya hidup hedonis yang dipertontonkan sebagian anggotanya yang kedapatan memiliki mobil supermewah, kini masalah yang jauh lebih parah kembali mendera mereka: praktik jual-beli pasal. Adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, yang mencuatkan masalah ini ke tengah publik. Menurutnya, sejak tahun 2003 ada 406 kali uji materi terhadap produk UU, sementara yang dikabulkan MA ada 97 buah. Disinyalir bahwa salah satu penyebab buruknya produk legislasi di DPR adanya praktik jual beli pasal.

Sebenarnya praktik jual beli pasal bukanlah barang baru bahkan sudah merupakan rahasia umum yang kerap terjadi. Di masa Orde Baru, misalnya pada penghujung 1997, DPR pernah menghebohkan dunia politik tanah air ketika diundang ke sebuah hotel untuk

---

<sup>39</sup> Budi Winarno, 2008.

membahas RUU Ketenakerjaan. Disinyalir bahwa dana yang digunakan untuk membiayai semua proses pembahasan RUU tersebut adalah dana Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek). Menurut Abdul Latief, Menaker waktu itu, PT Jamsostek menyediakan dana 3,1 miliar untuk kepentingan tersebut. Pada masa reformasi ternyata kecenderungan praktik jual beli pasal tidak juga surut. Beberapa indikator praktik kotor tersebut dapat dikemukakan. Pada periode 2004-2009 pembahasan RUU tentang Aceh Nangroe Darussalam di DPR mencuatkan dugaan praktik itu. Pada periode sekarang pun juga demikian, pembahasan beberapa RUU memunculkan dugaan praktik jual beli seperti UU Kesehatan, RUU Otoritas Jasa dan Keuangan dan sebagainya. Menghilangnya ayat tembakau dari UU Kesehatan kian menegaskan kecenderungan itu.

Salah satu akar masalah kecenderungan di atas adalah adanya politik transaksional sejak para anggota DPR masih menjadi caleg dan berkontestasi di dalam pemilu legislatif. Sudah bukan rahasia lagi bahwa politik uang (*votter buying*) umum dilakukan oleh para caleg ketika melakukan pencalonan pada pemilu. Seorang caleg pusatnya, misalnya, bisa mengeluarkan dana puluhan miliar demi memperoleh kursi di legislatif. Dan ketika mereka terpilih menjadi anggota legislatif, transaksi UU menjadi salah satu cara untuk mengembalikan modal dengan cepat.

Sayangnya menanggapi kritikan tersebut para anggota legislatif justru bersikap reaktif. Mereka malah menantang Mahfud MD untuk membuktikan tuduhannya. Tentu saja reaksi tersebut dapat dinilai berlebihan oleh publik karena mereka seolah-olah ingin menutupi aib yang sesungguhnya sudah diketahui publik.

Alih-alih mempertontonkan reaksi yang berlebihan seharusnya para anggota legislatif bersikap bijak dengan menjadikan kritikan tersebut sebagai masukan dan koreksi internal atas kinerja mereka. Bahkan semestinya mereka mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal semua pembahasan UU di DPR sehingga terhindar dari praktik-praktik yang menyakitkan hati rakyat. Bukankah UU dibuat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia?

Kritikan itu sebenarnya juga bisa dijadikan masukan bagi partai-partai politik. Bagaimanapun, kecenderungan seperti ini tidak terlepas dari kesalahan partai yang tidak selektif dalam melakukan pencalegan. Banyak partai yang hanya menekankan aspek popularitas dan uang bagi caleg-calegnya, sehingga ketika mereka masuk ke lembaga

legislatif, kualitasnya jauh di bawah standar dan mudah tergoda praktik-praktik haram demi mengembalikan modal.<sup>40</sup>

Selanjutnya, kabar adanya pembantaian massal ini terkuak saat para puluhan petani dari Lampung mendatangi Komisi III Bidang Hukum DPR, Rabu, 14 Desember 2011. Didampingi Mayor Jenderal (Purn) TNI Saurip Kadi, mereka membawa bukti rekaman video pembantaian 30 petani di Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat, Lampung. Dalam video itu jelas terlihat adanya pembantaian yang dilakukan dengan keji oleh orang-orang berseragam loreng. Bahkan, ada dua video yang merekam proses pemenggalan dua kepala pria. Satu pria bersenjata api laras panjang dengan penutup wajah tampak memegang kepala yang telah dipenggal. Video itu juga memperlihatkan rumah penduduk yang rusak parah. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu dituduh para petani telah menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet.<sup>41</sup>

Bangunan ibadah dihancurkan, hasil panen singkong juga dirampas. Aparat juga melakukan pemerkosaan terhadap janda, pada saat pengusuran, menurut kuasa hukum warga, Bob Hasan di Gedung DPR, Rabu 14 Desember 2011. Peristiwa ini berawal dari perluasan lahan oleh perusahaan PT Silva Inhutani sejak tahun 2003. Perusahaan yang berdiri tahun 1997 itu, terus menyerobot lahan warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet. Sementara, mantan anggota DPR Mayor Jenderal (Purn) Saurip Kadi, yang ikut mendampingi warga mengatakan, perusahaan itu kesulitan mengusir penduduk dan kemudian meminta bantuan aparat. Selain meminta bantuan aparat, perusahaan itu juga membentuk kelompok keamanan sendiri. Menurut Saurip, perusahaan membentuk Pam Swakarsa untuk membenturkan rakyat dengan rakyat tapi di belakangnya aparat. Ketika warga mengadu ke aparat tidak dilayani. Intimidasi dari oknum aparat dan pihak perusahaan sangat masif di sana. Dalam aksi pengusuran itu, setidaknya ada 30 korban tewas dan ratusan warga terluka sejak tahun 2009 sampai 2011.

Sementara salah satu penduduk yang juga menjadi korban dari Desa Simpang Pematang, Mesuji, Mathias Nugroho, meminta kepada para anggota Komisi Hukum untuk mendesak Kepolisian memberi perlindungan kepada warga. Hal ini karena, hingga saat ini warga terus dihantui rasa takut. Mathias juga menceritakan, setidaknya ada 120 warga yang

---

<sup>40</sup> Politik Transaksional Demi Mengembalikan Modal (Analisis di Pikiran Rakyat, Kamis 24 Nopember 2011) oleh Iding R. Hasan pada 24 November 2011

<sup>41</sup> <http://nasional.vivanews.com>, 15 Desember 2011.

ditahan Kepolisian. Salah satunya, ayahnya, Yudas, dengan sangkaan menduduki lahan tanpa izin. Bapak dari Mathas ditahan sudah tujuh bulan. Sudah divonis satu tahun di pengadilan. Yang lain ada yang masih ditahan. Ada juga yang sudah bebas. Selain terjadi di Mesuji, penggusuran dengan pembunuhan keji ini juga terjadi di daerah Tulang Bawang Induk dan Tulang Bawang Barat.

Beberapa kasus di atas merupakan bukti maraknya peristiwa karena ketimpangan pengelolaan negara. Banyak hal bisa 'dibeli' dengan uang, beragam korupsi di negeri ini, yang berimbas pada banyak hal. Formula SOLVE (*State, Outline, List, Visualise, Evaluate*)<sup>42</sup> akan memudahkan kita membahas tentang masalah korupsi ini.

## **B. Kajian Teoritis**

Sejak reformasi, pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) begitu digaungkan. Ketika kata-kata ini semakin populer, artinya kadang menjadi kabur. Huntington (1968: 59), mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Selanjutnya, merujuk definisi Huntington, Heddy Shri Ahimsa-Putra (2002: 43-44) menyatakan persoalan korupsi adalah persoalan politik pemaknaan. Dalam suatu masyarakat yang belum mengalami modernisasi politik yang meluas, di mana budaya politiknya tidak membedakan membedakan antara raja sebagai pejabat dengan raja sebagai pribadi, korupsi bukanlah persoalan yang layak didiskusikan. Ini disebabkan karena raja mempunyai kewenangan untuk menggunakan dana-dana umum, baik atas nama kepentingan pribadi maupun atas nama kepentingan umum. Di Indonesia, budaya politik di mana tidak ada pembedaan antara raja sebagai pejabat publik dengan raja sebagai pribadi telah berkembang sejak dulu, terutama masa kerajaan.<sup>43</sup>

Sebagian orang menilai, bila di runut ke masa lalu, korupsi bukanlah sesuatu yang diwariskan nenek moyang kita yang terkenal sebagai bangsa yang santun dan ramah. Korupsi bukan pula bagian kepribadian bangsa ini. Pendapat ini menilai budaya korup bisa dilihat dari sejarah penjajah kolonial Belanda bukti saat kantor dagang mereka (VOC) menguasai perdagangan dari India sampai Indonesia mengalami kebangkrutan. Telisik punya kabar, rempah-rempah yang mereka kuras habis-habisan untuk diangkut ke negeri mereka ternyata banyak oknum pejabat VOC yang melakukan korupsi dan menyebabkan usaha dagang

---

<sup>42</sup> Kris Cole, 2005.

<sup>43</sup> Budi Winarno, 2008, hal. 65

Belanda tersebut gulung tikar. Namun jika melihat pada pendapat Ahimsha-Putra tadi, mengingat korupsi adalah politik pemaknaan, istilah korupsi baru menjadi persoalan ketika terdapat perbedaan jelas antara individu sebagai pejabat dan individu sebagai pribadi. Korupsi menjadi suatu masalah yang mengalami modernisasi secara luas, misalnya Indonesia. Dalam suatu masyarakat termodernisasi, perbedaan antara pemimpin sebagai pejabat publik dan pemimpin sebagai individu sangat jelas.<sup>44</sup>

Dalam UU NO.31/1999 jo UU No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan: [1] Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2). [2] Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3). [3] Kelompok delik penyuaipan (pasal 5,6, dan 11). [4] Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10). [5] Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12). [6] Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7). [7] Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C).<sup>45</sup>

Secara bahasa, Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.<sup>46</sup>

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, di antaranya:

- memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- penggelapan dalam jabatan;
- pemerasan dalam jabatan;
- ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);
- menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

---

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) diunduh 5 Desember 2011.

<sup>46</sup> <http://www.ti.or.id> Transparency International



Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kriminalitas.

Titik ujung korupsi adalah ***kleptokrasi***, yang arti harafiahnya *pemerintahan oleh para pencuri*, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi tak hanya terjadi di lembaga yudikatif, peradilan, tetapi juga ada di legislatif dan eksekutif. Kondisi ini diketahui pemerintah maupun rakyat. Namun, pemerintah tak berhasil mengatasinya. Inilah kekhawatiran bangsa Indonesia mengarah menjadi negara kleptokrasi, yakni negara yang diperintah oleh para pencuri.<sup>47</sup>

Gun Gun Heryanto, pengajar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, mengatakan "Indonesia semakin terperangkap dalam pusaran kleptokrasi".<sup>48</sup> Kleptokrasi biasa diartikan sebagai negara yang diperintah oleh pencuri. Penguasa memakai uang rakyat untuk memperkaya diri sendiri atau korupsi. Praktik korupsi dilakukan dengan menyelewengkan kewenangan untuk memengaruhi kebijakan. Kondisi itu, terjadi di Indonesia. Korupsi dilakukan lembaga pemegang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ketiga lembaga itu sering kali melakukan persekongkolan untuk menyelewengkan uang rakyat. Kasus suap proyek pembangunan wisma atlet di Palembang, Sumatera Selatan, misalnya, adalah salah satu contoh persekongkolan antara politisi di DPR (legislatif) dan pejabat pemerintah (eksekutif). Adapun kasus suap yang melibatkan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Syarifuddin Umar adalah contoh kejahatan korupsi di lembaga peradilan (yudikatif).

Dalam kesempatan yang sama, senada dengan di atas, Adnan Buyung Nasution berpendapat dua tahun terakhir ini berbagai kasus korupsi semakin terungkap. Mantan

---

<sup>47</sup> Negara Mengarah Kleptokrasi, <http://nasional.kompas.com>, diunduh 6 Desember 2011.

<sup>48</sup> Ibid, 2011.

anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu menegaskan musuh besar negara kita kini adalah korupsi. Ia berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya memberikan pernyataan terkait pemberantasan korupsi, tetapi juga melakukan karya yang lebih nyata. Pemberantasan korupsi butuh kepemimpinan. Ia juga menyarankan Presiden Yudhoyono mengubah kabinetnya, dan menunjuk seorang menteri koordinator bidang hukum dan hak asasi manusia, dan memilih figur yang bersih dan tegas untuk menjabatnya, yang akan memimpin pemberantasan korupsi dengan tegas. Selain itu, KPK harus tetap diperkuat, dan jangan diganggu.

Kleptokrasi akan membuat pemerintahan rusak. Praktik koruptif oleh penguasa juga dapat mengganggu proses konsolidasi demokrasi. Jika terus dibiarkan, Indonesia bisa mengarah pada negara gagal. Indonesia bisa menjadi negara yang gagal sebab penyelenggara negaranya terbelit korupsi di berbagai level. Kondisi ini yang harus segera diatasi oleh pemerintah. Jangan biarkan aparatur negara semakin brutal melakukan korupsi di berbagai lini.

### **Muncul Masyarakat Frustrasi**

Koordinator Public Interest Lawyer Network (PIL-Net) Wahyu Wagiman secara terpisah, Senin di Jakarta<sup>49</sup>, mengakui, masyarakat kini cenderung frustrasi atas tidak adanya jaminan keadilan yang dapat diberikan pemangku kekuasaan. Institusi peradilan, baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pemasyarakatan belum mampu diharapkan bekerja bersih, tanpa korupsi. Kini masyarakat menggantungkan sisa harapannya pada lembaga independen, semisal KPK, Komisi Nasional HAM, dan Komisi Yudisial (KY). Tidak ada yang disisakan bagi masyarakat berkontestasi untuk mencapai keadilannya. Ada perbedaan perlakuan terhadap masyarakat kecil yang mencari keadilan dengan tersangka korupsi, yang umumnya adalah pejabat, pengusaha, atau politisi. Hampir dalam semua kasus, petani kecil itu selalu dikalahkan. Pengusaha dan politisi koruptor selalu menang.

Kelompok Frustrasi Pengadilan, terdiri dari PIL-Net, Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Legal Roundtable (ILR), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, dan sejumlah institusi lain, kemarin, dideklarasikan. Mereka pun menggelar aksi teatrikal di depan gedung KY, menyindir sistem peradilan yang dihancurkan secara sistematis oleh pemangku keadilan, penegak hukum, politisi, pejabat, dan pengusaha melalui cara-cara memperjualbelikan dan mentransaksikan keadilan dengan fasilitas mewah. Mereka juga

---

<sup>49</sup> <http://nasional.kompas.com>, diunduh 6 Desember 2011.

menghadiahi KY sapu dan pengki (serokan sampah), yang melambangkan tugasnya sebagai pembersih lembaga pengadilan dari hakim-hakim nakal.

Kepala Bidang Hukum Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jaleswari Pramodhawardani dan Ketua Badan Pengurus Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) Firmansyah Arifin juga sependapat, terungkapnya kasus suap pada sejumlah hakim, juga pada aparat pemerintah lainnya, makin menggerus kepercayaan rakyat terhadap penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan kontrol dan pengawasan berlapis terhadap kinerja hakim dan penegak hukum agar mereka tidak terus terjangkiti virus korupsi.<sup>50</sup>

Terbongkarnya kasus suap yang melibatkan hakim sangat memprihatinkan. Peradilan adalah benteng terakhir dari proses hukum setelah proses penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Jika benteng terakhir penjaga keadilan tergerogoti virus korupsi, tentu akan sulit dibayangkan penegakan hukum di negeri ini bisa berjalan baik. Tertangkapnya hakim Syarifuddin terkait kasus korupsi sekali lagi membuktikan, mafia hukum dan peradilan masih berjalan. Selama ini dugaan itu terasa, tetapi belum dibuktikan nyata. Karena itu, MA tidak bisa terus-terusan membantah, melainkan harus mengakui adanya masalah dalam tubuh hakim. Sayangnya, memperbaiki sistem peradilan dan hakim di dalamnya tidak otomatis bisa membersihkan penegak hukum lain yang juga memiliki perilaku koruptif. Namun, hal itu harus dilakukan.

## **Jenis-jenis Korupsi**

Menurut asal kata Korupsi berasal dari istilah latin yaitu *corruptio* yang artinya kerusakan. Korupsi adalah perilaku yang menyebabkan kerusakan di segala bidang kehidupan. Berikut beberapa bentuk korupsi<sup>51</sup>:

- 1. Korupsi jalan pintas**, terjadi karena ada hubungan antara sektor ekonomi dan sektor politik dimana sektor ekonomi memberi keuntungan atau jasa pada jumlah tertentu pada sektor politik untuk membuat atau merubah Undang-Undang atau peraturan
- 2. Korupsi upeti**, yaitu korupsi yang karena jabatannya atau kewenangannya dia mengambil keuntungan.

---

<sup>50</sup> <http://nasional.kompas.com>.

<sup>51</sup> <http://www.ti.or.id> Transparency International

3. **Korupsi kontrak**, korupsi yang dilakukan orang yang melakukan upaya-upaya untuk memenangkan proyek pemerintah atau penyelenggara negara yang menyelenggarakan proyek pemerintah tanpa membuka tendan secara umum
4. **Korupsi pemerasan**, aparat penegak hukum atau penyelenggara negara langsung meminta keuntungan atau jasa tertentu kepada perusahaan (biasanya dengan alasan keamanan)

Sementara itu, seorang sosiolog Malaysia, Syed Hussein Alatas menyebutkan tiga bentuk korupsi yaitu: sogokan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme<sup>52</sup>.

Selanjutnya, hasil penggabungan dari beragam definisi oleh Aditjandra diturunkan menjadi tiga macam model korupsi yaitu *model korupsi lapis pertama*, berada dalam bentuk suap di mana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalah kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan di mana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik. *Model korupsi lapis kedua*, jaring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan perusahaan dengan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra dalam Winarno, pada level ini terdapat ikatan nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi dan biasanya pada level nasional. Selanjutnya, *korupsi lapis ketiga*, berlangsung pada lingkup internasional di mana kedudukan aparat penegak hukum dalam model lapis kedua mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai mancanegara yang produknya 'terlebih' oleh pemimpin rezim dalam jaring-jaring korupsi internasional tersebut<sup>53</sup>.

Sementara jika dilihat dari besarnya lingkaran aktor, Budi Winarno membaginya dua yaitu korupsi yang terkonsentrasi dalam tingkat elit kekuasaan (*grand corruption*) dan korupsi yang dilakukan secara massal oleh oknum-oknum pegawai negeri (*petty corruption*)<sup>54</sup>.

### Penyebab dan Dampak Korupsi

Beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab munculnya korupsi di Indonesia<sup>55</sup>. *Pertama*, konsep kekuasaan dalam masyarakat Indonesia, terutama kuatnya pengaruh budaya Jawa. Sebagian besar pejabat atau pegawai birokrasi di Indonesia melihat jabatan sebagai

---

<sup>52</sup> Winarno, hal 65.

<sup>53</sup> Aditjandra, 2002 dalam Winarno, hal 65-66.

<sup>54</sup> Budi Winarno, hal 66.

<sup>55</sup> Budi Winarno, hal. 68-69.

kekuasaan dan ini berarti kekayaan. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan kekuasaan, kecenderungan yang paling nampak adalah dirinya mengakumulasi kekuasaan itu. *Kedua*, karakteristik birokrasi. Karakteristik birokrasi di Indonesia adalah birokrasi warisan kerajaan yang didominasi budaya patrimonial. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat tiga kasus menonjol dalam merefleksikan budaya patrimonial ini, yakni: [1] fenomena patronase di lingkungan elit politik, [2] hubungan simbiosis antara penguasa(birokrat) dan pengusaha; dan ketiga, kecenderungan sentralisasi pada hubungan pusat dan daerah<sup>56</sup>.

Birokrasi Patrimonial ini merupakan warisan masa lampau yang dicirikan oleh dua hal, yakni persepsi mengenai jabatan tentang birokrasi sebagai sumber penghasilan tambahan dan kenyataan bahwa raja-raja Jawa mengutip sebagian kekayaan yang dihasilkan oleh perniagaan dan perdagangan melalui kekuasaannya untuk menarik pajak dan mengendalikan monopoli atas barang-barang strategis.<sup>57</sup> *Ketiga*, maraknya korupsi di Indonesia adalah kuatnya sistem politik otoriter yang dibangun semasa orde baru yang diwarnai pula oleh kekuasaan birokrasi. Sistem ini membuat lembaga-lembaga pengawasan seperti DPR, masyarakat, pers dan LSM sengaja dilemahkan dan memiliki posisi lemah ketika berhadapan dengan penguasa. Dominasi birokrasi dalam sistem politik telah memungkinkan birokrasi untuk menjadi 'otonom' dari pengaruh pihak luar. Pada akhirnya, dominasi ini mendorong individu yang berada di dalamnya berlaku korup dan berimplikasi pada penghamburan sumber daya publik guna mengejar kepentingan pribadi.

Selain itu, korupsi juga semakin subur karena adanya kondisi di mana konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah; lalu kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal; rakyat yang *cuek*, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup ke pemilihan umum; ketidakadaannya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuaipan atau "sumbangan kampanye"; serta proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Hal itupun masih terus diperparah oleh lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan "teman lama", lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa, hingga gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.

---

<sup>56</sup> Priyo Budi Santoso, hal. 52.

<sup>57</sup> Ibid, hal. 57.

Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat membuat orang pada umumnya menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat. Namun hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan, orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi.

Sejatinya, kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang faktor yang cukup menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia, hal ini dikemukakan oleh Guy J Parker dalam tulisannya berjudul "Indonesia 1979: The Record of three decades (Asia Survey Vol. XX No. 2, 1980 : 123). Begitu pula J.W Schoorl mengatakan bahwa " di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai, gaji sebulan hanya sekadar cukup untuk makan selama dua minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan".<sup>58</sup>

Dalam sebuah seminar Ekonomi Trase Baru, untuk menyampaikan indikator keadilan, yaitu penghasilan atau gaji/ upah terendah adalah sepersepuluh dari pendapatan atau gaji/ upah tertinggi. Maka jika di tengah masyarakat kita yang tertinggi mencapai Rp 25 juta per bulan, maka yang terendah atau UMR seharusnya minimal Rp 2,5 juta<sup>59</sup>. Di Indonesia, tidak terjadi hal seperti itu. Kesenjangan tingkat pendapatan sangat berbeda jauh. Pemaparan tingkat pendapatan tersebut, diperlukan bukan dalam konteks kecemburuan, tapi pemosisian secara adil. Pemihakan terjadi untuk mengefektifkan laju pertumbuhan ekonomi. Prinsip *trickle down effect*, awalnya dapat diharapkan mengatasi problem ekonomi bangsa. Sangat disayangkan, prinsip dan konsepsi itu relatif melenceng.

Dampak korupsi di Indonesia adalah hilangnya modal sosial, hilangnya modal finansial, hilangnya modal fisik dan hilangnya modal manusia<sup>60</sup>. Dalam demokrasi, korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum dan di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan; korupsi di sistem

---

<sup>58</sup> Andi Hamzah, 2007.

<sup>59</sup> SK Trimurti, dalam Wawasan dan Visi Pembangunan abad ke-21, 1997, hal. 103.

<sup>60</sup> Holloway, 2002: 61-62 dalam Winarno, 2008: 66.

pengadilan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan masyarakat. Secara umum, korupsi mengikis kemampuan institusi dari pemerintah, karena pengabaian prosedur, penyedotan sumber daya, dan pejabat diangkat atau dinaikan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.

Di bidang ekonomi, Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidak efisienan yang tinggi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus yang baru muncul berkesimpulan bahwa ketersediaan sogokan menyebabkan pejabat untuk membuat aturan-aturan baru dan hambatan baru. Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien.

Korupsi menimbulkan distorsi (kekacauan) di dalam sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktek korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.

Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu faktor keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama di Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal (capital investment) ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri (maka adanya ejekan yang sering benar bahwa ada diktator Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss). Berbeda sekali dengan diktator Asia, seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semuanya (meminta sogok), namun lebih memberikan kondisi untuk pembangunan, melalui investasi infrastruktur, ketertiban hukum, dan lain-lain. Pakar dari Universitas Massachussetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996, pelarian

modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah US \$187 triliun, melebihi dari jumlah utang luar negeri mereka sendiri. Hasilnya, dalam artian pembangunan (atau kurangnya pembangunan) telah dibuatkan modelnya dalam satu teori oleh ekonomis Mancur Olson. Dalam kasus Afrika, salah satu faktornya adalah ketidak-stabilan politik, dan juga kenyataan bahwa pemerintahan baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat dari korupsi. Ini memberi dorongan bagi para pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari ekspropriasi di masa depan.<sup>61</sup>

Selanjutnya, kesejahteraan umum negara Korupsi politis ada di banyak negara, dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar, namun merugikan perusahaan-perusahaan kecil (SME). Politikus-politikus "pro-bisnis" ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka.

### C. Pembahasan

#### Upaya Memberantas Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah sedemikian menggurita. Ia merambah hampir semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Hampir dapat dipastikan, tidak ada satu ranah pun yang tidak tersentuh oleh korupsi, baik itu ranah politik, ekonomi, sosial, budaya bahkan agama. Dari segi efek, kerusakan yang ditimbulkan olehnya juga sedemikian nyata. Mulai dari kebocoran anggaran negara (sekaligus kerugian) dalam jumlah yang besar sampai kepada kemiskinan yang menjerat sebagian besar warga negara. Kerusakan-kerusakan semacam itu, sedikit banyak adalah dampak (langsung ataupun tidak langsung) dari korupsi. Alhasil, korupsi adalah *the root of evil*. Dengan mengasumsikan bahwa kejahatan korupsi di Indonesia sangat eskalatif dan sistemik serta akibatnya massif, maka setiap upaya perlawanan dan *shock therapy* terhadap korupsi oleh gerakan anti korupsi haruslah terstruktur dan sistematis.

Berdasarkan persoalan di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya memberantas korupsi yang mengakar, utamanya di lingkungan perguruan tinggi. *Pertama*,

---

<sup>61</sup> <http://www.ti.or.id> Transparency International



membentuk struktur pemerintahan yang komitmen memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika elit-elit yang berada dalam tampuk pemerintahan tidak mempunyai komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi. Ini disebabkan karena mereka adalah pemegang otoritas tertinggi dalam sistem politik modern untuk merumuskan, merencanakan dan sekaligus menjadi pelaksana bagi pemberantasan korupsi. *Kedua*, menjaga agar sistem politik senantiasa demokratis. *Ketiga*, mendorong lembaga swadaya masyarakat untuk terlibat aktif dalam mengawasi dan publik dan pengadilan kasus-kasus korupsi. *Keempat*, menciptakan lembaga pengadilan yang kredibel dengan akuntabilitas publik yang jelas. *Kelima*, memberikan insentif memadai bagi para pegawai birokrasi. Dalam hal ini, usaha memberantas korupsi juga harus disertai upaya memperjuangkan nasib para pegawai tersebut<sup>62</sup>.

Salah satu diantara sekian cara mensistematisasi gerakan anti korupsi adalah dengan mengidentifikasi peran dan posisi yang bisa dimainkan oleh masing-masing elemen gerakan anti korupsi secara tepat. Melalui cara seperti ini, setiap elemen gerakan anti korupsi akan bisa memberikan kontribusi pemberantasan korupsi secara optimal, dengan tentu saja, tidak mengesampingkan sinergitas dan kolaborasi kerja antar elemen gerakan anti korupsi.

**Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)** adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. "Kekuasaan manapun" yang dimaksud di sini adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang KPK atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>63</sup> Meski pada praktiknya kini, KPK ditengarai mulai memiliki muatan kepentingan tertentu. Setidaknya mengembalikan ingatan pada tujuan awal pembentukan KPK bisa menyegarkan semangat kembali melakukan pemberantasan korupsi dengan netral.

Suatu negara memiliki sebuah kebijakan karena dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengarahkan tindakan-tindakan yang akan dicapai. Kebijakan pemberantasan korupsi

---

<sup>62</sup> Aditjandra, 2002 dalam Winarno, hal 70.

<sup>63</sup> [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) diunduh 5 Desember 2011.

melalui KPK semestinya dijalankan dengan penerapan yang tidak tebang pilih, komprehensif, dan didukung banyak pihak sehingga tujuan bersama akan lebih tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Carl I. Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno bahwa:

“Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”<sup>64</sup>.

Jadi pengertian kebijakan adalah tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan tersebut telah di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah. Suatu kebijakan memiliki hambatan-hambatan tetapi kita harus mencari tahu peluang-peluang yang baik, benar, tepat dan dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang menghambat suatu kebijakan agar dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang di inginkan.

Berdasarkan pengertian di atas maka keputusan atau program kebijakan pemberantasan korupsi yang telah diambil sebagai sebuah alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi atau agen-agen pemerintahan di tingkat bawah, termasuk di perguruan tinggi.

### **Implementasi Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Perguruan Tinggi**

Merujuk pada kebijakan yang seharusnya dilaksanakan pada agen hingga tingkat bawah, dalam konteks perguruan tinggi, kita bisa menganggap peran penting dosen sebagai salah satu dari agen tersebut. Dalam hal ini, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang dimobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia bahwa implementasi tidak hanya melibatkan badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut tentang kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berdampak baik sesuai dengan harapan maupun yang tidak sesuai dengan harapan.

---

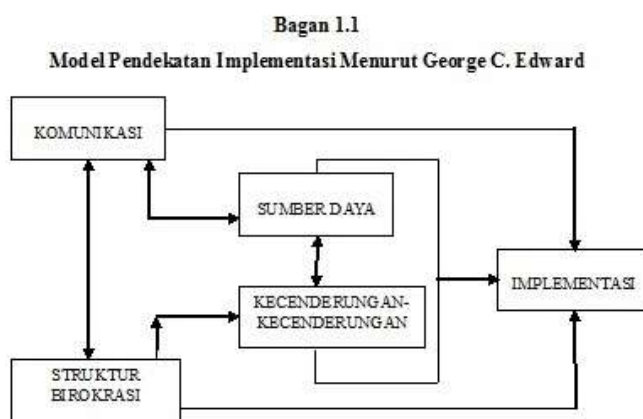
<sup>64</sup> Friedrich dalam Budi Winarno, 2007:17.

Berdasarkan pengertian implementasi di atas George C. Edwards juga mengemukakan beberapa indikator yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang dikutip Budi Winarno, yaitu<sup>65</sup>:

- a. Komunikasi
- b. Sumber-sumber kebijakan
- c. Kecenderungan-kecenderungan
- d. Struktur birokrasi

Selanjutnya pengertian Implementasi menurut George C. Edward diatas, bahwa suatu implementasi dipengaruhi oleh komunikasi, sumberdaya, sikap para pelaksana dan struktur birokrasi yang dimana hal tersebut merupakan suatu sistem yang saling berkaitan.

Dengan demikian, model pendekatan implementasi menurut Geoege C. Edward dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation* yang dikutip Budi Winarno, dapat digambarkan sebagai berikut<sup>66</sup>:



(Sumber: George C. Edward yang dalam Budi Winarno 2007:208)

*Pertama*, faktor komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> George C. Edwards dalam Budi Winarno, 2007:174.

<sup>66</sup> *ibid*, hal. 208.

<sup>67</sup> Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2005:7.

Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain: dimensi transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik, kejelasan, dan konsistensi<sup>68</sup>. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

*Kedua*, menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, mengemukakan beberapa macam sumber daya antara lain: Sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya informasi dan kewenangan<sup>69</sup>.

Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, sumber daya anggaran diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan, sumber daya peralatan sangat penting karena dapat menunjang proses implementasi. Apabila peralatan dalam proses implementasi tidak memadai, maka pemberantasan korupsi tidak dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan sumber daya informasi dan kewenangan, informasi diperlukan oleh para pelaksana agar dapat mengetahui bagaimana cara melaksanakan proses pemberantasan korupsi, sedangkan kewenangan diperlukan oleh para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan dari pemberantasan korupsi itu.

*Ketiga*, Menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh:

“Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemauan dari para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang di implementasikan.<sup>70</sup>

Menurut Van Horn dan Van Meter yang dikutip oleh Budi Winarno, terdapat tiga macam elemen respon yang mempengaruhi keinginan para pelaksana dalam melaksanakan suatu kebijakan, antara lain : Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan<sup>71</sup>. Disposisi sangat diperlukan karena apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

---

<sup>68</sup> George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:175

<sup>69</sup> Ibid, hal. 181.

<sup>70</sup> Budi Winarno, 2007:147

<sup>71</sup> Van Horn dan Van Meter dalam Budi Winarno 2007:165.

*Keempat*, menurut George C. Edward yang dikutip oleh Budi Winarno, struktur birokrasi (*bureaucratic structure*) mencakup dimensi fragmentasi (*fragmentation*) dan standar prosedur operasi (*standar operating procedure*) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya<sup>72</sup>.

Dimensi fragmentasi diperlukan karena tanggung jawab atas suatu bidang kebijakan tidak semata-mata menyatu pada satu instansi saja melainkan menyebar pada berbagai organisasi. Untuk kesuksesan suatu kebijakan memerlukan koordinasi diantara para pelaksana kebijakan, akan tetapi para pelaksana kebijakan masih sering mempertahankan eksistensi sendiri sehingga menyulitkan proses koordinasi.

Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensoins*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut.

Korupsi adalah isu global. Usaha pemberantasan korupsi di Indonesia, harus selalu mengakar pada konteks dan kepentingan bangsa. Namun di tengah dunia yang semakin tanpa batas, maka kita tidak bisa melupakan posisi relatif negara kita dibanding dengan negara-negara lain di dunia dalam usaha pemberantasan korupsi. Krisis ekonomi di Eropa maupun gerakan perlawanan terhadap rezim pemerintahan di negara-negara Arab pada awal tahun ini, menunjukkan bahwa kekacauan suatu negara akibat buruknya tata kelola ekonomi maupun maraknya korupsi tidak hanya akan merusak negara tersebut, namun memiliki potensi efek domino terhadap negara-negara lain di sekitarnya.

Selain itu, perlu adanya monitoring dan evaluasi (*monev*) program pembangunan, sebagai cara mengetahui sejauhmana efektivitas dan efisiensi program yang diterapkan. Monitoring dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. Selanjutnya evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan/atau kegagalan suatu kegiatan atau program<sup>73</sup>.

Salah satu bentuk implementasi komunikasi dan pengawasan yang dilakukan oleh LSM adalah melalui Transparency International (TI). Transparency International (TI)

---

<sup>72</sup> George C. Edward dalam Budi Winarno, 2007:202.

<sup>73</sup> Edi Suharto, 2010: hal 117-119.

kembali meluncurkan Corruption Perception Index (CPI) pada hari ini secara global (1 Desember 2011)<sup>74</sup>. Tujuan peluncuran CPI setiap tahun adalah untuk selalu mengingatkan bahwa korupsi masih merupakan bahaya besar yang mengancam dunia. Tahun ini CPI mengukur tingkat korupsi dari 183 negara, dengan rentang indeks antara 0 sampai dengan 10, di mana 0 berarti negara tersebut dipersepsikan sangat korup, sementara 10 berarti negara yang bersangkutan dipersepsikan sangat bersih. Dua pertiga dari negara yang diukur memiliki skor di bawah lima, termasuk Indonesia.

CPI adalah sebuah indeks gabungan. Indeks ini dihasilkan dari penggabungan hasil 17 survei yang dilakukan lembaga-lembaga internasional yang terpercaya. CPI mengukur persepsi korupsi yang dilakukan politisi dan pejabat publik. Pada tahun ini, 5 negara dengan skor tertinggi adalah Selandia Baru, Denmark, Finlandia, Swedia, dan Singapura. Sementara negara-negara dengan skor terendah (5) adalah Uzbekistan, Afghanistan, Myanmar, Korea Utara, dan Somalia. Pada tahun ini, skor Indonesia dalam CPI adalah 3.0. Bersama dengan Indonesia, ada 11 negara lain yang mendapatkan skor 3.0 dalam CPI tahun ini. Negara-negara tersebut adalah Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Indonesia dan negara-negara tersebut menempati posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Di kawasan ASEAN, skor Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Sementara Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar skornya lebih rendah dari Indonesia.

Pesan yang bisa ditangkap dari hasil CPI adalah tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode pengukuran CPI mensyaratkan kriteria yang dapat menunjukkan indikasi perubahan persepsi korupsi antar tahun (2010 dan 2011) adalah perubahan skor minimal 0.3 didukung dengan perubahan yang konsisten (searah) dari minimal setengah dari sumber data penyusun indeks. Berdasarkan kriteria tersebut, negara-negara yang terindikasi persepsi korupsinya naik adalah Norwegia, Rwanda, Taiwan, Georgia dan Chad. Sementara Oman dan Haiti terindikasi mengalami penurunan. Perubahan skor 0.2 antara tahun 2010 dan 2011 tidak berarti apa-apa secara metodologi, alias pemberantasan korupsi di Indonesia jalan di tempat.

Asumsi seperti ini juga salah satu contohnya dilakukan oleh fakultas hukum UGM, sebagai salah satu "kekuatan gerakan moral" dalam narasi besar pergerakan anti korupsi. Artinya, jika fakultas hukum ingin mengoptimalkan keterlibatannya dalam upaya memerangi korupsi, maka ia harus secara tepat mengidentifikasi peran dan posisi tersebut. Berkenaan

---

<sup>74</sup> <http://www.ti.or.id>

dengan fakultas hukum UGM, identifikasi peran dan posisi strategis dalam skenario perang terhadap korupsi, nampaknya tidak akan jauh dari kapasitasnya selama ini sebagai bagian dari perguruan tinggi yang menjalankan fungsi dan misi TRI DHARMA dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian.

Dalam konteks dan perspektif inilah pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi (PKAK) menemukan urgensi dan nilai strategisnya. Karena kehadiran lembaga ini akan menjadi jawaban yang tepat terhadap kebutuhan optimalisasi peran dan posisi dalam gerakan anti korupsi. PKAK menjadi lembaga di Fakultas Hukum yang peduli dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu hukum dan penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. **Misi Pertama** : Meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja masyarakat kampus dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi, dengan tujuan terbentuk dan terselenggaranya masyarakat kampus dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi. **Misi Kedua** : Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan eksaminasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dengan tujuan terciptanya iklim yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan eksaminasi terhadap putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi. **Misi Ketiga** : Menyelenggarakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan agenda pokok usaha dan cara pemberantasan tindak pidana korupsi, dengan tujuan terselenggaranya KKN tematik dengan agenda pokok usaha dan cara pemberantasan tindak pidana korupsi. **Misi Keempat** : Membentuk dan mengoptimalkan Pusat Kajian Anti Korupsi, dengan tujuan mengoptimalkan Pusat Kajian Anti Korupsi.<sup>75</sup>

#### **D. Simpulan**

Dalam upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dosen dan sivitas akademika jelas memiliki peran penting. Upaya pencegahan tindak pidana korupsi, dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa, saling mengingatkan kepada sesama rekan akademisi atau melakukan kontrol terhadap pengampu kebijakan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Selain itu, adanya pusat kajian yang terus berkembang dalam melakukan pengawasan terhadap isu KKN dan melakukan jejaring dengan berbagai pihak demi semangat pemberantasan korupsi. Secara umum, implementasi pemberantasan korupsi di lingkungan PT, dapat berjalan baik karena beberapa aspek yaitu **Komunikasi, Sumber-sumber kebijakan** yang mendukung,

---

<sup>75</sup> [www.pukatkorupsi.org](http://www.pukatkorupsi.org)

**Kecenderungan-kecenderungan** atau kemauan kuat dari pemegang kebijakan untuk menjalankan suatu kebijakan, serta **Struktur birokrasi** di institusi tersebut.

Merujuk pada tridharma, diberlakukannya mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib, pilihan atau suplemen adalah cara yang bisa dilakukan dalam bidang pendidikan. Pembentukan pusat kajian semacam hal di atas pada lingkungan PT bisa menjadi bagian aspek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal serupa bisa pula didukung dengan diskusi atau seminar anti korupsi yang mendukung program ini. []

### Daftar Pustaka

- Cole, Kris. Komunikasi Sebening Kristal. Bandung: Mizan. 2005.
- Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi. 2007.
- Suharto, Edi. Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat. Refika aditama. 2010.
- Susanto, Azhar. *Sistem Informasi Manajemen Konsep dan Pengembangannya*. Bandung:Lingga Jaya. 2004
- Trimurti, SK. *Urgensi Keadilan untuk Indonesia Mendatang* dalam wawasan dan Visi Pembangunan Abad 21, Penyunting Dawam Raharjo. Intermedia. 1997.
- Wahab, S.A.(1990). *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. *Kebijakan Publik:Teori Dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo ( Anggota IKAPI). 2007.
- Winarno, Budi. *Globalisasi, Peluang atau Ancaman Bagi Indonesia*. Erlangga. 2008.
- Politik Transaksional Demi Mengembalikan Modal (Analisis di Pikiran Rakyat, Kamis 24 Nopember 2011) oleh Iding R. Hasan pada 24 November 2011  
[http://www.kpk.go.id/modules/edito/content\\_faq.php?id=15](http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15) diunduh 6 Desember 2016
- <http://pukat.hukum.ugm.ac.id/index.php?action=profile.main> diunduh 6 Desember 2016
- <http://id.berita.yahoo.com/rawan-korupsi-pns-muda-diawasi-ketat-061110061.html> diunduh 6 Desember 2016
- <http://www.detiknews.com/read/2011/12/06/115300/1783786/10/dpr-tetapkan-pimpinan-dan-ketua-kpk-baru> diunduh 6 Desember 2016
- <http://id.berita.yahoo.com/ppatk-laporkan-pns-dengan-rekening-gendut-073900747.html>; diunduh 6 Desember 2016
- <http://www.beritaunik.net/unik-aneh/jenis-jenis-korupsi.html> diunduh 6 Desember 2016



<http://nasional.kompas.com/read/2011/06/14/03152034/Negara.Mengarah.Kleptokrasi>

diunduh 6 Desember 2016

<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2011/12/01/corruption-perception-index-2011>

diunduh 7 Desember 2016.

<http://nasional.vivanews.com/news/read/272367-dugaan-pembantaian--silva-inhutani->

bungkam, diunduh 15 Desember 2016.

## **PERAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN KELUARGA GUNA PENCEGAHAN TERJADINYA BULLYING PADA ANAK**

Tri Sayekti  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
( [tri\\_sayekti@untirta.ac.id](mailto:tri_sayekti@untirta.ac.id) )

**ABSTRAK.** Pembulian yang terjadi pada masa anak-anak baik jadi pelaku atau korban pembulian adalah sama-sama berdampak negatif terhadap masa depan anak-anak itu kelak. Kesadaran ini harus dimiliki oleh masyarakat terutama di keluarga Indonesia dan khususnya keluarga di Jakarta. Pembulian telah merambah ke kalangan anak-anak tak terkecuali murid TK dan SD. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan maka diharapkan adanya perbaikan dalam cara mendidik anak dalam keluarga dengan mengedukasi masyarakat. Edukasi dilakukan terutama pada para orangtua. Kontribusi pola asuh orang tua diduga turut menjadi penyebab terhadap terjadi pembulian. Dengan pengabdian masyarakat ini standar pengasuhan anak menjadi bagian yang penting untuk dilakukan pada anak secara positif mulai usia dini. Ketika anak di asuh oleh orang tua dengan cinta, kasih dan empati (*attachment parenting*), maka anak akan menerima kasih dan sayang. Dan mereka belajar itu sebagai keteladanan yang sesungguhnya. Mengasuh dengan cinta kunci keberhasilan tercapainya kehidupan yang lebih baik. Karena akan dapat mengarahkan anak mencapai kehidupan yang lebih baik. Konsep *attachment parenting* sesungguhnya dapat menciptakan ikatan yang kuat (kelekatan) antara orang tua dan anak. Kondisi ini akan menimbulkan keseimbangan antara perkembangan individu dan sosial sehingga akan memperoleh suatu kondisi mental sehat dalam diri anak. Adalah tanggung jawab orang tua untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, budi pekerti bahkan nilai religius sejak usia dini kepada anak-anaknya yang akan terus membekas di dalam hati sanubari.

Kata kunci : Pendidikan keluarga, Pola asuh orang tua, Edukasi masyarakat

## PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah sang pencipta kepada setiap orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban yang amat penting untuk merawat, mendidik dan mengasuh anaknya dengan baik dan benar. Menjadi orang tua tentu bukan hal mudah. Hillary Rodham Clinton, mantan *first lady* Amerika Serikat, pernah berkata : "It takes a village to rear children," Butuh orang sekampung untuk membesarkan anak", sedemikian sulitkah untuk membesarkan seorang anak ?. Banyak hal yang terjadi berkaitan dengan permasalahan anak yang ada akhir-akhir ini. Lembaga non formal yang selama ini belum di berdayakan secara optimal yaitu pendidikan dalam keluarga. Maka melalui pengabdian masyarakat di tumbuhkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam keluarga dimana selama ini masih di dominasi otoritas orang tua dan belum di dukung seperangkat "kurikulum" sebagaimana pendidikan formal yang dapat diterapkan oleh masing-masing keluarga. Peran pengabdian masyarakat yang dilakukan sangat penting agar di ketahui para keluarga bahwa keluarga merupakan bagian dasar dan penting dalam memberikan pendidikan anak terutama pendidikan bertingkah laku dan pendidikan moral. Dengan pendidikan keluarga yang berkualitas maka akan menghasilkan anak yang berkualitas pula.

Kepedulian yang dilakukan saat pengabdian masyarakat ini sebagai solusi atas kemajuan zaman yang sangat pesat membuat permasalahan yang ada merasuki permasalahan dalam lingkungan keluarga. Tidak bisa di pungkiri antara kemajuan zaman dan budaya yang berkembang pesat di masyarakat akan memberi dampak terhadap kehidupan kita. Kasus Bullying pada anak sering kita dengar di saat ini. Fénomena bullying pada anak sudah merambah ke kalangan anak-anak di masyarakat kita. Kasus-kasus bullying pada anak saat ini membuat miris kita yang mendengarnya. Contoh kasus bullying terjadi menimpa siswi kelas 1 SD di Cibubur, Jakarta Timur diakhir 2011 oleh kakak kelasnya (baru kelas 3 SD), siswa tersebut dibenturkan kepalanya ke tembok kamar mandi berkali-kali (Vania Rossa, 2012). Sehingga orang tua harus melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib. Meski dilakukan oleh anak di bawah umur yang "belum berdosa" ,bullying harus ditanggapi dengan serius. Efek yang terjadi pada diri anak bisa sangat fatal ,baik dari pelaku maupun korbannya karena akan mempengaruhi harga diri dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit bullying yang berujung pada tragedi seperti bunuh diri. Setiap orang tua tentu berharap jangan sampai anaknya menjadi korban dan juga pelaku bullying ( Parenting Indonesia, 2012).

Tahap awal yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana para orang tua sadar bahwa seorang anak merupakan bagian dari anggota keluarga. Sebagian besar dari anak-anak dalam semua kelompok masyarakat bertumbuh dalam lingkungan rumah yang sedikitnya memiliki orang tua biologis atau dengan saudara mereka. Kita perlu memberikan pemahaman sesungguhnya semua anak terkait dengan keluarga. Anak dilahirkan ke dalamnya, bertumbuh menjadi dewasa didalamnya. Selanjutnya adalah memberikan pemahaman tentang fungsi keluarga yang paling luas diakui dan secara universal adalah melakukan perawatan dan pengasuhan. Pengasuhan merupakan tanggung jawab yang dilakukan orangtua. Pengasuhan adalah proses mendidik agar kepribadian anak berkembang baik. Pola asuh yang baik harusnya mampu membentuk kepribadian kuat, tak mudah putus asa dan tangguh menghadapi tekanan hidup. Menurut Suyanto (2002) salah satu untuk meningkatkan moral dan akhlak adalah melalui peran pendidikan dalam keluarga. Dalam kerangka itu hendaknya orangtua tidak menempatkan anak sebagai obyek, atau sekedar subyek. Namun harus dengan posisi yang seimbang, melibatkan seluruh aspek kepribadian anak. Dalam pendidikan keluarga diantaranya adalah melakukan pola pengasuhan yang benar. Pola pengasuhan yang benar salah satunya adalah memberikan pendidikan dengan mengenalkan nilai moral kepada anak. Ketika melaksanakan pendidikannya pun orang tua tidak bersikap otoriter tapi lebih pada pengenalan dan membangun kesadaran anak. Dengan cara mengasuh seperti ini maka anak tidak hanya merasa dikasihi, tapi sekaligus dimanusiakan. Sehingga dengan pendidikan yang baik ini tidak mengakibatkan pengaruh buruk kepribadian anak yang salah satu pengaruh buruk itu adalah terjadinya pembulian dengan anak sebagai pelakunya. Tahapan diatas kemudian yang di jelaskan dalam membantu pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan keluarga.

Bullying mempunyai dampak tidak hanya kepada korban tetapi juga kepada pelaku dan orang di sekitar bullying terjadi. Untuk mencegahnya tentu bukan berarti orangtua selalu berada di dekat anak selama 24 jam penuh atau memberikan kursus bela diri tetapi yang diperlukan adalah mendidik anak dengan gaya pengasuhan yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Bullying yang terjadi pada anak-anak maka kita berbicara tentang bullying yang terkait pada anak itu sendiri, orang tua dan keluarga serta lingkungan. Hubungan antara anak dengan orang tua merupakan sumber emosional dan kognitif bagi anak. Hubungan tersebut memberi kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi lingkungan maupun kehidupan sosial. Tentu saja keluarga adalah salah satu

dari banyak institusi yang terlibat dalam proses sosialisasi anak. Sosialisasi adalah proses interaksi anak dengan lingkungan terjadi dimana anak-anak mendapatkan keyakinan, nilai-nilai dan perilaku yang dianggap signifikan oleh para anggota yang lebih tua dalam masyarakat mereka.

Keluargalah yang memberikan dukungan emosional dan mengajarkan moral dalam bersosialisasi. Hal ini yang meningkatkan keterikatan anggota keluarga dan mendorong hasil perkembangan yang sehat (Brody, Stoneman & Flor, 1996). Keluarga bukan hanya sebuah sistem yang sedang berkembang kompleks, tetapi keluarga juga eksis dan berkembang dalam sebuah dunia yang secara konstan berubah. Selama separuh abad 20, beberapa perubahan sosial dramatis telah mempengaruhi wajah keluarga yang umum dan karakter kehidupan keluarga. Fénomena bullying merupakan hal yang masih terkait dengan perubahan sosial yang terjadi dimasa ini. Perlunya saat ini saat ini orang tua dalam mengasuh memberikansentuhan dari hati terdalam dengan modal kepercayaan, kasih serta cinta. Hal ini dilakukan sebagai tindakan agar bullying tidak terjadi pada anak. Karena merunut akar pembulian, Diena seorang ketua yayasan Semai Jiwa Amini, lembaga yang aktif memerangi pembulian menyebutkan adalah hilangnya nilai-nilai luhur dalam masyarakat yang mengutamakan rasa percaya (*trust*) dan saling menghormati (*respect*) sehingga bullying bisa terjadi. Karena hilangnya nilai luhur ini yang kemudian dominannya adalah ego yang ada pada diri pribadi anak. Masih menurut Diena, ini terjadi karena masih banyak orang tua bahkan guru yang melakukan *corporal punishment* dengan alasan untuk mendisiplinkan. Misal, memukul, mencubit, menjambak dan menyuruh push up. Padahal yang dilakukan sebenarnya bentuk lain dari kekerasan. (Utami Widowati, 2013).

Pengasuhan yang dilakukan orang tua di tahun-tahun awal kehidupan anak, akan mempunyai hubungan kelekatan pada anak. Kelekatan adalah suatu hubungan emosional atau hubungan yang bersifat afektif antara satu individu dengan individu lainnya yang mempunyai arti khusus. Kelekatan bukan hal yang terjadi secara alamiah namun ada serangkaian proses yang harus dilalui untuk membentuk kelekatan tersebut. Proses itu diterima anak dilandasi perasaan cinta, kasih dan sayang. Melalui cinta, kasih dan sayang orangtua, akan mengajarkan anak belajar mengenali, mempercayai dan memahami diri mereka sendiri. Dan berdasarkan kualitas hubungan kelekatan anak dengan pengasuh, maka anak akan mengembangkan konstruksi mental atau *internal working model* mengenai diri dan orang lain yang akan menjadi mekanisme penilaian terhadap penerimaan lingkungan (Bowlby dalam Pramana 1996). Anak yang merasa yakin terhadap penerimaan lingkungan

akan mengembangkan kelekatan yang aman dengan figure lekatnya (*secure attachment*) dan mengembangkan rasa percaya tidak saja pada ibu tetapi juga pada lingkungan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki kelekatan aman akan menunjukkan kompetensi social yang baik pada masa kanak-kanak (Both dkk dalam Parker, Rubin, Price dan Derosier, 1995) serta lebih populer dikalangan teman sebayanya di usia prasekolah (La Freniere dan Sroufe dalam Parker dkk, 1995). Anak-anak juga lebih mampu membina hubungan persahabatan yang intens, interaksi yang harmonis, lebih responsive dan tidak mendominasi (Parker dan Waters dalam Parker dkk,1995). Dari hal inilah yang kemudian diharapkan bisa menangkal terjadinya bullying pada anak.

Ketika orang tua menerapkan pengasuhan dengan kasih, cinta dan empati maka itu akan terus membekas di hati anak dan akan selalu mengingatkannya. Pengaruhnya tentu positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan mental anak. Bullying yang terjadi di lingkungan social anak dapat dicegah dengan membentuk mental yang sehat pada diri anak. Figur Orang tua yang mengasuh anak dengan mengembangkan kasih, sayang, dan empati akan memberikan teladan bagi anak untuk melakukan hal yang sama di terimanya kepada orang disekelilingnya.

Setelah membaca uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua dalam mengasuh anak perlu menciptakan ikatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak melalui perasaan kasih dan sayang. Mengasuh dengan cinta, kasih dan sayang akan membantu kompetensi social yang baik pada anak, sehingga dapat mencegah bullying terjadi di kalangan anak-anak. Keluarga yang harmonis dan pengasuhan orang tua dengan landasi cinta, kasih dan sayang merupakan cara yang efektif untuk mencegah bullying terjadi pada anak.

Tujuan dari penulisan ini adalah meminimalkan pembulian yang terjadi pada anak-anak terutama anak usia dini dimulai dengan cara orang tua menerapkan standar pengasuhan yang lebih menekankan pada kualitas hubungan kelekatan antara orang tua. Melalui pola asuh yang lebih mengedepankan perasaan, kasih, sayang dan empati.

## **BULLYING PADA ANAK**

Bullying bukan merupakan hal sepele, bukan pula sekedar dinamika pergaulan anak-anak. Bullying yang sedang marak terjadi perlu sama-sama di waspadai sebagai hal yang perlu di cegah dan di hilangkan. Apalagi ketika bullying terjadi di kalangan anak-anak. Siapapun anak-anak itu tentunya bullying akan memberikan dampak yang negative terhadap

perkembangan kepribadiannya. Bullying menjadi serius jika terjadi dikalangan anak-anak dan tidak ada penanganannya. Anak yang menjadi korban bullying terkadang menerima saja bullying yang terjadi pada dirinya. Karena anak menganggap sebagai kejadian biasa yang tidak menyenangkan yang terjadi saat berinteraksi dengan temannya. Menjadi masalah besar ketika bullying meninggalkan luka fisik pada diri anak. Tentunya anak akan mengadu kepada orang tua dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang baik sekolah maupun polisi. Menurut Olweus (1993) Bullying adalah perilaku negative yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka, dan biasanya terjadi berulang-ulang. Bullying, sering juga disebut sebagai pengorbanan teman sebaya (*peer-victimization*) dan penganiayaan senior terhadap junior (*hazing*), yaitu usaha untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah secara psikologis ataupun fisik, oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat (Mutiara pertiwi dan Juneman, 2012)

Di masa anak-anak bullying biasa terjadi pada yang lebih besar kepada anak yang lebih ke kecil. Di lingkungan sekolah biasanya dilakukan oleh kakak kelas kepada adik kelasnya. Pada tingkat pra sekolah dan SD awal, korban bully di usia ini adalah anak yang memiliki karakteristik cenderung pemalu, penakut, memiliki ukuran fisik yang lebih kecil dibanding teman seusianya, umurnya lebih muda, anak yang 'tampil beda' atau yang tidak memiliki banyak teman. Namun tidak tertutup kemungkinan anak diluar karekteristik seperti di atas juga menjadi korban bullying. Karena itu semua anak bisa saja menjadi korban bullying. Hanya saja, dengan adanya sifat atau karakteristik yang disebutkan di atas, risiko seorang anak untuk di-bully menjadi lebih besar.

Di ranah psikologi, masalah pembulian lumayan baru, tepatnya dimulai pada 1970-an. Saat itu psikolog Dan Ulwenes meneliti fonomena yang terjadi di sekolah di Norwegia. Setelah itu banyak penelitian yang dilakukan berdasarkan tingginya tingkat bunuh diri yang dipicu pembulian. (Utami Widowati, 2013). Saat ini pembulian yang terjadi di sekolah justru kebanyakan muncul dalam format acara yang dilegalisasi oleh instansi pendidikan yang bersangkutan, seperti Masa Orientasi Siswa (MOS), acara regenerasi kegiatan ekstrakurikuler atau bentuk acara lainnya yang tanpa di sadari menjadi ajang pembulian (Indriani, 2007). Berdasarkan kajian Andri Priyatna tahun 2010, ciri-ciri pembulian adalah :1. Dilakukan dengan sengaja, bukan suatu kelalaian dari pelaku; 2. Terjadi berulang-ulang, tidak dilakukan secara acak atau hanya sekali; 3. Di dasari oleh perbedaan kekuatan yang mencolok, misalnya dari segi fisik atau usia pelaku korban yang tidak seimbang (Mutiara Pertiwi dan Jumenan).

Pelaku bully memang selalu memilih target atau korban dari kalangan yang menurut mereka 'beda'. Pelaku bully akan menggunakan agresi dengan berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual (<http://nsholihat.wordpress.com/2012/08/08/bullying-oh-bullying>). Anak-anak yang menjadi korban bullying akan memperlihatkan perubahan sikap secara tiba-tiba. Misalnya anak akan menjadi pemurung, sering mengeluh sakit, gelisah saat tidur atau bermimpi buruk. Tanda lainnya adalah anak yang tadinya rajin ke sekolah menjadi sulit bahkan takut ke sekolah dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam keadaan yang tertekan korban bullying bisa mengalami depresi berat hingga berdampak berkepanjangan pada anak. Mulai dari masalah gangguan emosional dan perilaku, anak yang merasa tidak aman di sekolah, merasa terisolasi, rendah diri, stress dan mengalami kemunduran dalam berprestasi. Penanganan korban bully dengan akibat yang berat perlu berkonsultasi dengan psikolog. Bantuan sedini mungkin dapat membantu anak merasa positif dengan dirinya sendiri dan tidak membuatnya larut permasalahan yang sama. Orang tua perlu memberikan pendampingan secara khusus jika anaknya menjadi korban bullying. Respon orang tua ketika mengetahui anaknya korban bullying tentunya akan marah. Tetapi ini tidak bijak ketika pelakunya bagaimanapun tetaplah anak-anak di bawah usia. Bisa saja penyebabnya mungkin anak pelaku bullying adalah korban dari kondisi lingkungannya. Misalnya anak-anak yang terlalu sering terekspos adegan kekerasan rumah. Karena akhir-akhir masyarakat dikejutkan dengan banyaknya peristiwa kriminal yang melibatkan anak-anak. Atau adanya peristiwa kriminal yang terjadi pada anak-anak yang bersumber dari dalam keluarga. Khususnya perlakuan salah yang dilakukan orang tua kepada anak sehingga menyebabkan sumber ancaman dan ketidaktentraman bagi diri anak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang di dapatkan oleh Putra (dalam Andayani, 2001) melalui penelitiannya "*A Focused on Child Abuse in Selected Provinces in Indonesia*", menemukan hasil-hasil perlakuan salah (maltreated) anak yang terjadi dalam ranah public dan domestic, ternyata sebagian besar dilakukan oleh orang tua mereka. Adapun yang dimaksud dengan perlakuan salah dalam hal ini adalah segala jenis bentuk perilaku terhadap anak yang mengancam kesejahteraan anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, social, psikologis, mental dan spiritual (Ervika, 2000)

## **DAMPAK BULLYING**

Berdasarkan temuan-temuan riset yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (dalam SEJIWA 2008), terdapat tiga pihak yang terlibat dalam bullying, yaitu :



Pertama, pelaku pembulian (*bullies*), yakni pihak utama yang memicu terciptanya pembulian. Pelaku pembulian juga merupakan provokator, aggressor, sekaligus inisiator dalam pembulian.

Kedua, korban pembulian (*victims*), Korban bukan merupakan pihak yang pasif dalam pembulian. Sebenarnya mereka juga turut memelihara dan menjaga situasi pembulian tetap terjadi dengan bersikap diam. Sikap diam tersebut dilatarbelakangi dengan pemikiran apabila ia melaporkan pembulian yang menimpanya, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, serta keyakinan bahwa ia pantas menerima pembulian tersebut dan bahwa orang tua dan guru tidak dapat menangani pembulian tersebut.

Ketiga, saksi pembulian (*by stander*). Saksi berperan dengan dua cara, yaitu menyoraki dengan aktif serta mendukung pelaku pembulian, atau diam dan bersikap acuh tak acuh. Saksi pembulian yang aktif menertawakan dan menyoraki korban pembulian yang sedang teraniaya, sebenarnya telah menjadi anggota kelompok yang dipimpin oleh pelaku pembulian. Sedangkan saksi yang diam dan acuh tak acuh lebih banyak karena takut, bahwa jika ia melakukan intervensi maka ia akan turut menjadi korban saat itu juga ataupun nanti (Mutiara pertiwi dan Juneman, 2012)

Pada usia prasekolah, kasus bullying akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik itu si pelaku (*bullies*), korban (*Victims*) dan juga saksi pembulian atau anak yang berada di tempat pembulian. Menurut hasil studi Sanders (dalam Anesty, 2009) dari National Youth Violence Prevention Center mengemukakan bahwa para pelaku (*bullies*) ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, berwatak keras, mudah marah dan impulsif, memiliki toleransi rendah terhadap frustrasi. Termasuk sebagai seorang yang tidak memiliki empati dan suka mendominasi. Sedangkan dampak bullying bagi korban (*victims*), dapat menimbulkan rasa cemas dan ketakutan, mempengaruhi konsentrasi belajar di sekolah dan menghindar dari sekolah. Bila bullying terus terjadi dalam jangka waktu yang lama akan dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak, meningkatkan isolasi social, memunculkan perilaku menarik diri, menjadi stress dan depresi serta rasa tidak aman. Akibat yang paling ekstrim bisa membunuh atau melakukan bunuh diri. Demikian juga *bullying* akan berdampak pada anak yang menyaksikan, ini akan memberikan contoh negatif akan perilaku yang dilihatnya. Karena bisa saja anak menjadikan apa yang dilihatnya contoh yang secara nyata terekam dalam otaknya. Perlu diingat anak memiliki imajinasi dan

keaktivitas tinggi yang mungkin mendapat idedari apa yang pernah dilihatnya (Mutiar  
Pertiwi dan Juneman, 2011).

Perlunya tindakan tegas jika *bullying* masuk dalam tahap yang membahayakan, misalnya kekerasan fisik yang menimbulkan bekas luka. Mengajarkan anak untuk membalas perlakuan temannya, bukan penyelesaian masalah yang baik. Penyelesaian terbaik dari masalah *bullying* pada anak adalah mencari mediator. Anak-anak sangat rentan terhadap kejadian yang membuat trauma. Anak-anak lebih mudah mengalami masalah emosional. Keberadaan orang tua sangat membantu untuk bisa membuat anak nyaman dan bisa kembali dalam lingkungan sosialnya.

Tentunya dalam kasus *bullying* yang terjadi, tidak ada sedikitpun hal yang membuat ini bisa dikatakan sepele. Masa depan seorang anak masih sangat panjang dan membutuhkan berbagai potensi, kemampuan untuk bisa survive. Tidak mengherankan jika peran keluarga, orang tua serta pihak sekolah sangat besar untuk dapat menyelesaikan *bullying* pada anak. Orang tua perlu memberikan perhatian kepada anak dengan mengenal sifat dan karakteristik dari anaknya agar dapat membantu meminimalkan kemungkinan *bullying* terjadi.

## **MENGASUH DENGAN HATI (CINTA)**

Penelitian mengenai pola asuh orang tua yang terkait dengan bagaimana seorang anak menjadi korban *bullying* masih memuat sejumlah hasil yang kontroversial. Mendidik dan mengasuh seorang anak merupakan tugas yang penuh dengan tanggung jawab. Dalam mengasuh orangtua akan menanamkan nilai-nilai moral sesuai dengan tuntutan yang ada di masyarakat. Menjadi orangtua yang bijak bagi anak-anak bukanlah pekerjaan yang ringan, bahkan ini sebuah tantangan yang tidak pernah mengenal kata "sempurna". Pendidikan keluarga dengan pola pengasuhan menerapkan yang baik dapat mengembangkan sebuah atmosfer keluarga yang sehat dan konstruktif sehingga tujuan-tujuan orang tua dan anak bisa di wujudkan secara sempurna. Pendidikan dalam keluargayang benar akan mencapai tujuan yang di inginkan dan akan menciptakan keluarga yang harmonis dan membuat anak-anak tumbuh dewasa dengan moral baik dan bertanggung jawab.

Pendidikan keluarga menjadi pondasi dalam membentuk karakter anak. Salah satu karakter yang penting dalam membina hubungan sosial dengan orang lain adalah perasaan empati . Empati merupakan kemampuan menyelami perasaan orang lain. Untuk itu, seseorang harus menyadari baik perasaan dirinya maupun orang lain. Sungguh menarik bahwa semakin

baik anak memahami perasaannya, semakin baik anak memahami perasaan orang lain. Memahami perasaan orang adalah bagian penting pengembangan kepekaan terhadap sesama. Kemampuan berempati sangat diperlukan orangtua untuk memahami anak-anak dan vital bagi anak-anak untuk belajar berempati sebagai keterampilan social positif. Mengasuh dengan empati akan diterima anak sebagai bentuk kepercayaan orang tua kepada anak (Lawrence J. Greene, 2005).

Mengasuh dengan cinta dan kasih sayang, maka anak belajar mengenali, mempercayai dan memahami diri mereka sendiri. Sehingga anak mengetahui kelebihan dirinya dan menerima kekurangannya pada dirinya. Pengasuhan seperti ini akan memberikan ruang nyaman dalam kehidupan. Dalam istilah Euis Sunarti, penulis buku "Mengasuh dengan Hati" dengan mengetahui kekurangan dan kelebihannya—perasaan negative dan positif -- anak merasa nyaman mengoptimalkan kelebihannya. Mengasuh anak merupakan pekerjaan yang paling sulit namun sekaligus paling membahagiakan bagi orangtua (Euis Sunarti, 2004).

Mengasuh mulai dilakukan sejak anak tersebut belum dilahirkan. Sejak janin dalam kandungan, anak sudah mempunyai hubungan emosional dengan ibu (Sutcliffe, 2002). Hubungan kelekatan ibu dan anak berkembang di tahun awal-awal kehidupan. Hubungan kelekatan antara anak dan ibu memperkuat kepekaan diantara mereka. Dalam prosesnya hubungan kelekatan menumbuhkan kasih dan sayang antara anak dan orangtua. Hal ini akan punya pengaruh pada suasana kehidupan berkeluarga yang stabil dan bahagia. Berdasarkan kualitas hubungan anak dengan pengasuh, maka anak akan mengembangkan konstruksi mental mengenai diri dan orang lain yang akan menjadi prototip dalam hubungan social (Bowlby dalam Pramana, 1996). Jika hubungan itu memberikan pengalaman positif, akan berdampak positif terhadap diri individu dan lingkungannya.

Beberapa gaya mengasuh dengan hati yang

1. Gaya asuh berdimensi kehangatan, gaya ini bercirikan pada kualitas kasih sayang orang tua pada anak baik secara fisik—elusuan, usapan, cium pipi atau rangkulan—maupun secara verbal—pujian, penghargaan dan motivasi.
2. Gaya asuh simpatik, pengasuh ini merupakan kombinasi pengasuhan dimana orang tua menerima emosi anak tanpa syarat dan bersimpati kepada mereka plus memberi pedoman dan arahan atas emosi anak.
3. Gaya asuh berdimensi arahan, termasuk ke dalam gaya ini adalah pengasuhan yang bersifat demokratis, otoriter dan permisif. Secara umum pada dasarnya menghendaki

agar anak memiliki keterampilan hidup, disiplin. Namun gaya pengasuhan yang paling efektif dapat membentuk anak positif adalah demokratis. Karena memberikan dimensi control yang tinggi serta refleksi kehangatan yang tinggi (Euis Sunarti, 2005).

Orang tua menerapkan pengasuhan yang penuh cinta, kasih dan sayang akan menghasilkan hubungan yang sehat. Baik hubungan kelekatan antara orang tua dan anak maupun hubungan anak dengan teman sebayanya. Dengan memberikan cinta, kasih dan sayang pula akan memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap perkembangan individu dan sosial. Sehingga pengasuhan anak akan lebih berkualitas dan dapat meningkatkan kemampuan, kesiapan prakademis dan aspek perkembangan positif lainnya. Pengalaman-pengalaman selama pengasuhan memegang peranan penting dalam mencegah terjadinya bullying pada anak. Dan ini akan berguna bagimasa depan anaknantinya.

## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Menedukasi masyarakat melalui kegiatan pengabdian masyarakat sangat dibutuhkan. Masyarakat harus paham peran keluarga sangat penting dalam membentuk moral anak. Dan ini akan berpengaruh terhadap kehidupan anak dimasa sekarang dan masa akan datang. Sehingga masalah yang berkaitan dengan pembulian bisa harus di cegah melalui pendidikan moral yang benar di keluarga.

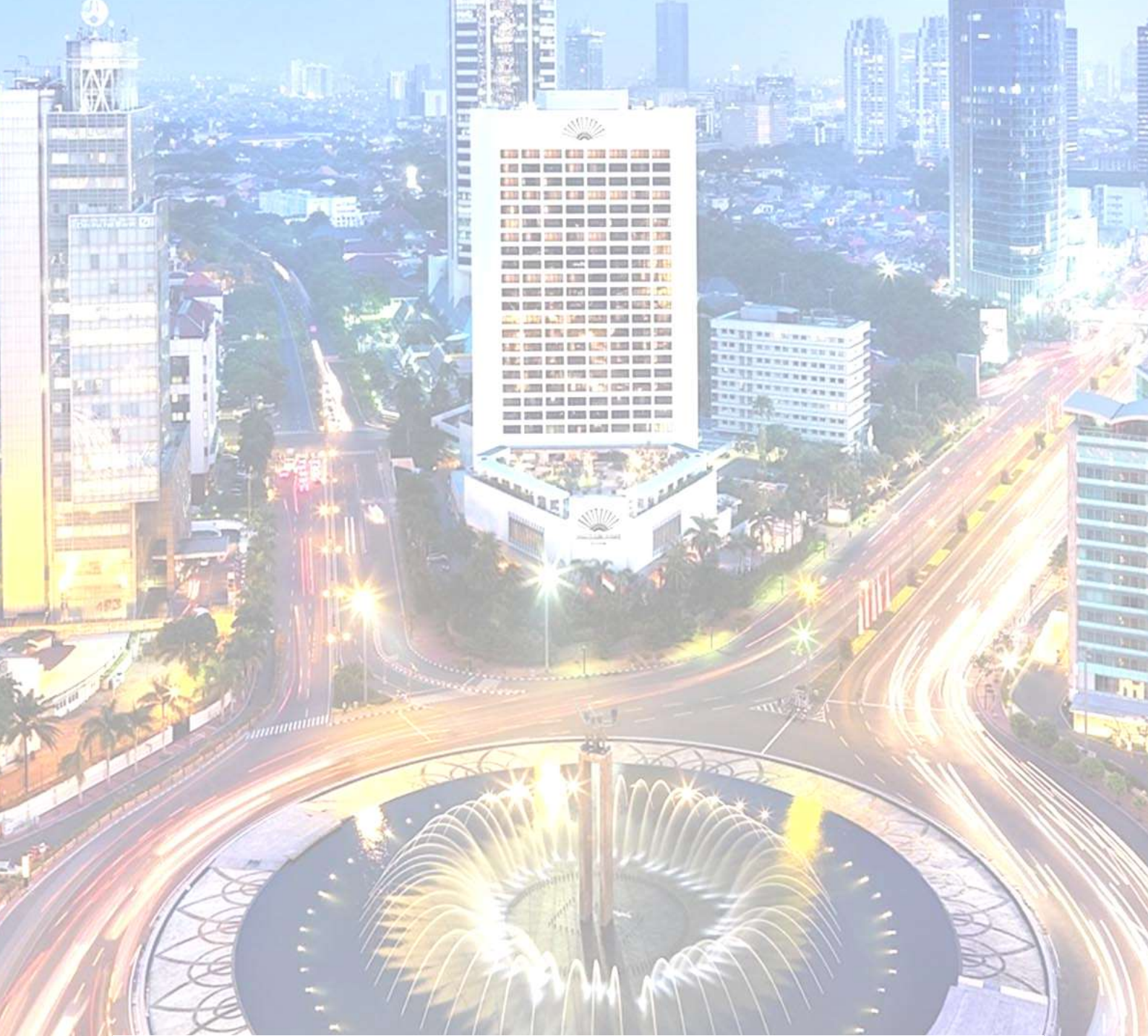
Dari pendidikan keluarga anak akan mendapatkan contoh teladan dalam berperilaku dan contoh teladan akan diterapkan anak ketika berada di lingkungan sosial. Tidak heran jika sekarang ini muncul permasalahan yang terjadi baik sebagai keluarga, dan sebagai masyarakat ketika tindak kekerasan dan tindakan tidak terpuji seperti *bullying* terjadi pada anak-anak. Sangat penting untuk memberikan lingkungan yang kondusif bagitumbuh kembanganak yang dimulai dari dalam keluarga dengan menerapkan standar pola asuh yang penuh kehangatan dan kasih sayang.

Pengasuhan orang tua menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang anak. Anak mendapatkan pengalaman pertama dari pengasuhan yang diterimanya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehangatan dan afeksi yang di berikan selama dalam pengasuhan orang tua akan berpengaruh terhadap perkembangan anak selanjutnya (Ampuni,2002). Ketika orang tua mengasuh dengan kasih,sayang dan empati anak akan belajar keteladanan itu dari mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepedulian tentang moral dapat dilakukan dengan melibatkan semua komponen. Salah satunya adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang membuka pengetahuan para keluarga di Indonesia cara pengasuhan anak yang dilakukan dengan cinta, kasih dan sayang dari orang tua sangat penting untuk meminimalkan terjadinya pembulian pada anak. Hubungan harmonis antara anak dan orang tua akan membantu anak mencapai perkembangan yang optimal dan memiliki figur yang dapat diteladani. Sehingga anak memiliki kemampuan dan nilai-nilai positif yang berguna untuk kehidupan sosialnya di masa datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ampuni, S., (2002). *Hubungan antara Ekspresi Afeksi Ibu dengan Kompetensi Sosial Anak Prasekolah*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi psikologi Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada.
- Andayani, T.R., (2001). *Perlakuan Salah Terhadap Anak ( Child Abuse) Ditinjau dari Nilai Anak dan Tingkat Pendidikan Orang Tua*. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Psikologi Pascasarjana Universitas Gajah Mada.
- Ervika, Eka, (2002). *Kualitas kelekatan dan Kemampuan Berempati pada Anak*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada
- Ervika, Eka., *Kelekatan (Attachment) pada Anak*, [Http://Library.Usu.ac.id/download/fk/psikologi-Eka% 20 erika. Pdf](http://Library.Usu.ac.id/download/fk/psikologi-Eka%20erika.Pdf). Diakses tanggal 5 Januari 2014.
- Greene, J. Lawrence., (2005). *Smart Parenting.*, Jakarta : Prestasi Pustaka Raya..
- Juneman, dan Mutiara., (2011). [www. Academia.edu/2487578/Peran Pola Asuh Orang tua dalam Mengembangkan Remaja Menjadi Pelaku dan atau Korban Pembulian di sekolah](http://www.Academia.edu/2487578/Peran_Pola_Asuh_Orang_tua_dalam_Mengembangkan_Remaja_Menjadi_Pelaku_dan_atau_Korban_Pembulian_di_sekolah)
- Mc Cartney, K. & Dearing, E., (Ed).(2002). *Child Development*. Mc Millan Reference USA
- Pramana, W, (1996). *The Utility of Theories of Parenting, Attachment, Stress and Stigma in Predicting Adjustment to Illness*. *Desertasi*. Departement of Psychology the University of Queensland
- Rossa, Vania., (2012). *Tak mempan di-bully*. Parenting Indonesia. Edisi Januari
- Sunarti, Euis., (2004). *Mengasuh dengan Hati : Tantangan yang Menyenangkan*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sunarti, Euis., (2005). *Attachment Parenting: Kiat Mengasuh Anak dengan Hati*. Parenting Guide Vol 2 NO. 5
- Sutcliffe, J., (2002). *Baby Bonding, Membentuk Ikatan Batin dengan Bayi*. Jakarta: Taramedia & Restu Agung
- Suyanto, 2001. *Wajah dan Dinamika Pendidikan Anak Bangsa Yogyakarta*. Yogyakarta : Karya Nusa
- Widowati, Utami., (2012). *Pembulian: Pahami, Perangi*. Online .Internet. Available [Http://www.Tempo.co](http://www.Tempo.co)



ISBN 978-602-73913-3-8

